

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

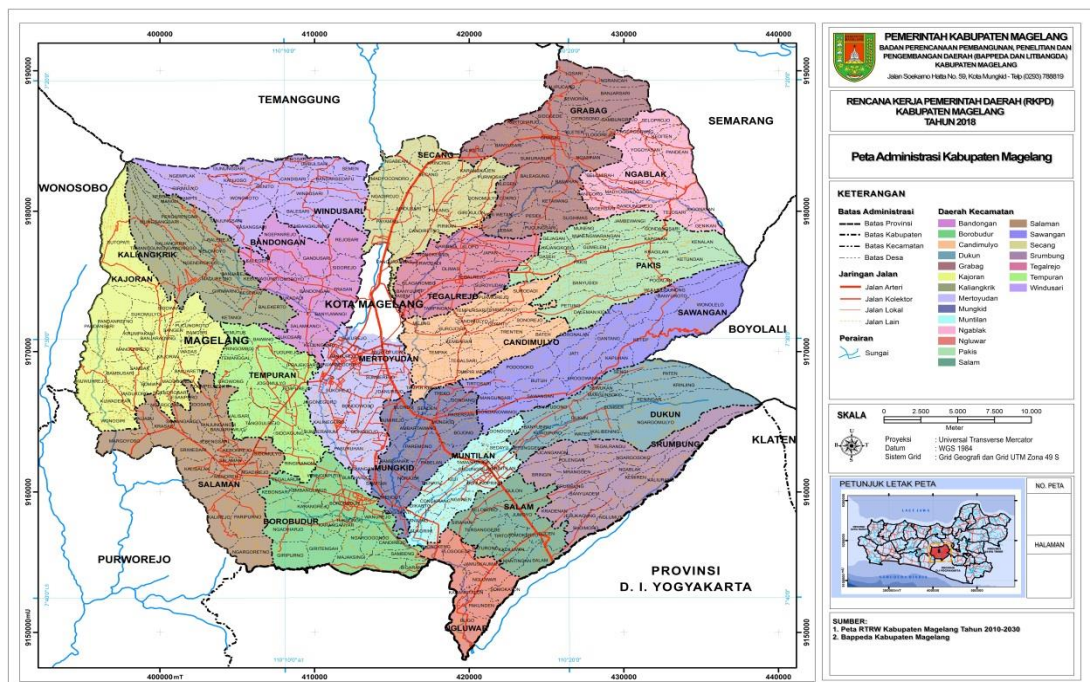
2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran (83,41km²), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar (22,44 km²).



Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2017

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten-kabupaten lain, yaitu:

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang,
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali,
- Sebelah selatan: Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo,
- sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang.

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisi Kabupaten Magelang yang terletak di antara kota besar yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu letak strategis kabupaten tersebut juga dapat dilihat dari letaknya yang di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang.

Adapun luas masing-masing kecamatan, persentase luas daerah, jarak terdekat/termudah dari ibu kota kabupaten ke kecamatan dan ketinggian dari permukaan laut di Kabupaten Magelang disajikan dalam Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.

Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan se-Kabupaten Magelang dan Ketinggian dari Permukaan Laut

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Luas	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten (km)	Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl)
1.	Salaman	68,87	6,34	15	208
2.	Borobudur	54,55	5,02	4	235
3.	Ngluwar	22,44	2,07	22	202
4.	S a l a m	31,63	2,91	19	336
5.	Srumbung	53,18	4,90	19	501
6.	D u k u n	53,40	4,92	21	578
7.	Muntilan	28,61	2,64	17	348
8.	Mungkid	37,40	3,44	7	320
9.	Sawangan	72,37	6,67	15	575
10.	Candimulyo	46,95	4,32	17	437
11.	Mertoyudan	45,35	4,18	6	347
12.	Tempuran	49,04	4,52	8	210
13.	Kajoran	83,41	7,68	31	578
14.	Kaliangkrik	57,34	5,28	34	823
15.	Bandongan	45,79	4,22	20	431
16.	Windusari	61,65	5,68	25	525
17.	Secang	47,34	4,36	22	470
18.	Tegalrejo	35,89	3,31	22	478
19.	Pakis	69,56	6,41	29	841
20.	Grabag	77,16	7,11	33	680
21.	Ngablak	43,80	4,03	37	1.378
	Total	1.085,73	100.00		360

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2017

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110⁰01’51” dan 110⁰26’58” Bujur Timur dan antara 7⁰19’13” dan 7⁰42’16” Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah pulau Jawa, tepatnya di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Magelang-Temanggung.



Sumber: Bappeda Kabupaten Magelang, 2017

Gambar 2.2.

Posisi Kabupaten Magelang di antara Jalur Transportasi Strategis Provinsi Jawa Tengah

Jarak antara ibu kota Kabupaten Magelang dengan beberapa ibu kota kabupaten/kota lain di Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2.

Jarak antara Ibu Kota Kabupaten Magelang (Kota Mungkid) ke Beberapa Ibu Kota Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Ibu Kota Kabupaten/Kota	Jarak (km)	Ibu Kota Kabupaten/Kota	Jarak (km)
Kab. Cilacap	182,00	Kab. Kudus	141,00
Kab. Banyumas	163,00	Kab. Jepara	161,00
Kab. Purbalingga	149,00	Kab. Demak	116,00
Kab. Banjarnegara	117,00	Kab. Semarang	64,50
Kab. Kebumen	92,70	Kab. Temanggung	33,70
Kab. Purworejo	53,30	Kab. Kendal	91,00
Kab. Wonosobo	77,30	Kab. Batang	108,00
Kab. Boyolali	48,40	Kab. Pekalongan	148,00
Kab. Klaten	62,00	Kab. Pemalang	181,00
Kab. Sukoharjo	94,50	Kab. Tegal	210,00
Kab. Wonogiri	134,00	Kab. Brebes	220,00
Kab. Karanganyar	114,00	Kota Magelang	13,20
Kab. Sragen	124,00	Kota Surakarta	94,10
Kab. Grobogan	154,00	Kota Salatiga	67,40
Kab. Blora	204,00	Kota Semarang	95,40
Kab. Rembang	219,00	Kota Pekalongan	148,00
Kab. Pati	164,00	Kota Tegal	210,00

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2017

2.1.1.3. Topografi

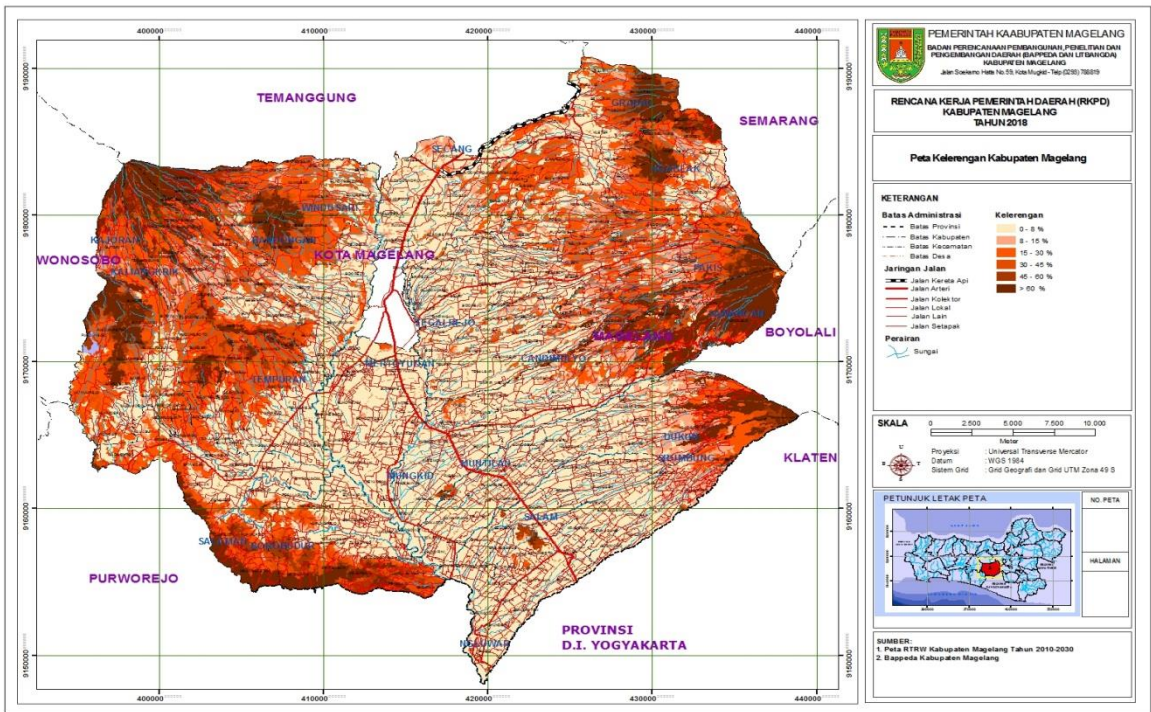
Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk *basin* (cekungan) dengan dikelilingi lima gunung yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing, serta terdapat Pegunungan Menoreh di sisi selatan. Kondisi ini menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah tangkapan air sehingga tanahnya subur karena berlimpahnya sumber air dan sisa abu vulkanis. Di bagian tengah wilayah Kabupaten Magelang mengalir satu sungai besar yaitu Sungai Progo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng-lereng gunung.

Wilayah Kabupaten Magelang mempunyai topografi yang beragam. Luas daerah dengan topografi datar adalah 8.599 ha, bergelombang 44.784 ha, curam 41.037 ha dan sangat curam 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153 - 3.065 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian rata-rata 360 m di atas permukaan laut. Adapun Kelerengan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.3. dan gambar 2.3. berikut:

Tabel 2.3.
Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

No	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0 - 2 %	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan dan Salaman (kurang lebih 1,5% dari luas wilayah).
2.	2 - 15 %	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah.
3.	15 - 40 %	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah).
4.	> 40 %	Berbukit sampai bergunung-gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan dan Dukun (18% dari luas wilayah).

Sumber : Bappeda dan Litbagda Kabupaten Magelang, 2017



Sumber : Bappeda dan Litbagda Kabupaten Magelang, 2017

Gambar 2.3.
Peta Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

Variasi wilayah dengan kemiringan lereng seperti yang ada di Kabupaten Magelang tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi Kabupaten Magelang. Dampak positifnya adalah variasi tersebut merupakan faktor penunjang pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam di Kabupaten Magelang seperti kegiatan pariwisata, pertanian dan perkebunan. Sedangkan dampak negatifnya adalah variasi kemiringan lereng tersebut merupakan salah satu faktor

penyebab terjadinya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang yaitu gerakan tanah (tanah longsor).

2.1.1.4. Geologi

Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa, tufa lapili, aglomerat dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk dataran Magelang berupa tanah endapan *alluvial* yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan/*alluvial* yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.

Secara rinci, jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Magelang adalah:

- *Alluvial* kelabu, *alluvial* coklat, regosol coklat kelabu dan coklat tua yang banyak terdapat di daerah dataran seperti, Kecamatan Mertoyudan, Mungkid, Candimulyo, Salaman, Secang, Tegalrejo, Muntilan, Srumbung, Salam dan Ngluwar.
- Regosol kelabu dan coklat tua, andosol coklat, lithosol latosol coklat, banyak terdapat di daerah lereng pegunungan seperti, Kecamatan Windusari, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Grabag, Pakis, dan Bandongan.
- Latosol coklat kemerahan ada di Kecamatan Grabag dan Ngablak.
- Latosol coklat tua kemerahan ada di Kecamatan Salam, Kajoran, Kaliangkrik, Salaman, Tempuran, Bandongan dan Windusari.
- Latosol merah kekuningan ada di wilayah Kecamatan Salaman dan Borobudur.

Kondisi fisiografi Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan yang dikelilingi oleh Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan Pegunungan Bukit Menoreh memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang seperti berlimpahnya bahan tambang galian B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Hanya saja jenis bahan tambang di Kabupaten Magelang yang menghasilkan produk dengan jumlah relatif banyak adalah sirtu dan marmer. Marmer selama ini hanya ditambang saja tetapi pengolahan menjadi barang lain tidak dilakukan di Kabupaten Magelang. Padahal apabila bisa diolah menjadi produk lain bisa mendatangkan tambahan PAD bagi Kabupaten Magelang dan juga akan mengurangi frekuensi kegiatan pertambangan marmer tersebut sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan.

Secara lebih rinci, penyebaran sumber daya mineral dan kegunaannya bisa dilihat pada Tabel 2.4. berikut.

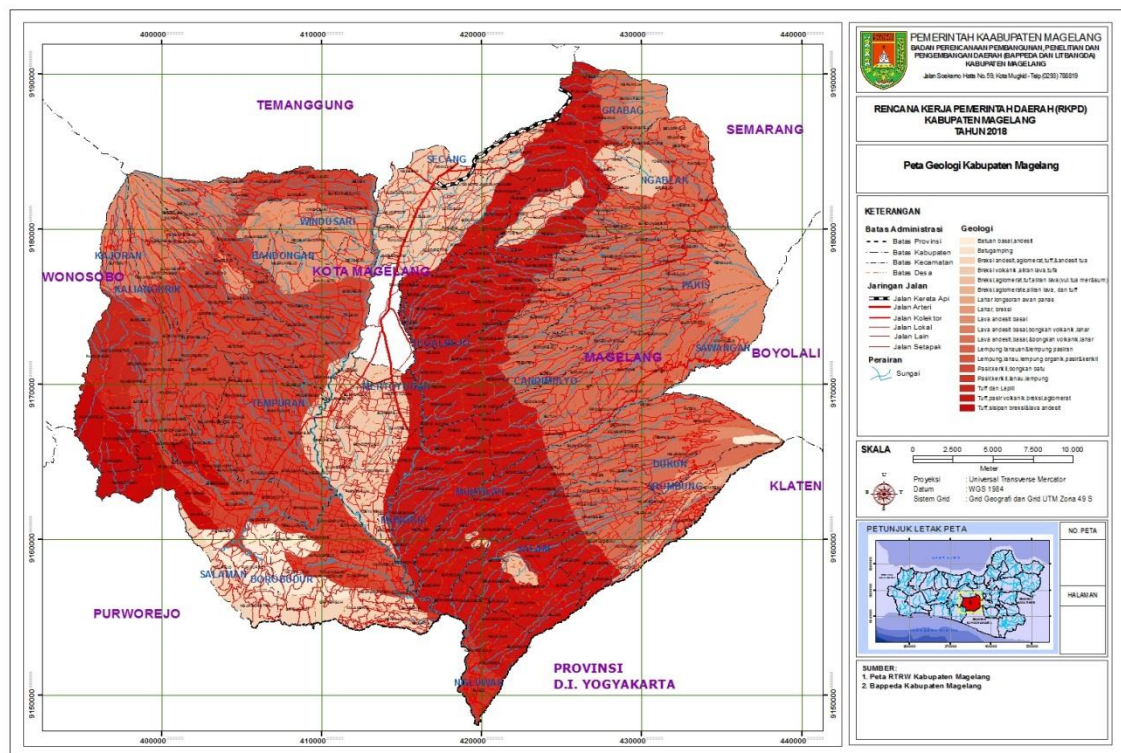
Tabel 2.4.
Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya

No	Jenis Bahan Galian	Kegunaan	Lokasi
1.	Trass	Bahan baku pembuatan semen puzolan, bahan baku pembuatan batako, bahan bangunan konstruksi ringan/berat, semen alam, dan tanah urug.	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Salaman• Desa NgadiharjoKecamatan Borobudur• Desa Bawang Kecamatan Tempuran
2.	Tanah Liat	Bahan baku pembuatan batu bata, gerabah, genteng, semen, dan keramik.	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Salaman• Desa Karanganyar

No	Jenis Bahan Galian	Kegunaan	Lokasi
			Kecamatan Borobudur <ul style="list-style-type: none"> • Desa Sidoagung dan Somoketro Kecamatan Salam
3.	Batu gamping	Digunakan dalam berbagai macam bidang seperti aneka industri kimia, industri bangunan dan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Salaman • Kecamatan Borobudur
4.	Marmer	Untuk pembuatan tegel, meja, patung, pilar dan perangkat toilet	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Salaman • Kecamatan Borobudur
5.	Andesit	Bahan pondasi: bangunan gedung, jalan raya, dan dam. Selain itu bisa digunakan sebagai batu split, pasir, dan abu batu sebagai bahan utama pembuatan beton	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Griputno Kecamatan Borobudur • Desa Bawang Kecamatan Tempuran
6	Sirtu	Bahan bangunan perumahan, jalan dan saluran air	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Windusari • Kecamatan Bandongan • Kecamatan Borobudur • Kecamatan Srumbung • Kecamatan Dukun • Kecamatan Sawangan • Kecamatan Pakis • Kecamatan Salam • Kecamatan Candimulyo
7.	Kaolin	Bahan baku industri keramik, filler dalam industri kertas, karet, cat, dan plastic	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur
8.	Oker	Sebagai pigmen dan serbuk poles, bahan pewarna cat, pembuatan semen, plester, campuran karet dan campuran plastic	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan • Desa Giripurno Kecamatan Borobudur
9.	Mangan	Menjadi bahan baku industri metalurgi maupun non metalurgi. Bahan non metalurgi bisa menjadi produksi baterai, kimia, keramik dan gelas, glasir dan frit, pertanian, dan proses produksi uranium	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Giripurno Kecamatan Borobudur • Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2017

Data lebih lengkap mengenai informasi di atas di atas juga bisa dilihat pada gambar 2.4. (Peta Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya) di bawah ini.



Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2017

Gambar 2.4.
Peta Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya

2.1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan tinggi dan memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya.

Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto. DAS Progo bagian hulu terdapat sungai besar yaitu Sungai Progo. DAS Progo ini meliputi wilayah di Kecamatan Windusari, Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid, Tegalrejo, Muntilan, Salam, Ngluwar, Grabag, Sawangan, Dukun, dan Srumbung. Sedangkan DAS Bogowonto berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran. Wilayah Kabupaten Magelang mempunyai satu sungai besar dan 124 (seratus dua puluh empat) sungai kecil dengan jumlah debit maksimum 5.043,25 m³/detik dan minimum 847,83 m³/detik. serta 219 (dua ratus sembilan belas) mata air dengan jumlah debit 12.252 liter/detik.

Wilayah Kabupaten Magelang sebagai daerah yang dikelilingi gunung-gunung merupakan daerah tangkapan air hujan. Dalam neraca air tahun 2000, cadangan air tanah dangkal/bebas yang dimanfaatkan 1.492,99 juta m³/tahun, dan untuk air tanah sedang/semi artesis 3.732,48 juta m³/tahun.

Curah hujan potensial 4.067,14 juta m³/tahun atau dengan intensitas 3.746 mm/tahun. Sedangkan air hujan tertampung 78,32 juta m³/tahun.

Potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan adalah:

- Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang mengalir di sungai-sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai yang melintas di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Sungai-sungai yang Melintas di Kabupaten Magelang

No.	Nama Sungai	Debit (m ³ /dtk)	
		Maksimum	Minimum
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Krasak	177,66	29,61
2	Bebeng	62,60	15,23
3	Mandung	20,30	5,64
4	Petel	15,86	8,46
5	Gayam	11,42	1,41
6	Duren	34,12	4,51
7	Cebong	11,42	2,82
8	Slamet	27,07	4,23
9	Batang	56,40	10,58
10	Sendang	16,07	5,64
11	Gandu	18,61	3,95
12	Maling	8,46	2,12
13	Gremeng	27,92	4,23
14	Mayeng	18,05	4,23
15	Jengking	14,10	2,82
16	Manggisan	19,74	5,64
17	Bledu	16,92	3,81
18	Dukuh	19,18	6,77
19	Druju	21,57	2,96
20	Clumprit	11,00	3,38
21	Pandanan	16,92	4,23
22	Jlegong	36,66	9,02
23	Putih	169,2	14,1
24	Bunut	32,57	6,77
25	Blongkeng	87,98	17,63
26	Lamat	54,29	8,46
27	Pule	18,75	3,81
28	Pundung	15,86	5,64
29	Keji	31,02	8,46
30	Biru	25,38	6,77
31	Bangkong	33,84	4,23
32	Senowo kecil	21,15	6,35
33	Senowo	57,53	8,46
34	Sewukan	39,48	4,23
35	Kepil	22,77	4,65
36	Jombol	21,57	4,51
37	Tringsing	51,32	10,15
38	Kunjang	38,35	6,77
39	Klesem	10,58	2,54
40	Apu	33,84	8,46
41	Pabelan	391,28	42,3
42	Kuning	21,15	4,23
43	Gung	21,43	5,08
44	Mangu	91,37	11,28
45	Dadar	32,57	6,35
46	Progo	777,26	84,6
47	Legono	47,38	5,92
48	Anggas	40,33	6,77
49	Mejing	27,92	3,38
50	Soti	50,76	2,82
51	Beji	19,04	3,38
52	Katang	19,04	2,26
53	Parangan	9,31	1,69
54	Benger	10,15	1,97
55	Talang	7,05	1,69

No.	Nama Sungai	Debit (m ³ /dtk)	
		Maksimum	Minimum
56	Sono	25,38	6,35
57	Gayur	22,56	2,54
58	Gandu	24,82	6,2
59	Segoro	27,92	3,95
60	Andong	20,3	2,82
61	Balong	29,61	14,1
62	Sat	32,15	3,38
63	Balong	61,34	15,23
64	Katang	21,57	4,23
65	Mambang	26,65	9,02
66	Pucang	34,83	8,46
67	Elo	135,36	11,28
68	Grabag	31,02	8,46
69	Daru	54,64	14,1
70	Sarangan	20,09	3,38
71	Sat	24,11	4,23
72	Tengah	11,84	2,26
73	Beji	18,05	5,08
74	Sorobayan	14,66	3,81
75	Urang	13,75	3,38
76	Sindon	27,07	4,23
77	Sileng	46,53	11,28
78	Suroloyo	37,22	2,26
79	Ngaglik	18,05	2,82
80	Mendo	13,82	3,38
81	Kluban	25,38	5,08
82	Rejo	15,23	2,82
83	Cangkringan	11,28	2,54
84	Caren	15,23	3,38
85	Lumut	16,92	2,26
86	Lingseng	20,3	4,23
87	Gambyangan	18,61	3,38
88	Tangsi	186,12	31,73
89	Wader	11,65	1,69
90	Glutak	13,82	2,54
91	Krengseng I	9,08	1,69
92	Krengseng II	10,26	1,97
93	Loro	39,48	10,58
94	Anget	15,79	3,38
95	Sinan	15,79	5,08
96	Curuk	15,79	2,82
97	Setro	9,87	2,26
98	Lanang	9,38	1,97
99	Jangkang	13,54	4,23
100	Glagah	13,54	4,23
101	Krasak	12,41	1,69
102	Loro	67,68	14,1
103	Loning	59,22	8,46
104	Wulung	21,71	3,81
105	Kembang	8,88	1,69
106	Jangkar	14,81	2,26
107	Dammar jati	19,04	4,23
108	Posong	13,75	2,82
109	Kanci	81,08	10,58
110	Kanci Kidul	59,93	10,58
111	Kanci Lor	51,89	10,58
112	Semawang Ki	25,38	4,23
113	Semawang Ka	111,67	16,92
114	Guntur	15,51	3,38

No.	Nama Sungai	Debit (m ³ /dtk)	
		Maksimum	Minimum
115	Selogriyo	17,84	3,38
116	Derso	15,23	1,97
117	Cemuk	11,8	2,54
118	Cibuk	9,87	1,69
119	Celapar	42,3	11,84
120	Butek	12,63	1,69
121	Balung	12,83	1,97
122	Jail	13,32	2,26
123	Sikuwuk	13,82	2,26
124	Klegung	33,84	8,46
125	Semagung	22,84	3,35

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Opak, 2017

- Air Tanah

Air Tanah di Kabupaten Magelang berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu:

- 1) Mandala air tanah gunung api strato
Air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng gunung api Merbabu, Merapi dan Sumbing.
- 2) Mandala air tanah antar pegunungan
Air tanah jenis ini berada di antara Gunung Api Merbabu, Merapi dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 meter di atas permukaan air laut. Air tanah di daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas *aquifer* yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (kurang dari 10 meter), dengan debit sumur mencapai 4 liter/detik.

Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan dikelilingi oleh 5 (lima) gunung menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Jumlah mata air di Kabupaten Magelang sebanyak 219 mata air. Mata air tersebut berada di sekitar kaki gunung api yang ada di Kabupaten Magelang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang tahun 2017, jumlah mata air yang digunakan oleh PDAM adalah 18 mata air.

Selain itu, kelima gunung yang ada di Kabupaten Magelang dengan kondisi fisiknya yang spesifik merupakan *recharge area* bagi DAS Kabupaten Magelang. Mata air yang bermunculan di kaki gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing tersebut merupakan *discharge area*. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa *recharge area* dan *discharge area* di Kabupaten Magelang berada dalam satu wilayah administrasi. Hal tersebut akan mempermudah pengelolaan lingkungan utamanya dalam pengelolaan sumberdaya air sehingga akan terwujud tata kelola lingkungan yang lebih baik.

2.1.1.6. Klimatologi

Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62^o C, dengan kelembaban udara 82%. Sedangkan curah hujan rata-rata 2.589 mm/tahun, dengan rata-rata hari hujan 121 hari. Sedangkan kecepatan angin 1,8 knot.

Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang juga mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang tahun 2014, rata-rata curah hujan pada tahun 2012 berkisar antara 3-394 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi.

Iklm di Kabupaten Magelang terbagi menjadi beberapa tipe iklim sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Tipe Iklim di Kabupaten Magelang

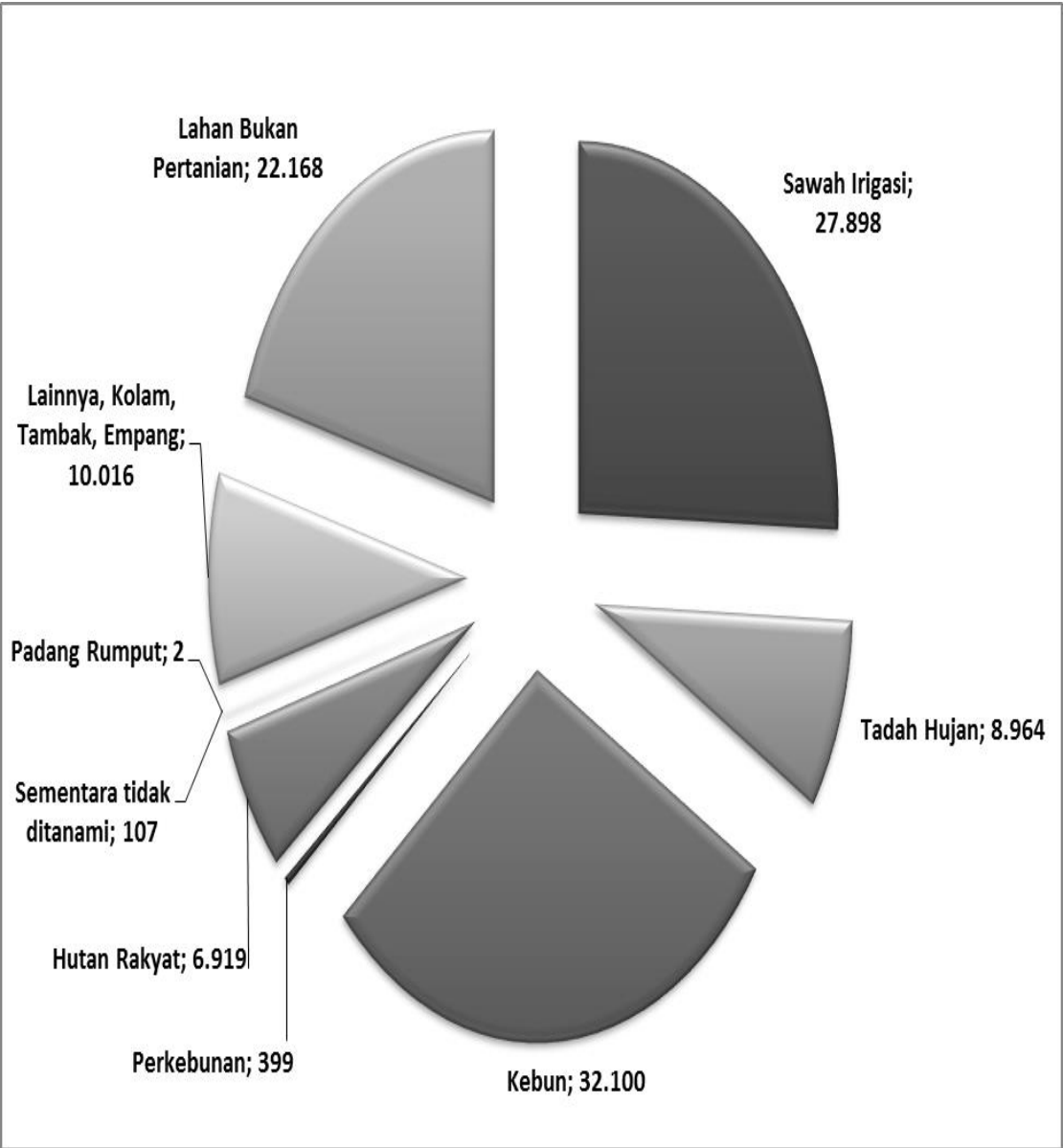
Kecamatan	Ketinggian (dpl)	Sc. Ferguson	Mohr	Oldeman
Bandongan	431	B	I	C2
Borobudur	325	C	III	C3
Candimulyo	437	B	I	B2
Dukun	578	C	I	B3
Grabag	682	B	I	B2
Kajoran	578	B	I	B1
Kaliangkrik	823	B	I	B2
Mertoyudan	343	B	I	B2
Mungkid	325	B	II	C3
Muntilan	358	C	I	C3
Ngablak	1.362	C	I	C2
Ngluwar	202	-	-	-
Pakis	841	C	I	B3
Salam	336	B	I	B3
Salaman	208	B	I	B2
Sawangan	575	B	I	C3
Secang	407	B	II	C2
Srumbung	501	B	I	B1
Tegalrejo	478	B	I	B2
Tempuran	310	B	I	B2
Windusari	534	B	I	C2

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2017

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data BPS tahun 2016, alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang mencakup Lahan Pertanian seluas 86,405 ha dan Lahan Bukan Pertanian seluas 22.168 ha. Lahan Pertanian terdiri dari lahan sawah (*wetland*) seluas 36.862 ha dan lahan kering seluas 49.543 ha. Adapun peruntukan lahan sawah diantaranya adalah sawah irigasi seluas 27,898 ha dan tadah hujan (*reservation*) seluas 8,964 ha.

Sedangkan peruntukan lahan kering adalah tegal kebun seluas 32,100 ha, perkebunan seluas 399 ha, ditanami pohon/hutan rakyat seluas 6,919 ha, padang penggembalaan seluas 2 ha, sementara tidak ditanami/diusahakan seluas 107 ha, dan lainnya (kolam/empang/hutan negara, dan lain-lain) seluas 10,016 ha. Komposisi penggunaan lahan pada Tahun 2016 disajikan dalam Gambar 2.5.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2017

Gambar 2.5.
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Magelang

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah lahan pertanian (79,58 persen). Oleh karena itu sektor pertanian dijadikan unggulan, karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan.

Berdasarkan profil penggunaan lahan tersebut maka lahan sawah merupakan sumber daya lahan paling besar (33,95 persen) di Kabupaten Magelang yang berarti menandakan bahwa kegiatan pertanian yang dominan berkembang adalah kegiatan usaha tani padi.

Perkembangan penggunaan lahan selama kurun waktu 2012-2015 selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.7. sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang
Tahun 2012-2015

Penggunaan Lahan	Luas (ha)			
	2012	2013	2014	2015
1. Lahan Pertanian	78.748	86.410	86.405	86.405
A. Lahan Sawah	36.974	36.892	36.882	36.862
01. Irigasi	29.254	28.801	28.028	27.898
02. Tadah Hujan	7.720	8.091	8.854	8.964

Penggunaan Lahan	Luas (ha)			
	2012	2013	2014	2015
B. Lahan Kering	41.923	49.518	49.523	49.543
01. Kebun	35.493	32.679	32.437	32.100
02. Perkebunan	296	394	399	399
03. Hutan Rakyat	3.665	6.312	6.562	6.919
04. Padang Rumput	2	2	2	2
05. Sementara tidak ditanami	107	107	107	107
06. Lainnya, Kolam, Tambak, Empang	2.360	10.024	10.016	10.016
2. Lahan Bukan Pertanian	29.676	22.163	22.168	22.168
Jalan, Pemukiman, Kantor, dll	29.676	22.163	22.168	22.168
Jumlah	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2017

2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 menetapkan bahwa rencana struktur Ruang di Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi sistem perkotaan, sistem perdesaan, dan sistem jaringan infrastruktur wilayah.

Sistem perwilayahan Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 8 sistem perwilayahan, dimana Kabupaten Magelang masuk dalam sistem perwilayah Purwomanggung yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung. Di dalam sistem perwilayahan ini, Kota Magelang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi perkotaan yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota disekitarnya. Sedangkan Kabupaten Magelang ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala Kabupaten.

Sistem perkotaan di Kabupaten Magelang dibagi menjadi 4 (empat) kawasan perkotaan, yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), dan pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan potensinya. Terdapat 5 (lima) kawasan di Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, dan Secang.

Selain itu, Kabupaten Magelang juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Borobudur dan Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) terkait Kabupaten Magelang adalah:

- Kawasan Solo-Selo-Borobudur yang merupakan kawasan KSP dari sudut kepentingan ekonomi.
- Kawasan Candi Borobudur merupakan KSP dari sudut kepentingan sosial budaya.
- Kawasan Taman Nasional Merapi dan Kawasan Taman Nasional Merbabu sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Magelang dibagi dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu:

2.1.1.8.1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan seperti tanah, air, iklim,

tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung tersebut terdiri dari:

1. Kawasan hutan lindung terdapat pada sebagian Kecamatan: Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak, Pakis, Dukun, Srumbung dan Sawangan dengan luas 1,474,70 ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air, berada di sebagian wilayah, Sawangan, Kaliangkrik, Windusari, Grabag, Ngablak, Pakis, Dukun, dan Srumbung.
3. Kawasan perlindungan setempat, meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.

Kawasan sekitar mata air merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, terdapat 219 mata air yang perlu dilindungi.

Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan di sekitar sungai berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Berdasarkan identifikasi, kawasan perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Magelang meliputi sungai-sungai pada Tabel 2.8. berikut :

Tabel 2.8.
Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai di Kabupaten Magelang

No	Nama Sungai	Keterangan
1	Sempadan sungai besar: Sungai Progo	Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.
2	Sempadan sungai kecil: a. Sungai Krasak, b. Sungai Putih c. Sungai Nongko d. Sungai Blongkeng, e. Sungai Pabelan, f. Sungai Tangsi g. Sungai Kluban h. Sungai Elo	Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.
3	Sempadan sungai di kawasan perkotaan	Daerah perlindungan ditentukan menyesuaikan dengan kondisi di sekitar sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2017

4. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya. Kawasan pelestarian alam dan cagar Budaya di Kabupaten Magelang, meliputi:
 - Kawasan Taman Nasional.

Kawasan taman nasional di Kabupaten Magelang adalah Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berada dalam wilayah Kabupaten Magelang meliputi Kecamatan Srumbung (yang meliputi Desa Ngargosoko, Kemiren, Kaliurang dan Ngablak) dan Kecamatan Dukun (yang meliputi Desa Ngargomulyo, Krinjing, Paten dan Keningar). Sedangkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu yang ada di Kabupaten Magelang mencakup 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ngablak (meliputi Desa Tejosari, Desa Genikan, Desa Jogonayan), Kecamatan Pakis (meliputi Desa Petung, Desa Daleman Kidul, Desa Pogalan, Desa Ketundan, Desa Kenalan, Desa Kragilan, Desa Banyusidi, Desa Pakis, Desa Kaponan, Desa Gondangsari, Desa Munengwarangan, Desa Muneng, Desa Jambewangi), Kecamatan Sawangan (meliputi Desa Wulunggunung, Desa Wonolelo, Desa Banyuroto) dan Kecamatan Candimulyo (yang meliputi Desa Surodadi). Pengaturan pemanfaatan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dipertegas dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Nasional Gunung Merapi.

- Kawasan Cagar Budaya.
Kawasan dan situs cagar budaya yang harus dilindungi di Kabupaten Magelang antara lain sebagaimana pada Tabel 2.9. berikut

Tabel 2.9.
Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Magelang

No	Obyek Wisata	Lokasi
1	Candi Borobudur	Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur
2	Candi Pawon	Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur
3	Candi Mendut	Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid
4	Candi Ngawen	Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan
5	Candi Gunung Wukir/Canggal	Desa Somokaton, Kecamatan Salam
6	Candi Gunung Sari	Dsn Gunungsari Ds.Gulon Kecamatan Salam
7	Candi Losari	Dsn Losari Ds.Kadiluwih Kecamatan Salam
8	Makam Gunung Pring*	Bukit Gunung Pring, Kecamatan Muntilan
9	Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogorejo*	Bukit Gunung Pring, Kecamatan Muntilan
10	Makam Pasteur Van Lith*	Kecamatan Muntilan
11	Candi Asu	Desa Sengi, Kecamatan Dukun
12	Candi Pendem	Desa Sengi, Kecamatan Dukun
13	Candi Lumbung	Desa Sengi, Kecamatan Dukun
14	Makam Ky. Condrobumi	Kecamatan Candimulyo
15	Makam Sunan Geseng	Desa Tirto, Kecamatan Grabag
16	Air Terjun Seloprojo**	Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak
17	Pemandian Kalibening**	Kecamatan Secang
18	Candi Selogriyo	Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari
19	Candi Batur	Dsn Ngobaran Ds.Candisari Kecamatan Windusari
20	Candi Retno	Dsn Cetokan 2 Ds.Candiretno Kecamatan Secang
21	Candi Umbul	Ds. Kartoharjo Kecamatan Grabag
22	Prasati Tukmas	Dsn Dakawu Ds.Lebak Kecamatan Garabag
23	Masjid Baitul Mutaqin	Dsn Sengon Ds. Trasan Kecamatan Bandongan

No	Obyek Wisata	Lokasi
24	Langgar Agung Pangeran Diponegoro	Desa Menoreh, Kecamatan Salaman
25	Pesarean Pangeran Singosari (Gunung Sari Salam)*	Desa Gulon, Kecamatan Salam
26	Makam Kyai Mijil*	Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur
27	Makam Kyai Raden Syahid*	Desa Salam, Kecamatan Salam
28	Klenteng “Hok An Kiong”	Jl.Pemuda Muntilan Kecamatan Muntilan
29	Gereja Santo Antonius	Jl.Kartini Muntilan Kecamatan Muntilan
30	SMP Negeri I Muntilan	Jl.Pemuda No 161 Muntilan Kecamatan Muntilan
31	Seminari Mertoyudan	Jl.Mayjend Bambang Soegeng Ds.Mertoyudan Kecamatan Mrtoyudan
32	Stasiun Kereta Api Mertoyudan	Jl.Raya Mertoyudan Magelang Muntilan
34	Kantor Badan Lingkungan Hidup	Jl.Kawedanan No.1 Muntilan
35	Bunderan Petrus Kanisius dan SD Pangudi Luhur	Jl. Kartini No.2 Muntilan
36	Gedung SLTP Marsudi Rini Marganingsih	Jl. Kartini No.18 Muntilan
37	Gedung Balai Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar	Jl. Kerkhoff No.1 Muntilan
38	Rumah Tradisional Jawa	Jl. Raya Borobudur-Palbapang (sebelah utara Candi Mendut)
39	Kompleks Makam Kerkoff	Dsn Bojong Ds. Mendut Kecamatan Mungkid

* benda purbakala/ benda yang diduga cagar budaya

** bukan cagar budaya, namun merupakan DTW buatan/ alam

Sumber: Disarpورا Kabupaten Magelang, 2017

5. Kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Magelang antara lain: Kawasan Rawan Letusan Gunung Merapi (Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Sawangan), Kawasan Rawan Gempa Bumi, terutama gempa vulkanik (Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Ngluwar), dan Kawasan Rawan Gerakan Tanah. Kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada Tabel 2.10. berikut:

Tabel 2.10.

Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Magelang

Gerakan Tanah	Lokasi
Rawan gerakan tanah tinggi	Kecamatan Borobudur, Kajoran bagian utara, Kalingkrik, Pakis, Windusari bagian tengah, Salaman, Tempuran, Secang bagian utara, Tegalrejo dan Candimulyo, Ngablak bagian utara.
Rawan gerakan tanah menengah	Kecamatan Borobudur dengan kemiringan $\geq 10^0 - 20^0$, Kajoran bagian timur, Kaliangkrik lereng bagian atas Gunung Sumbing, Windusari bagian utara, Salaman bagian timur, Tempuran bagian selatan, sebagian Tegalrejo, Candimulyo.

Gerakan Tanah	Lokasi
Rawan gerakan tanah rendah	Kecamatan Salam, Ngluwar, Muntilan, Srumbung bagian timur, Salaman bagian timur, Ngablak bagian timur dan Borobudur bagian utara dan timur.
Rawan gerakan tanah sangat rendah	Kecamatan Mertoyudan
Sangat rendah	Kecamatan Secang bagian barat, Mungkid, Mertoyudan

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2017

6. Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi: Lereng Gunung Merbabu, Lereng Gunung Merapi, dan Kecamatan Borobudur.

2.1.1.8.2. Kawasan Budidaya

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Magelang dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap memiliki luas kurang lebih 1.764 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, dan Tempuran.
 - b. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas memiliki luas kurang lebih 2.038 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, dan Kajoran.
- 2) Kawasan hutan rakyat mencapai luas ± 6.562 ha yang tersebar di Kecamatan Borobudur, Ngluwar, Sawangan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Salaman dan Ngablak.
- 3) Kawasan peruntukan pertanian yang meliputi Kawasan peruntukan pertanian lahan basah (36.882 ha) dan Kawasan pertanian lahan kering (49.523 ha) yang lokasi tersebar di kecamatan-kecamatan. Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Magelang ditetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 42.070 ha yang terdiri dari lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering.
- 4) Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Bandongan, Tempuran, Salaman, Borobudur, Srumbung, Dukun, Sawangan, Candimulyo, Tegalrejo, Pakis, Ngablak dengan luas ± 32.437 ha.
- 5) Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Magelang direncanakan seluas ± 10.016 ha dengan pengembangan dipusatkan di Kecamatan Muntilan, Mungkid dan Sawangan sebagai sentra pembenihan dengan daerah penyangga perikanan di Kecamatan Dukun, Salam, Ngluwar, Mertoyudan dan Salaman sebagai sentra pembesaran.
- 6) Kawasan peruntukan peternakan diarahkan perkembangannya pada kawasan yang mempunyai potensi alam, lahan hijau makanan ternak cukup luas, yang artinya ketersediaan pakan hijau untuk ternak cukup banyak dan mudah didapatkan di wilayah tersebut, dan pada dataran tinggi dengan curah hujan tinggi serta pada lokasi-lokasi yang mana memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk bekerja di sektor peternakan.
- 7) Kawasan peruntukan pertambangan batuan di Kabupaten Magelang lokasinya tersebar di Kecamatan Borobudur, Salaman, Dukun, Srumbung, Salam, Tempuran, Windusari, Secang, Grabag, dan Mungkid.

- 8) Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Magelang, meliputi kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata alam, dan kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- 9) Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Magelang yang merupakan Kawasan peruntukan industri besar dan sedang ditetapkan di Kecamatan Tempuran dengan luas 1.600 ha.
- 10) Kawasan peruntukan permukiman dikembangkan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan menepis kecenderungan pemanfaatan lahan yang hanya memusat pada kantong-kantong permukiman yang telah ada.
- 11) Kawasan peruntukan lainnya meliputi :
 - 1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Magelang dipergunakan untuk daerah latihan Akmil Magelang, Armed II, Rindam IV dan Secaba Rindam IV/Diponegoro.
 - 2) Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan
Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang ditanam.

2.1.1.8.3. Kawasan Strategis

Selain berdasarkan potensi sebagaimana terpapar dalam struktur ruang sebagaimana tersebut di atas, di dalam RTRW Kabupaten Magelang juga telah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Strategis Kabupaten Magelang meliputi 3 (tiga) sudut pandang yaitu dari sisi ekonomi, sosial budaya dan dari sisi daya dukung lingkungan hidup.

Dari sudut pandang ekonomi, yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah kawasan pada koridor jalan arteri nasional meliputi Perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya dan Perkotaan Salam dan sekitarnya.

Untuk mewujudkannya, perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang yang diikuti dengan pelaksanaan tahapan indikasi program prioritas pada kawasan strategis Kabupaten tersebut. Sampai dengan saat ini telah disusun Rencana Detail Tata Ruang pada KSK tersebut.

Adapun program yang telah dicapai dengan membuka akses pengembangan usaha ekonomi pada kawasan-kawasan tersebut dan pengembangan kawasan perumahan permukiman pada kawasan-kawasan tersebut, namun tetap diikuti dengan pengendalian tata ruang.

Selain kawasan pada koridor jalan arteri nasional, juga ditetapkan sebagai KSK adalah kawasan agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Borobudur, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, dan Agropolitan Sumbing. Untuk mendukung perwujudan agropolitan, telah disusun Masterplan Agropolitan sebagai dokumen acuan dan atau *road map* dalam penganggaran dan pelaksanaan program.

Selanjutnya Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang sosial budaya. Kawasan strategis sosial dan budaya di Kabupaten Magelang adalah Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Untuk mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Magelang berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat karena juga sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya

yang diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat terangkakan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Borobudur dan sekitarnya.

Sedangkan untuk Kawasan Strategis Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup, ditetapkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan Kawasan DAS Mikro pada sub DAS Progo Hulu. Untuk menjaga kelestariannya Pemerintah Kabupaten Magelang mengendalikan secara ketat terhadap penutupan lahan pada kawasan atau area yang ditetapkan sebagai daerah tangkapan dan resapan air.

2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana

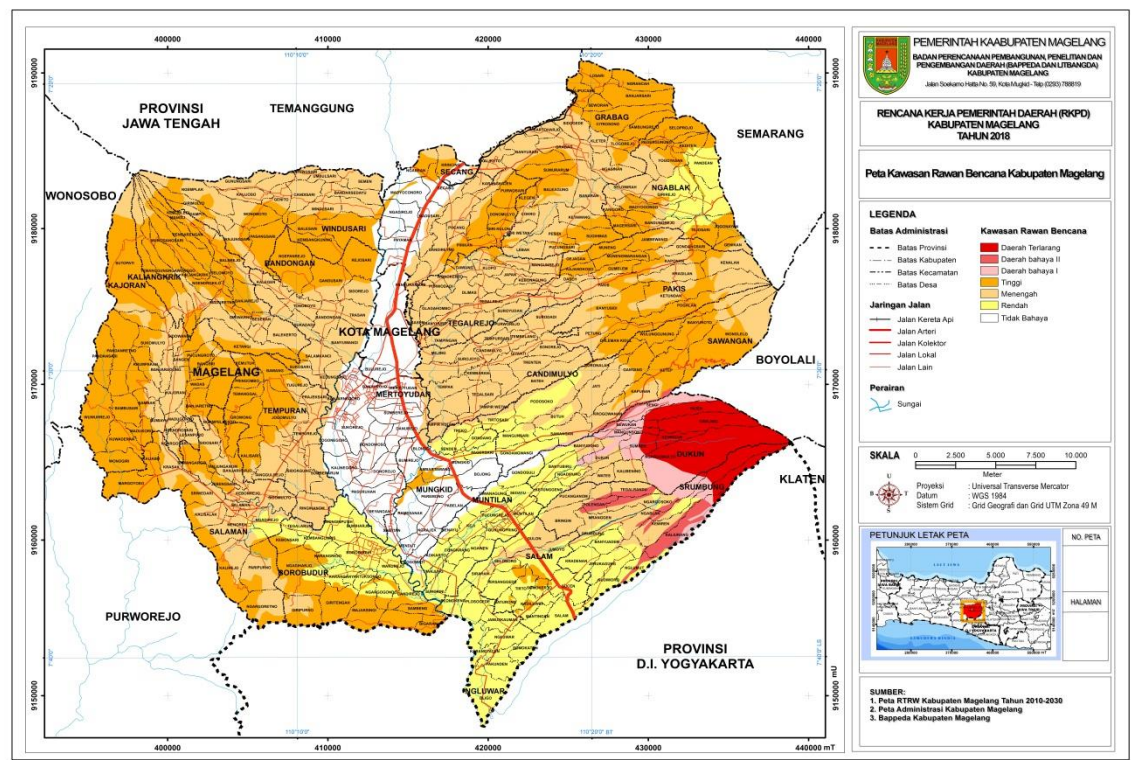
Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana alam khususnya bencana gunung berapi dan gerakan tanah. Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Magelang merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah dan keberadaan gunung Merapi. Ancaman bencana oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang adalah:

- a. Tanah longsor di 17 kecamatan.
- b. Banjir di aliran sungai terutama Sungai Progo dan Sungai Elo.
- c. Banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
- d. Angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 13 kecamatan.
- e. Kekeringan/krisis air bersih di 10 kecamatan (kemarau panjang) sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan (6 desa), yaitu Kecamatan Kajoran (Kwaderan, Wonogiri), Kecamatan Salaman (Margoyoso dan Sriwedari), Kecamatan Borobudur (Kenalan dan Sambeng).
- f. Kebakaran hutan.
- g. Letusan Gunung Merapi, 3 (tiga) kecamatan berada di KRB III.

Posisi Kabupaten Magelang yang dikelilingi oleh beberapa gunung api dan salah satunya masih aktif memberikan konsekuensi munculnya bencana alam seperti letusan gunung berapi yaitu Gunung Merapi. Sebagian wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah KRB I, KRB II, dan KRB III, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) KRB III, 3 kecamatan, 19 desa:
 - a. Kecamatan Srumbung di 8 desa (Kaliurang, Kemiren, Tegalrandu, Mranggen, Srumbung, Kamongan, Nglumut, Ngablak, Ngargosoko);
 - b. Kecamatan Dukun di 8 desa (Kalibening, Keningar, Sumber, Krinjing, Sengi, Mangunsuko, Sewukan, Ngargomulyo, Paten);
 - c. Kecamatan Sawangan di 3 desa (Wonolelo, Ketep, Kapuhan).
- 2) KRB II, 3 kecamatan, 21 desa:
 - a. Kecamatan Srumbung (Bringin, Kamongan, Kradenan, Banyuadem, Pucanganom, Pandanretno, Jerukagung, Sudimoro, Polengan);
 - b. Kecamatan Dukun (Wates, Banyudono, Banyubiru, Dukun, Ngadipuro, Mangunsuko);
 - c. Kecamatan Sawangan (Krogowanan, Sawangan, Gondowangi).
- 3) KRB I, 5 kecamatan, 24 desa:
 - a. Kecamatan Dukun (Ketunggeng);
 - b. Kecamatan Ngluwar di 5 desa (Blongkeng, Pakunden, Bligo, Somokaton, Ngluwar);
 - c. Kecamatan Mungkid di 4 desa (Pabelan, Progowati, Ngrajek, Bojong);
 - d. Kecamatan Salam di 8 desa (Salam, Mantingan, Sucen, Kadiluwih, Gulon, Jumoyo, Seloboro, Sirahan);
 - e. Kecamatan Muntilan di 7 desa (Muntilan, Ngawen, Gunungpring, Tamanagung, Gondosuli, Adikarto, Keji).

Adapun peta kawasan rawan bencana di Kabupaten Magelang disajikan dalam gambar 2.6. di bawah ini.



Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2017

Gambar 2.6.
Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang

Sedangkan data kejadian bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Data Kejadian Bencana, 2013-2017

No	Kejadian/ Jenis Bencana	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angin Puting Beliung	35	28	70	40	33
2	Banjir	3	6	10	13	7
3	Gempa bumi	0	7	0	0	1
4	Kebakaran	37	51	90	37	23
5	Kekeringan	5	0	6	0	3
6	Tanah Longsor	47	61	162	105	231
7	Bencana Lainnya/KLB	7	10	16	9	15
8	Erupsi	0	0	0	0	0
Jumlah		135	134	164	204	352

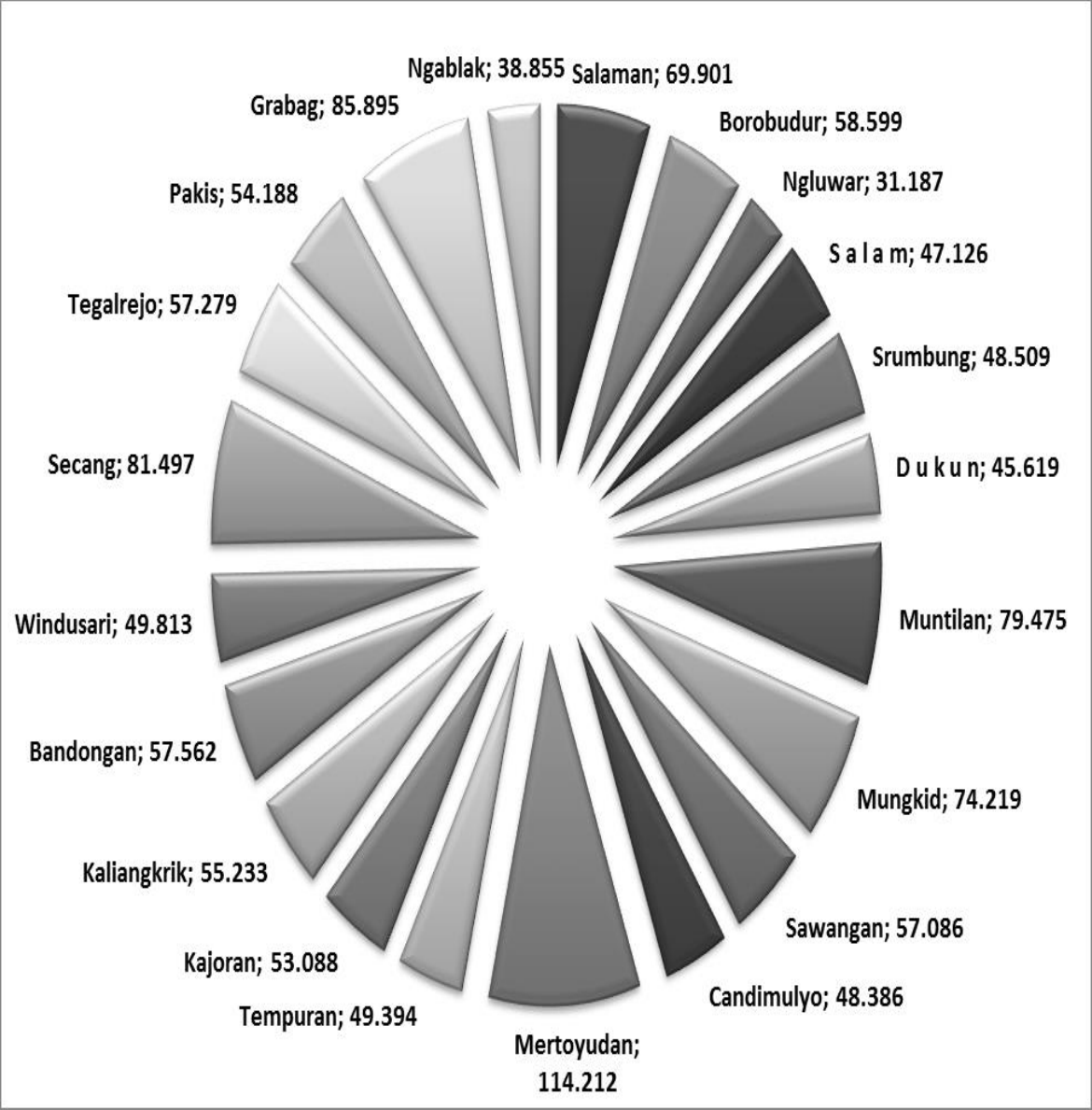
Sumber : BPBD Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan Tabel 2.11, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah bencana di Kabupaten Magelang meningkat sebanyak 148 kejadian, atau sebesar 72,55% dibandingkan dengan tahun 2016. Namun upaya penanggulangan bencana tetap harus diupayakan sehingga mampu meminimalisir jatuhnya korban jiwa.

2.1.2. ASPEK DEMOGRAFI

Penduduk Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 diperkirakan mencapai 1.268.396, bertambah 11.273 jiwa atau 0,90% dari tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.257.123. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2015 berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 1.245.496 jiwa.

Dilihat dari sisi persebaran per kecamatan, pada Tahun 2016, terlihat bahwa penduduk tersebar hampir merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mertoyudan yaitu sebesar 114.212 (9 persen). Hal ini disebabkan di Kecamatan Mertoyudan banyak terdapat kegiatan ekonomi yang menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di wilayah ini, sementara kecamatan yang jumlah penduduknya terkecil berada di Kecamatan Ngluwar (2 persen), hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Ngluwar merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil di kabupaten Magelang yaitu sebesar 22,44 km². Data sebaran penduduk selengkapnya disajikan dalam gambar 2.7.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.7.
Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017

Perkembangan jumlah penduduk dan sebaran per kecamatan Tahun 2013-2016, selengkapnya tersaji pada table berikut:

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017 (jiwa)

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Salaman	68.016	68.656	69.283	69.901	70.497
2.	Borobudur	57.193	57.672	58.140	58.599	59.039
3.	Ngluwar	30.590	30.795	30.995	31.187	31.371
4.	S a l a m	45.896	46.314	46.723	47.126	47.513
5.	Srumbung	46.747	47.340	47.926	48.509	49.080

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
6.	D u k u n	44.359	44.787	45.205	45.619	46.018
7.	Muntilan	77.306	78.043	78.763	79.475	80.161
8.	Mungkid	71.574	72.464	73.344	74.219	75.076
9.	Sawangan	55.458	56.010	56.551	57.086	57.602
10.	Candimulyo	46.963	47.445	47.919	48.386	48.840
11.	Mertoyudan	109.753	111.248	112.746	114.212	115.670
12.	Tempuran	48.003	48.475	48.938	49.394	49.834
13.	Kajoran	52.403	52.644	52.871	53.088	53.285
14.	Kaliangkrik	53.875	54.339	54.790	55.233	55.658
15.	Bandongan	56.156	56.636	57.103	57.562	58.002
16.	Windusari	48.144	48.707	49.262	49.813	50.351
17.	Secang	78.230	79.325	80.413	81.497	82.565
18.	Tegalrejo	55.332	55.989	56.636	57.279	57.907
19.	Pakis	53.330	53.628	53.913	54.188	54.443
20.	Grabag	83.878	84.567	85.237	85.895	86.526
21.	Ngablak	38.475	38.611	38.738	38.855	38.958
Jumlah		1.221.681	1.233.695	1.245.496	1.257.123	1.268.396

Sumber : BPS Kabupaten Magelang. 2018

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa persentase laju pertumbuhan penduduk antara Tahun 2014 sampai dengan 2015 adalah 0,96 persen dan antara tahun 2015 sampai dengan 2016 adalah 0,93 persen, serta 2016 sampai dengan 2017 adalah 0,90 persen. Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Magelang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017 (jiwa)

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Salaman	68.87	988	997	1.006	1.015	1.024
2	Borobudur	54.55	1.048	1.057	1.066	1.074	1.082
3	Ngluwar	22.44	1.363	1.372	1.381	1.390	1.398
4	Salam	31.63	1.451	1.464	1.477	1.490	1.502
5	Srumbung	53.18	879	890	901	912	923
6	Dukun	53.4	831	839	847	854	862
7	Muntilan	28.61	2.702	2.728	2.753	2.778	2.802
8	Mungkid	37.4	1.914	1.938	1.961	1.984	2.007
9	Sawangan	72.37	766	774	781	789	796
10	Candimulyo	46.95	1.000	1.011	1.021	1.031	1.040
11	Mertoyudan	45.35	2.420	2.453	2.486	2.518	2.551
12	Tempuran	49.04	979	988	998	1.007	1.016
13	Kajoran	83.41	628	631	634	636	639
14	Kaliangkrik	57.34	940	948	956	963	971
15	Bandongan	45.79	1.226	1.237	1.247	1.257	1.267
16	Windusari	61.65	781	790	799	808	817
17	Secang	47.34	1.653	1.676	1.699	1.722	1.744
18	Tegalrejo	35.89	1.542	1.560	1.578	1.596	1.613
19	Pakis	69.56	767	771	775	779	783
20	Grabag	77.16	1.087	1.096	1.105	1.113	1.121
21	Ngablak	43.8	878	882	884	887	889
Kabupaten		1.091	1.114	1.125	1.136	1.158	1.163

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) di Kabupaten Magelang pada Tahun 2016 sebesar 100,72. Artinya, pada setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Magelang terdapat 100,72 penduduk laki-laki.

Sementara itu, terdapat 11 (sebelas) kecamatan dengan *Sex Ratio* lebih dari 100. ini menunjukkan 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Magelang yang jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak dari pada perempuan. Kecamatan Tegalrejo merupakan kecamatan yang memiliki *sex ratio* terbesar (108,67) yang artinya jumlah penduduk laki-laki adalah 8,67 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan *sex ratio* terkecil terdapat di Kecamatan Ngluwar yaitu 97,31 yang berarti pada setiap 100 perempuan hanya ada 97,31 penduduk laki-laki.

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Muntilan, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kajoran. Hal ini terjadi karena penduduk di Kabupaten Magelang cenderung terkonsentrasi di kawasan strategis cepat tumbuh. Kawasan tersebut adalah Kecamatan Mertoyudan, Muntilan dan Secang. Kepadatan penduduk menurut kecamatan selengkapnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14.
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2016

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Salaman	68.87	988	997	1.006	1.015	1.024
2	Borobudur	54.55	1.048	1.057	1.066	1.074	1.082
3	Ngluwar	22.44	1.363	1.372	1.381	1.390	1.398
4	Salam	31.63	1.451	1.464	1.477	1.490	1.502
5	Srumbung	53.18	879	890	901	912	923
6	Dukun	53.4	831	839	847	854	862
7	Muntilan	28.61	2.702	2.728	2.753	2.778	2.802
8	Mungkid	37.4	1.914	1.938	1.961	1.984	2.007
9	Sawangan	72.37	766	774	781	789	796
10	Candimulyo	46.95	1.000	1.011	1.021	1.031	1.040
11	Mertoyudan	45.35	2.420	2.453	2.486	2.518	2.551
12	Tempuran	49.04	979	988	998	1.007	1.016
13	Kajoran	83.41	628	631	634	636	639
14	Kaliangkrik	57.34	940	948	956	963	971
15	Bandongan	45.79	1.226	1.237	1.247	1.257	1.267
16	Windusari	61.65	781	790	799	808	817
17	Secang	47.34	1.653	1.676	1.699	1.722	1.744
18	Tegalrejo	35.89	1.542	1.560	1.578	1.596	1.613
19	Pakis	69.56	767	771	775	779	783
20	Grabag	77.16	1.087	1.096	1.105	1.113	1.121
21	Ngablak	43.8	878	882	884	887	889
Kabupaten		1.091	1.114	1.125	1.136	1.158	1.163

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan per Kecamatan di Kabupaten Magelang pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.15.
Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Magelang Tahun 2016

No	Kecamatan	Usia Produktif (15-64 Thn)	Usia Tidak Produktif (0-14 Th & >65 Th)	Jumlah	<i>Dependency Ratio</i>
1	Salaman	45.859	23.424	69.283	51,08
2	Borobudur	38.836	19.304	58.140	49,71
3	Ngluwar	20.409	10.586	30.995	51,87
4	Salam	31.044	15.679	46.723	50,51
5	Srumbung	31.895	16.031	47.926	50,26
6	Dukun	30.555	14.650	45.205	47,95
7	Muntilan	53.300	25.463	78.763	47,77
8	Mungkid	49.337	24.007	73.344	48,66
9	Sawangan	37.656	18.895	56.551	50,18
10	Candimulyo	31.375	16.544	47.919	52,73
11	Mertoyudan	77.873	34.859	112.732	44,76
12	Tempuran	32.837	16.101	48.938	49,03
13	Kajoran	34.632	18.239	52.871	52,67
14	Kaliangkrik	35.909	18.881	54.790	52,58
15	Bandongan	38.418	18.685	57.103	48,64
16	Windusari	32.238	17.024	49.262	52,81
17	Secang	53.892	26.521	80.413	49,21
18	Tegalrejo	39.030	17.606	56.636	45,11
19	Pakis	36.893	17.020	53.913	46,13
20	Grabag	56.537	28.700	85.237	50,76
21	Ngablak	27.254	11.484	38.738	42,14

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Pada Tahun 2016, Kabupaten Magelang penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 67%. Adapun penduduk usia non produktif Kabupaten Magelang adalah sebesar 33% dari total penduduk. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Komposisi jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.16. dibawah ini :

Tabel 2.16.
Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Umur
Tahun 2012-2016 (jiwa)

Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016
0 - 14	261.090	220.129	272.003	303.099	301.021
15 - 64	948.751	928.551	886.499	836.057	845.008
65+	108.697	111.824	103.998	106.340	110.194

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.

2.1.3.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Magelang selama periode Tahun 2011-2016 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut:

2.1.3.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat kemajuan ekonomi pada suatu wilayah. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, semakin baik perekonomian.

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,02 persen, Jawa tengah 5,28 persen, dan kabupaten Magelang 5,40 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Magelang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.17 di bawah.

Tabel 2.17.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang.
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 (%)

Tahun	Kabupaten Magelang	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2012	4,88	5,34	6,03
2013	5,91	5,11	5,56
2014	5,38	5,27	5,01
2015	5,03	5,47	4,88
2016	5,43	5,28	5,02

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Khusus pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang lebih rendah dibanding pertumbuhan provinsi, tetapi lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional.

Secara sektoral pada tahun 2016 yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Jasa Perusahaan (10,18 persen), sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (10,07 persen), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (9,78 persen).

Sementara sektor yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (2,17 persen), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib (2,22 persen), dan sektor Pertambangan dan Penggalan (2,94 persen).

Dari data historis tampak sektor pertanian sebagai sektor dominan tumbuhnya tergolong paling lambat. Sementara itu dua sektor unggulan yang lain, industri dan perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan sebagai pendukungnya, secara konsisten meningkat. Data perkembangan ekonomi sektoral Tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang
Menurut Sektor Tahun 2012-2016 (%)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1.46	1.89	1.75	3.26	3.33
B. Pertambangan dan Penggalan	7.39	5.90	4.52	1.71	2.94
C. Industri Pengolahan	8.57	10.93	7.44	5.13	5.82
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11.14	7.65	3.32	1.50	7.46
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.27	-0.29	1.81	1.33	2.17
F. Konstruksi	9.37	5.42	5.08	5.93	6.32

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.81	4.13	3.52	3.99	5.28
H. Transportasi dan Pergudangan	8.42	8.56	8.55	8.54	6.61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.63	5.40	7.50	6.60	6.02
J. Informasi dan Komunikasi	10.56	7.95	13.04	9.45	8.09
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.10	4.39	5.23	8.44	10.07
L. Real Estate	4.01	7.70	7.18	7.35	6.56
M,N. Jasa Perusahaan	7.03	12.06	8.36	9.74	10.18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	0.77	2.73	1.67	4.24	2.22
P. Jasa Pendidikan	17.82	9.41	10.17	7.10	6.45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.46	7.10	11.78	6.92	9.78
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.33	9.22	8.51	3.29	8.64
PDRB	4.88	5.91	5.38	5.03	5.40

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016 Rp26.223.219,71. Data historis nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 2.19.

Tabel 2.19.
 PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku
 Tahun 2012-2016 (Juta Rp)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.277.173,90	4.698.034,20	5.180.515,64	5.646.623,82	5.974.390,51
B. Pertambangan dan Penggalian	691.971,35	758.100,91	925.847,17	1.072.439,49	1.140.800,44
C. Industri Pengolahan	3.679.575,76	4.163.188,04	4.739.299,59	5.259.653,79	5.830.568,86
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.115,87	10.330,32	10.703,35	11.432,66	13.264,19
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.301,50	18.843,43	19.526,54	20.486,41	21.341,02
F. Konstruksi	1.649.342,43	1.804.903,01	2.032.068,15	2.240.638,65	2.421.236,83
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.583.636,29	2.792.601,00	2.980.680,48	3.230.590,75	3.516.599,14
H. Transportasi dan Pergudangan	569.447,02	627.823,74	729.826,69	820.655,80	879.968,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	699.813,16	776.872,17	882.266,29	980.915,89	1.096.806,75

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
J. Informasi dan Komunikasi	604.945,62	638.366,22	704.277,86	756.340,66	818.842,53
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	469.552,36	513.792,97	563.838,59	641.887,13	727.606,30
L. Real Estate	327.100,40	356.116,47	401.248,55	445.879,48	482.444,80
M,N. Jasa Perusahaan	36.373,98	42.711,47	47.920,53	55.349,06	63.089,61
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	701.962,43	755.467,87	805.661,91	882.405,73	949.578,24
P. Jasa Pendidikan	936.246,14	1.108.648,02	1.276.872,56	1.393.111,48	1.529.252,97
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128.486,55	144.740,99	168.511,59	188.190,15	208.452,06
R,S,T,U. Jasa Lainnya	347.447,37	392.304,03	454.345,82	485.043,21	548.977,07
PDRB	17.731.492,11	19.602.844,86	21.923.411,31	24.131.644,16	26.223.219,71

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018.

Sementara itu nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan (ADHB) Tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp19.855.844,24. Data historis nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan (ADHB) Tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Tahun 2012-2016 (Juta Rp)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.827.627,05	3.900.103,18	3.968.480,17	4.097.841,45	4.234.440,24
B. Pertambangan dan Penggalian	667.027,11	706.372,16	738.285,98	750.942,72	772.990,26
C. Industri Pengolahan	3.190.670,17	3.539.293,89	3.802.680,12	3.997.570,79	4.230.032,32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.132,17	10.907,25	11.269,25	11.438,62	12.292,36
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.133,32	18.080,11	18.407,38	18.651,51	19.056,79
F. Konstruksi	1.526.541,01	1.609.322,00	1.691.117,51	1.791.405,65	1.904.580,97
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.400.862,00	2.500.051,09	2.588.142,41	2.691.442,36	2.833.603,46
H. Transportasi dan Pergudangan	570.460,06	619.318,41	672.277,24	729.691,57	777.889,43
I. Penyediaan Akomodasi dan	643.002,72	677.721,12	728.538,27	776.587,13	823.333,08

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Makan Minum					
J. Informasi dan Komunikasi	618.502,09	667.692,39	754.787,91	826.095,58	892.926,63
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	416.810,09	435.101,35	457.847,63	496.491,50	546.479,99
L. Real Estate	322.168,18	346.973,80	371.873,60	399.215,80	425.386,83
M,N. Jasa Perusahaan	34.207,81	38.334,21	41.537,31	45.582,63	50.224,81
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	627.980,45	645.103,58	655.887,62	683.671,71	698.849,22
P. Jasa Pendidikan	748.437,47	818.857,86	902.153,17	966.239,66	1.028.593,43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113.768,65	121.845,05	136.202,00	145.633,89	159.884,06
R,S,T,U. Jasa Lainnya	334.812,21	365.678,16	396.800,80	409.849,41	445.280,35
PDRB	16.071.142,55	17.020.755,61	17.936.288,38	18.838.351,97	19.855.844,24

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018

Tiga sektor dominan pada struktur perekonomian Kabupaten Magelang pada tahun 2016 adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,78 persen), Industri pengolahan (22,23 persen), dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,41 persen).

Sementara itu tiga sektor pemberi kontribusi terendah pada struktur perekonomian Kabupaten Magelang pada tahun 2016 adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas (0,05 persen), Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang (0,08 persen), dan Jasa Perusahaan (0,24 persen). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.21.
Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016 (%)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,11	23,97	23,63	23,40	22,78
B	Pertambangan dan Penggalian	3,90	3,87	4,22	4,44	4,35
C	Industri Pengolahan	20,78	21,24	21,62	21,80	22,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,30	9,21	9,27	9,29	9,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,57	14,25	13,60	13,39	13,41

Lapangan Usaha		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,11	23,97	23,63	23,40	22,78
H	Transportasi dan Pergudangan	3,21	3,20	3,33	3,40	3,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,95	3,96	4,02	4,06	4,18
J	Informasi dan Komunikasi	3,41	3,26	3,21	3,13	3,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,65	2,62	2,57	2,66	2,77
L	Real Estate	1,84	1,82	1,83	1,85	1,84
M.N	Jasa Perusahaan	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,96	3,85	3,67	3,66	3,62
P	Jasa Pendidikan	5,28	5,66	5,82	5,77	5,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,74	0,77	0,78	0,79
R.S. T.U	Jasa lainnya	1,96	2,00	2,07	2,01	2,09
PDRB Kabupaten Magelang		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018

2.1.3.1.2. PDRB penggunaan/pengeluaran

Data historis PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2016 yang dihitung melalui pendekatan penggunaan/pengeluaran (*expenditure approach*) bertambah Rp8.484.727,60 juta, atau 47,83%, jika dibanding tahun 2012 yang besarnya Rp17.738.492,11 juta, menjadi Rp26.223.219,71 juta.

Komponen Pengeluaran terbesar adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang besarnya mencapai 72,61% atau Rp20.157.675,80 juta. Komponen Pengeluaran terkecil adalah Perubahan Inventori yang besarnya hanya 1,36% atau Rp355.996,89 juta.

Data perkembangan total PDRB menurut penggunaan dan perkembangan komponen PDRB menurut penggunaan selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.22 berikut ini:

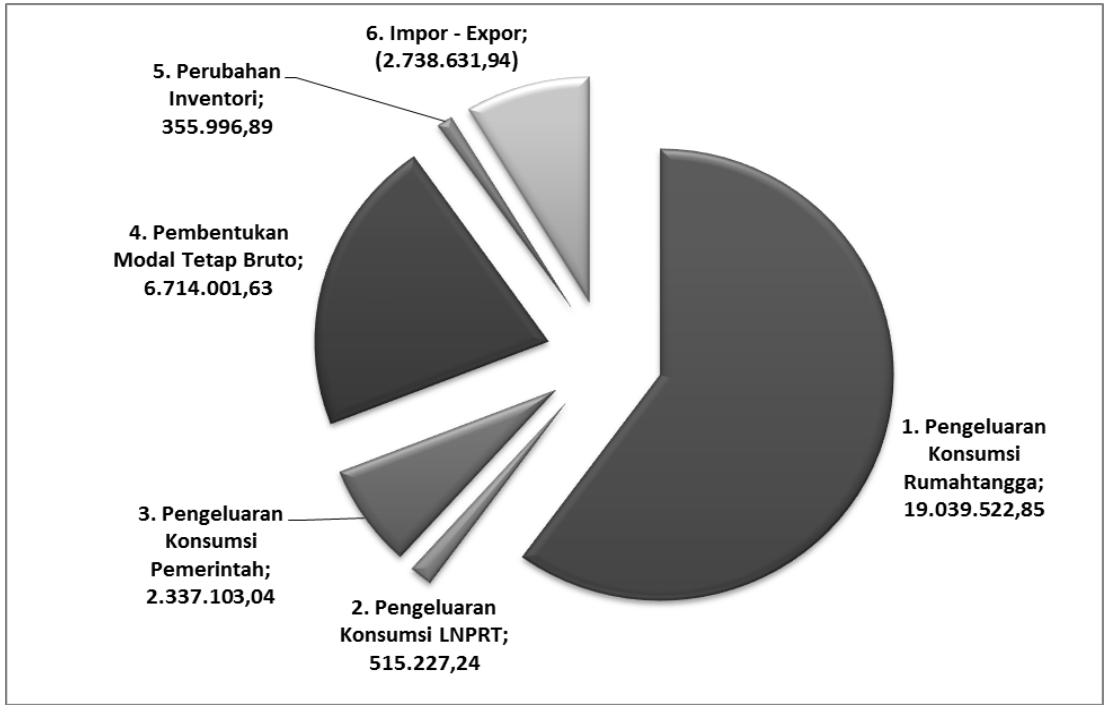
Tabel 2.22.
PDRB Kabupaten Magelang Menurut Penggunaan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	13.529.689,13	15.203.515,40	16.525.058,44	17.930.024,71	19.039.522,85
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	314.472,80	361.325,40	416.121,71	469.061,62	515.227,24
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.569.937,77	1.730.237,29	1.916.931,81	2.197.651,32	2.337.103,04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.904.284,41	5.147.306,09	5.909.839,42	6.432.281,33	6.714.001,63
5. Perubahan Inventori	1.102.612,29	985.073,80	1.152.562,93	732.137,79	355.996,89

6. Ekspor Barang dan Jasa	6.885.288,66	7.054.331,31	7.483.484,53	8.347.227,78	9.109.875,09
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	10.567.792,95	10.878.944,43	11.480.587,54	11.976.740,39	11.848.507,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	17.738.492,11	19.602.844,86	21.923.411,31	24.131.644,16	26.223.219,71

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Komposisi masing-masing komponen penggunaan/pengeluaran, yang meliputi: pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan), pengeluaran lembaga nirlaba, pengeluaran pemerintah, investasi, serta ekspor dan impor, disajikan dalam Gambar 2.8.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018 (diolah)

Gambar 2.8.

PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2016

Selama periode pada tahun 2016, produk yang dikonsumsi di Kabupaten Magelang sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 70 persen). Selain itu, ekspor dan impor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 34--41 persen produk Kabupaten Magelang diperdagangkan ke luar daerah. Demikian halnya dengan impor, karena sekitar 50--60 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) memberi kontribusi sekitar 26--27 persen. Sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Pada tahun 2012-2016 perdagangan Kabupaten Magelang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor. Berarti bahwa perdagangan Kabupaten Magelang selalu menunjukkan posisi “defisit”.

2.1.3.1.3. Laju Inflasi

Angka inflasi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Sedang yang dimaksud dengan inflasi adalah angka yang menggambarkan perubahan (dalam persentase) indeks harga konsumen (IHK) yang terjadi pada suatu periode waktu dengan periode waktu sebelumnya.

Pengertian Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menggambarkan perubahan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum pada suatu periode waktu dengan periode tertentu yang telah ditetapkan. Laju inflasi biasanya disebabkan antara lain oleh: perubahan ketersediaan uang di tangan masyarakat (*money supply*) sebagai akibat dari kebijakan moneter yang diambil bank sentral, kebijakan pemerintah tentang harga barang/jasa tertentu (*pricing policy*), kebijakan tentang subsidi, naik turunnya produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Inflasi Kabupaten Magelang antara tahun 2012–2016 mengalami fluktuasi sesuai harga-harga yang berlaku di masyarakat, namun tetap bergerak pada batas psikologis, yaitu kisaran satu digit. Laju inflasi pada level satu digit ini, menurut BPS, menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada tahun 2012-2016 masih dapat dikendalikan. Data inflasi selengkapnya bisa dilihat dalam Tabel 2.23.

Tabel 2.23.
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan
Nasional. Jawa Tengah. dan Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017

Tahun	Kab. Magelang	Prov. Jawa Tengah	Nasional
2012	2.59	4.24	4.30
2013	8.34	7.99	8.38
2014	7.91	8.22	8.36
2015	3.60	2.73	3.35
2016	2.86	2.36	3.02
2017	3.47	3.71	3.61

Sumber: BPS Kabupaten Magelang. 2018

Tabel di atas menunjukkan, meskipun laju inflasi di Kabupaten Magelang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi provinsi, namun dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan penurunan

Apabila dilihat menurut kelompok pengeluaran selama periode 2012-2016 maka tingkat inflasi yang paling fluktuatif adalah kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi dan komunikasi. Terlihat bahwa kelompok bahan makanan mencapai tingkat inflasi yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lain. Kelompok transport dan komunikasi yang mencapai inflasi tertinggi selama satu tahun, merupakan dampak dari kenaikan harga BBM. Adanya kenaikan tingkat harga bahan pangan, mengingat Kabupaten Magelang adalah daerah agraris atau penghasil bahan maka tingginya inflasi bukan sebagai musibah. Data inflasi menurut kelompok pengeluaran selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.24. berikut:

Tabel 2.24.
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan
Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Magelang
Tahun 2013 – 2017 (%)

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Umum	8.49	7.91	3.6	2.86	3.47
2	Bahan Makanan	15.74	13.02	3.80	6,25	2.15
3	Makanan Jadi	4.48	5.23	6.40	5.23	2.47
4	Perumahan	3.73	7.83	5.34	1.21	5.67
5	Sandang	-1.83	3.44	2.23	2.53	2.77
6	Kesehatan	2.19	3.30	3.45	2,42	2.21

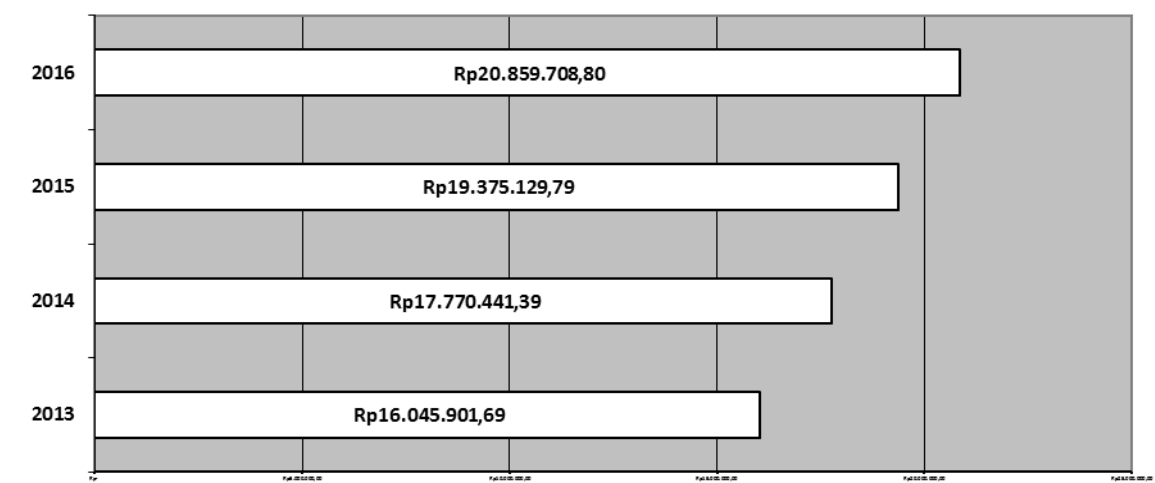
No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
7	Pendidikan	1.94	2.36	2.67	0,80	2.64
8	Transport	14.72	10.48	-1.86	2,14	5.01

Sumber Data : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.1.4. PDRB Perkapita

Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB per kapita memberikan informasi mengenai kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah dalam satu tahun. PDRB per kapita didapatkan dari angka PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun.

Selama periode 2011-2015 perkembangan PDRB perkapita ADHB maupun ADHK menunjukkan peningkatan cukup signifikan. PDRB perkapita Kabupaten Magelang tahun 2015 mencapai Rp20.859.708,80, naik 30,00 persen atau sebesar Rp4.813.807,11 dibanding tahun 2011 yang hanya Rp16.045.901,69. Untuk penjelasan lebih lengkap, dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber Data: BPS Kabupaten Magelang, 2017

Gambar 2.9.
PDRB Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2013-2016

2.1.3.1.5. Pemerataan Pembangunan

Pendapatan regional dapat diumpamakan sebagai kue regional, manakala kue regional ini dibagikan secara merata kepada seluruh penduduk di wilayah tersebut, maka dikatakan distribusi pendapatannya merata. Sebaliknya jika pembagian kue regional tersebut tidak merata (ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar) dikatakan ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Metode untuk mengukur pemerataan pembangunan antar lain teori *Gini Ratio*, Kriteria Bank Dunia dan Indeks Wiliamson.

- *Gini Ratio*

Koefisien gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu

(ketimpangan sempurna). Koefisien gini dihitung dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan.

Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$$

dimana:

- P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke- i
- Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke- i

Bank Dunia menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut :

- a. Ketimpangan taraf rendah, bila $G < 0.4$
- b. Ketimpangan taraf sedang, bila G antara $0.4 - 0.5$
- c. Ketimpangan taraf tinggi, bila $G > 0.5$

Berdasarkan hasil SUSENAS 2014, *Gini Ratio* di Kabupaten Magelang tahun 2014 adalah sebesar 0,34. Angka ini menunjukkan nilai $< 0,4$ yang berarti bahwa Kabupaten Magelang termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Keadaan ini merupakan gambaran bahwa pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan pembangunan yang hasilnya telah dapat dinikmati oleh penduduk Kabupaten Magelang, baik oleh penduduk yang berpenghasilan tinggi maupun penduduk yang memiliki penghasilan rendah. Data *Gini Ratio* Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut;

- Tahun 2011 sebesar : 0.32
- Tahun 2012 sebesar : 0.33
- Tahun 2013 sebesar : 0.34
- Tahun 2014 sebesar : 0.34

Data diatas memperlihatkan bahwa tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Magelang sejak tahun 2011 menunjukkan penurunan, yang berarti ketimpangan pendapatan di Kabupaten Magelang meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. pemerataan pendapatan di Kabupaten Magelang lebih baik. *Gini Ratio* Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

- Tahun 2011 sebesar : 0.38
- Tahun 2012 sebesar : 0.38
- Tahun 2013 sebesar : 0.39
- Tahun 2014 sebesar : 0.38

- Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan. membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12% maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12% sampai dengan 17% maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/ sedang/menengah.
- c. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17% maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

Dari data historis 2011-2015 diketahui bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Magelang ternyata sudah menerima lebih besar dari 17 persen total pendapatan. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Magelang menggambarkan ketimpangan rendah atau tingkat pemerataan yang tinggi.

Namun mengingat persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah mengalami penurunan sebesar minus tiga koma delapan dua persen (-3.82%). Persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan sedang mengalami penurunan sebesar minus satu koma lima puluh delapan persen (-1.58%). Persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi mengalami peningkatan sebesar lima satu koma empat persen (5,4%). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memburuk.

Adapun pemerataan pendapatan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.25. berikut :

Tabel 2.25.
Pemerataan Pendapatan Berdasarkan Bank Dunia 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
40% berpengeluaran rendah	23,00	22,90	20,50	19,46	19,18
40% berpengeluaran sedang	35,30	34,35	35,54	36,22	33,72
20% berpengeluaran tinggi	41,70	42,74	43,96	44,32	47,10

Sumber: BPS Kabupaten Magelang. 2017

- Indeks Williamson

Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam dan jumlah penduduk per kecamatan. Kesenjangan pendapatan antar kecamatan yang dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson dengan rumus sebagai berikut:

$$cv_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{y})^2 f_i / n}}{\bar{y}}$$

dimana :

- CVw = Indeks Williamson
- fi = Jumlah penduduk kecamatan ke-i (jiwa)
- n = Jumlah penduduk Kabupaten Magelang (jiwa)

- Y_i = PDRB per kapita kecamatan ke- i (Rupiah)
- \bar{y} = PDRB per kapita rata-rata Kabupaten Magelang (Rupiah).

Indeks Williamson pada dasarnya adalah salah satu bentuk modifikasi dari koefisien variasi, yaitu salah satu ukuran statistik untuk menghitung tingkat sebaran data. Data dengan standar deviasi yang tinggi (nilainya mendekati 1), mengindikasikan adanya variasi yang cukup tinggi atau dengan kata lain ada ketidakmerataan sebaran data.

Dengan mengasumsikan data PDRB perkapita kecamatan sebagai pendekatan dari pendapatan perkapita, metode ini dapat diaplikasikan untuk mengetahui tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan per kapita antar kecamatan.

Semakin tinggi variasi datanya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya ketimpangan pendapatan antar kecamatan. Rentang nilai indeks adalah dari nol sampai satu. Idealnya, diharapkan nilai indeks yang mendekati angka nol, yang bermakna pada tingkat pemerataan pendapatan yang semakin baik.

Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu).

- ✓ Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata.
- ✓ Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

Indeks kesenjangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Magelang, dalam RPJMD 2014-2019, ditargetkan berada pada kategori sedang yaitu pada besaran 0,4.

Pada Tabel 2.26 disajikan hasil perhitungan Indeks Williamson, untuk melihat tingkat kesenjangan pendapatan antar kecamatan. Penghitungan dilakukan untuk melihat perkembangan selama lima tahun terakhir berdasar data antara Tahun 2012 sampai 2016. Besar kecilnya ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.26.
Indeks Ketimpangan Williamson 2012-2016

Tahun	Ketimpangan Antar Kecamatan	
	ADHK	ADHB
2012	0.4101	0,3292
2013	0,3993	0,3672
2014	0.4049	0,3991
2015	0,4159	0,4157
2016	0,4160	0,4225

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018, Diolah.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indeks kesenjangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir berada pada kategori sedang yaitu pada besaran 0,39 hingga 0,41. Baik secara harga berlaku maupun konstan hampir-hampir tidak ada fluktuasi atau perkembangan yang signifikan.

2.1.3.1.6. Persentase Penduduk Miskin

Sesuai data terakhir BPS yang dirilis pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sejumlah 157.150 jiwa (12,42%), mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun jumlah penduduk miskin tahun 2016 sebesar 158.900 jiwa (12,67 %).

Jika dilihat dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir, walaupun angka kemiskinan mengalami penurunan, tetapi belum menunjukkan angka yang menggembirakan. Target di RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2017 sebesar 10,98% masih belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan pada sampai dengan tahun 2017 belum berjalan baik.

Adapun data penduduk miskin selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut:

Tabel 2.27.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk miskin (%)	13,96	12,98	13,07	12,67	12,42
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	171,02	160,480	162,380	158.900	157.150
Garis Kemiskinan (Rp/kapita bulan	235,43	246,292	253,866	271.800	281.237
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,72	2,07	1,60	1,84	1,67
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,34	0,47	0,32	0,44	0,31

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Kabupaten Magelang berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Namun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, posisi Kabupaten Magelang berada di atas tingkat kemiskinan nasional.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Magelang tahun pada 2017 telah mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Selama lima tahun terakhir indeks P1 mengalami fluktuasi. Capaian tahun 2017 adalah 1,67%, turun dari tahun 2016 sebesar 1,84%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan lebih dekat daripada tahun sebelumnya.

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Magelang selama periode lima tahun terahir jika dilihat dari data di atas juga terlihat fluktuatif. Tahun 2017 capaian P2 di kabuapten Magelang menunjukkan capain terendah selama rentang lima tahun terakhir, yaitu berada pada angka 0,31%. Indeks tertinggi terjadi pada tahun 2014, sebesar 0,47%

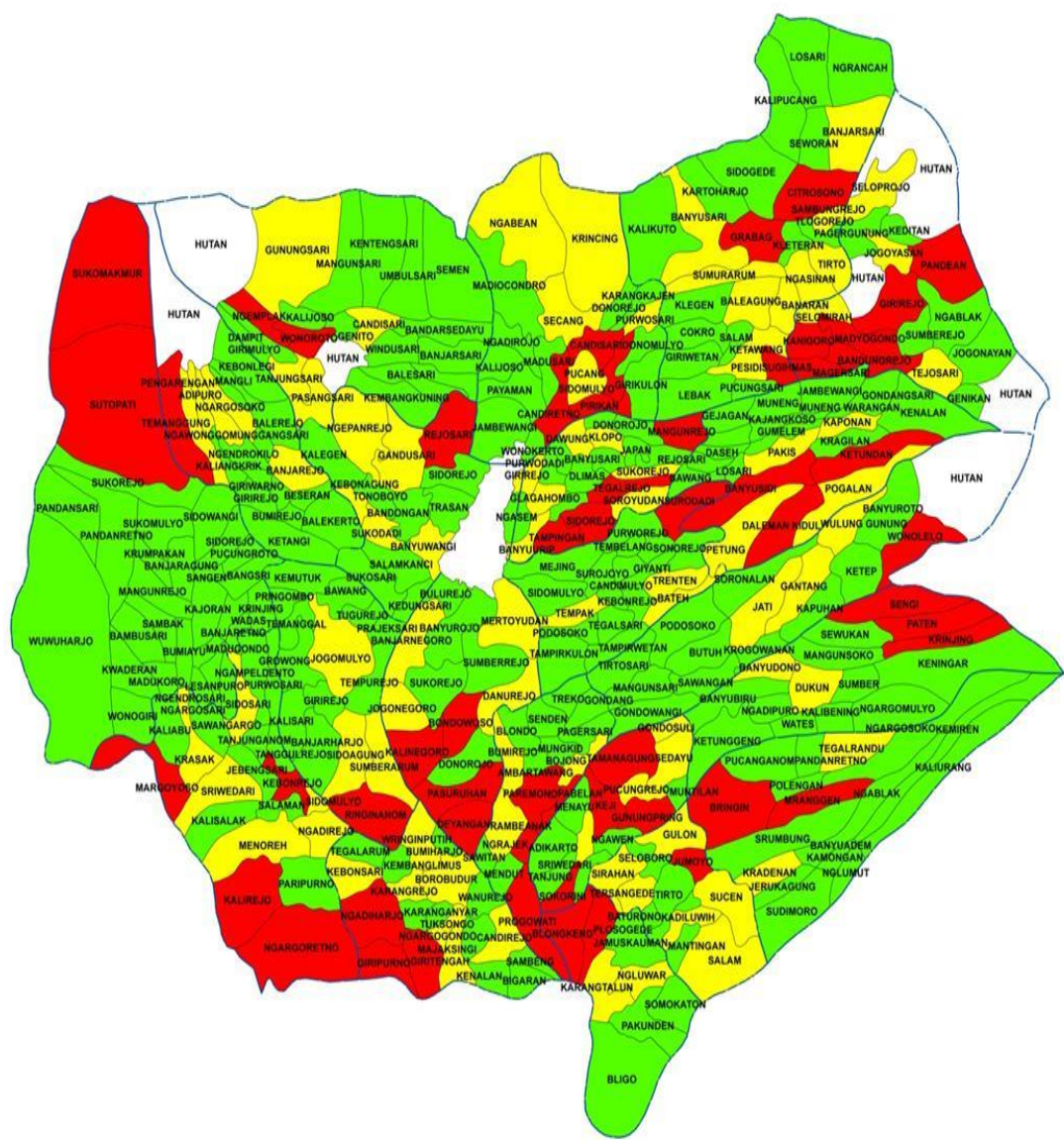
Guna mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang, Bappeda Propinsi Jawa Tengah telah melakukan pemetaan prioritas lokasi intervensi program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan di 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Pemetaan lokasi prioritas intervensi program penanggulangan kemiskinan mendasarkan pada Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 yang telah diolah. Sehingga di setiap kecamatan di semua kabupaten/ kota di Jawa Tengah termasuk Kabupaten Magelang akan diklasifikasikan menurut 3 (tiga) kategori yang dianalisis mendasarkan jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dengan total jumlah penduduk (Menggunakan Metode Interval).




Dari hasil pemetaan prioritas intervensi lokasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1. Desa dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah/merah sebanyak 94 desa;
- 2. Desa dengan tingkat kesejahteraan rendah/kuning sebanyak 151 desa;
- 3. Desa dengan tingkat kesejahteraan sedang/hijau sebanyak 127 desa.

Adapun arahan strategis untuk untuk pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2019 agar lebih tepat sasaran adalah sebagai berikut:

- 1. Program kegiatan OPD agar diarahkan pada sasaran dan lokasi prioritas berdasarkan BDT 2015.
- 2. Masih tingginya kemiskinan di daerah perdesaan, sehingga program penanggulangan kemiskinan agar diarahkan di perdesaan khususnya pemberdayaan di sektor pertanian (*On Farm dan Off Farm Oriented*)
- 3. OPD Provinsi diharapkan sinergis dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan kemiskinan
- 4. Tahun 2017 merupakan tahap akhir RPJMD 2013-2018, diharapkan program/kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, spasial).



-  : Desa dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah = 290.176 orang
-  : Desa dengan tingkat kesejahteraan rendah = 164.687 orang
-  : Desa dengan tingkat kesejahteraan sedang = 76.879 orang

Sumber : TPKD Prov. Jawa Tengah

Gambar 2.10.

Peta Desa Dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi Tahun 2017
 Jumlah dan Nama Desa yang tingkat kemiskinannya tinggi adalah
 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28.

Jumlah Desa yang Ter^golong dalam Tingkat Kemiskinan Tinggi
 Kabupaten Magelang Tahun 2012

Tingkat Kesejahteraan Sangat Rendah

NO	KECAMATAN	DESA
1	Bandongan	Gandusari, Kebonagung, Ngepanrejo, Salamkanci
2	Borobudur	Bumiharjo, Giripurno, Giritengah, Kebonsari, Kenalan, Ngargogondo
3	Candimulyo	Bateh, Kebonrejo, Podosoko, Purworejo, Sidomulyo, Trenten
4	Dukun	Krinjing,Paten, Wates
5	Grabag	Citroso, Kartoharjo, Ngrancah, Pesidi, Sambungrejo, Sugihmas, Tirto
6	Kajoran	Pandanretno
7	Kaliangkrik	Banjaretno, Kebonlegi, Mangli, Munggangsari, Ngargosoko, Pengarengan, Selomoyo
8	Mertoyudan	Deyangan, Pasuruhan
9	Mungkid	Gondang, Ngrajek, Paremono, Progowati, Rambeanak
10	Muntilan	Adikarto, Congkrang, Sriwedari
11	Ngablak	Keditan, Madyogondo, Magersari, Seloprojo
12	Ngluwar	Blongkeng, Karangtalun, Plosogede
13	Pakis	Daleman Kidul, Gondangsari
14	Salaman	Kalirejo, Ngargoretno, Paripurno, Purwosari, Sawangargo, Tanjunganom
15	Salam	Kadiluwih, Mantingan, Tersangede
16	Sawangan	Soronalan, Wulunggunung
17	Secang	Candiretno, Donomulyo, Girikulon, Karangkajen, Madusari , Pirikan, Purwosari, Sidomulyo
18	Srumbung	Mranggen, Ngargosoko, Pandanretno
19	Tegalrejo	Banyusari, Mangunrejo, Ngasem, Tampingan
20	Tempuran	Bawang, Girirejo, Growong, Kemutuk, Pringombo,Ringinanom, Tugurejo
21	Windusari	Candisari, Dampit, Genito, Gunungsari, Mangunsasri, Ngemplak, Pasangsari, Wonoroto

Sumber : TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang telah disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan menetapkan strategi: kebijakan ekonomi makro, pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar, pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, dan pembangunan sarana prasarana wilayah. Pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar dimaksud meliputi:

1. Penyediaan dan perluasan akses pangan
2. Perluasan akses kesehatan
3. Perluasan akses layanan pendidikan
4. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
5. Perluasan akses layanan perumahan
6. Penyediaan air bersih dan sanitasi
7. Perluasan akses layanan tanah
8. Perluasan akses layanan SDA dan lingkungan hidup
9. Peningkatan rasa aman
10. Perluasan akses partisipasi.

Dalam perluasan akses berpartisipasi ini terkandung maksud program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa untuk memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat miskin mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan.

2.1.3.1.7. Angka Kriminalitas

Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kewaspadaan dini masyarakat. Indikator capaian untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum adalah angka kriminalitas. Angka kriminalitas tercermin dari banyaknya perkara pidana yang masuk di Polres Magelang.

Dari data di bawah bisa dilihat bahwa penanganan tindak kriminal di Kabupaten Magelang selama rentang waktu 2012-2016 masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, dimana hal ini ditunjukkan dengan angka kriminalitas yang fluktuatif. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.29 berikut:

Tabel 2.29.
Angka Kriminalitas yang tertangani di Kab.Magelang Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Kejahatan			Angka Kriminalitas
			Lapor	Selesai	Rasio (%)	
1	2013	1.221.681	319	189	59,24	2,91
2	2014	1.233.695	252	181	71,81	1,40
3	2015	1.245.482	434	332	76,49	0,19
4	2016	1.245.496	252	186	73,30	0,19
5	2017	1.280.679	339	248	73,16	0,26

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.1.3.2.1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Metode lain untuk mengukur

keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah dengan menggunakan tolok ukur *Physical Quality of Life Index* (PQLI) atau yang lebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia.

IPM merupakan indikator komposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran per kapita.

IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2016 mencapai 67,85 poin, meningkat sebesar 0,72 poin, dibandingkan IPM tahun 2015 sebesar 67,13. Dalam RPJMD 2014-2019 IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 73,94. Data historis menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik.

Peringkat IPM Kabupaten Magelang mengalami kemajuan, jika pada tahun 2012 berada pada peringkat ke-27 di Provinsi Jawa Tengah, dan tahun 2016 berada pada peringkat ke 24. Data Perbandingan Kondisi IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2015, disajikan pada tabel 2.30.

Tabel 2.30.
Perbandingan Kondisi IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016

Cakupan Wilayah	Tahun				
	2012	2013	2014*	2015*	2016*
Magelang	73,14	73,67	66,35	67,13	67,85
Jawa Tengah	73,36	74,05	68,78	69,49	69,98
Indonesia	73,29	73,81	68,90	69,55	70,18
Peringkat di Jawa Tengah	27	25	25	25	24

* Perhitungan menggunakan metode baru
 ** Penurunan angka IPM tahun 2013 ke 2014 karena penggunaan metode baru.
 Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2017

IPM dihitung untuk mengungkapkan status pembangunan manusia. Dari nilai IPM Tahun 2015 yang sebesar 67,85 menjadikan Kabupaten Magelang masuk kategori ‘sedang’. Menurut klasifikasi yang ditetapkan BPS capaian IPM dengan nilai $60 \leq \text{IPM} < 70$ termasuk ‘sedang’, Capaian IPM $\text{IPM} < 60$ termasuk ‘rendah’, Capaian nilai IPM berkisar antara $70 \leq \text{IPM} < 80$ masuk kategori pembangunan manusianya tinggi. Apabila nilai IPM berkisar $\text{IPM} \geq 80$ masuk dalam kelas pembangunan manusianya ‘tinggi’.

Predikat pembangunan manusia dengan kelas menengah diperoleh oleh semua kabupaten/kota di eks Karesidenan Kedu. Namun bila nilai indeksnya diperbandingkan, maka pada tahun 2016 akan didapat bahwa Kabupaten Magelang menduduki posisi ke-3 se-eks Karesidenan Kedu setelah Kabupaten Purworejo yang berada pada urutan kedua, Kota Magelang yang berada pada urutan pertama. Kabupaten Temanggung pada urutan keempat, seperti terlihat pada tabel 2.31.

Tabel 2.31.
Nilai dan Peringkat IPM Kab./Kota se-Karesidenan Kedu Tahun 2015-2016

No	Kabupaten/ Kota	Nilai IPM 2015	Nilai IPM 2016	Peningkatan	Peringkat Peningkatan
1	Kab. Kebumen	66,87	67,41	0,54	III

No	Kabupaten/ Kota	Nilai IPM 2015	Nilai IPM 2016	Peningkatan	Peringkat Peningkatan
2	Kab. Purworejo	70,37	70,66	0,29	VI
3	Kab. Wonosobo	65,70	66,19	0,49	V
4	Kab. Magelang	67,13	67,85	0,72	II
5	Kab. Temanggung	67,07	67,60	0,53	IV
6	Kota Magelang	76,39	77,16	0,77	I

Sumber : BPS Kab. Magelang 2017

IPM disusun dari tiga indikator: lama hidup yang diukur dengan Angka Harapan Hidup Ketika Lahir (e0); pendidikan yang diukur berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) dan Angka Melek Huruf (Lit); dan standar hidup yang diukur dengan Pengeluaran Per Kapita (PPP-*Purchasing Power Parity*/paritas daya beli dalam rupiah). Indikator Angka Melek Huruf dalam metode baru diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS). Nilai dari masing-masing komponen IPM di Kabupaten Magelang Tahun 2016, sebagai berikut:

Angka Harapan Hidup (tahun) : 73,33
Angka Melek huruf (persen) : 95,75
Harapan Lama Sekolah (persen) : 12,15
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) : 7,40
Pengeluaran Riil Per Kapita disesuaikan (Ribu Rupiah/PPP) : 8,501

Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Jenis variabel atau indikator tersebut terbagi kedalam indikator input, proses dan output. Sebagai contoh: Angka Harapan Hidup merupakan indikator dampak (output) dari angka kematian bayi sebagai sasaran pembangunan. Angka kematian bayi sendiri dipengaruhi oleh cakupan imunisasi, penolong persalinan dan lain sebagainya (merupakan indikator proses).

Secara umum, Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Magelang berada di urutan ke-4 se-eks Karesidenan Kedu. Angka Harapan Lama Sekolah pada urutan ke-4. Rata-rata lama sekolah berada di urutan ke-3 dan Pengeluaran Riil Perkapita Penduduknya berada pada urutan ke-5. Adapun IPM secara umum berada pada peringkat ke-3. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan di setiap kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu menghasilkan output yang berbeda-beda dampaknya terhadap pembangunan manusia.

Angka harapan hidup dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dijalani seseorang hingga akhir hayat. Angka ini dapat dihitung dengan bantuan tabel kematian (*life table*) dan beberapa program paket komputer. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan “lama hidup” dan “hidup sehat”. Lama hidup seseorang tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, apabila membicarakan usia harapan hidup maka tidak akan terlepas dari pembicaraan upaya peningkatan derajat kesehatan.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2016 adalah 73,33 tahun. Artinya, pada Tahun 2016 seorang penduduk Kabupaten Magelang akan mempunyai harapan untuk terus hidup sampai usia 73,33 tahun. Selama periode lima tahun terakhir Angka Harapan Hidup di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan, yaitu dari 73,00 tahun pada tahun 2012 menjadi 73,33 tahun di tahun 2016. Hal ini

menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Magelang tahun 2016 memiliki harapan untuk terus hidup bertambah 0.06 tahun dibanding tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan Jawa Tengah, Pada Tahun 2014-2015 Angka Harapan Hidup Kabupaten Magelang masih dibawah Angka Harapan Hidup Jawa Tengah (73,96 pada tahun 2015 dan 74,02 pada tahun 2016).

Angka Harapan Hidup yang cukup tinggi tersebut merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik dan kebiasaan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat pada seluruh masyarakat.

Faktor kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini deteksi kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik, diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud.

Indeks pendidikan bisa dihitung setelah didapat Angka Melek Huruf (Lit) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Namun, dalam metode baru yang digunakan sejak tahun 2014, indikator Angka Melek Huruf (Lit) diganti dengan Harapan Lama Sekolah. Berikut ini akan dibahas secara singkat tentang ketiga indikator tersebut.

Secara nasional ditargetkan pada Tahun 2015 angka *enrollment* (tingkat kesertaan sekolah) disekolah dasar harus mencapai 100%. Angka melek huruf merupakan salah satu indikator dibidang pendidikan yang diukur dengan kemampuan untuk membaca dan menulis. Semakin tinggi nilai indikator ini maka akan semakin tinggi mutu sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berarti bagi pembangunan, baik pembangunan manusianya sendiri maupun pembangunan secara keseluruhan.

Angka Melek Huruf masyarakat Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar 93,60 dan tahun 2015 sebesar 95,75. Angka yang cukup tinggi ini diperoleh berkat upaya Pemerintah Kabupaten Magelang yang sungguh-sungguh untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Upaya yang telah dilaksanakan tersebut diantaranya dengan mendekatkan sarana pendidikan dasar ke tempat tinggal penduduk dengan tersebarnya Sekolah Dasar (SD) ke semua desa.

Angka Melek Huruf yang cukup tinggi merupakan langkah awal yang baik sebagai pijakan untuk pembangunan sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Fakta terakhir menunjukkan bahwa semakin baik sumber daya manusianya, maka penguasaan terhadap ekonomi/kesejahteraan akan semakin dominan. Ini dibuktikan dengan penguasaan ekonomi oleh negara-negara maju yang notabene sumber daya alamnya cukup terbatas, akan tetapi karena penguasaan teknologi yang bagus menjadikannya sebagai salah satu penguasa ekonomi dunia.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Dalam periode 2012-2016 HLS meningkat sebesar 2,05% per tahun. Meningkatnya HLS memberi pertanda bahwa kesempatan penduduk untuk sekolah menjadi lebih tinggi. Pada tahun 2016 HLS Kabupaten Magelang mencapai 12,15 yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D1.

Indikator untuk mengukur pembangunan manusia dibidang pendidikan salah satunya adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang dipakai UNDP dalam menghitung rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan rata-rata lama sekolahnya. Tetapi dalam pembahasan ini yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun keatas dan penghitungan rata-rata lama sekolahnya memakai metode tidak langsung, dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tingkat kemampuan baca tulis masyarakat yang cukup tinggi belum diimbangi dengan kesadaran untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih panjang. Ini dibuktikan dengan tingkat lama sekolah Kabupaten Magelang tahun 2016 yang baru mencapai 7,40 tahun. Meskipun angka ini lebih tinggi dibanding angka Jawa Tengah (rata-rata lama sekolah untuk Jawa Tengah sebesar 7,15 tahun), namun bila diamati se-eks Karesidenan Kedu lamanya sekolah masyarakat Kabupaten Magelang terletak pada urutan yang kedua setelah Kota Magelang yang sebesar 10,29 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah tahun 2015 di Kabupaten Magelang sebesar 7,19 dan tahun 2016 sebesar 7,40. Angka ini turun dibanding angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2013, dikarenakan adanya perhitungan dengan metode yang baru oleh BPS

Dengan rata-rata lama sekolah yang sebesar 7,40 tahun dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Magelang telah menempuh pendidikan selama 7,40 tahun atau setara menduduki bangku kelas 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Hasil penghitungan Angka Lama Sekolah untuk penduduk Kabupaten Magelang periode 2011-2013 dan 2014-2015 mengalami kenaikan meskipun agak lamban. Faktor yang menyebabkan lambannya kenaikan angka rata-rata lama sekolah ini antara lain masih tingginya biaya pendidikan yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat dan Bantuan Pendidikan, ternyata belum sepenuhnya mampu secara signifikan mengatasi mahalnnya biaya pendidikan. Karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan ternyata hanya untuk mencukupi kebutuhan minimum siswa/anak didik, sehingga perlu lebih banyak lagi program-program lain yang berpihak pada mereka yang merasa keberatan atas tingginya biaya pendidikan. Disamping itu perlu diingat pula bahwa angka rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan dasar penduduk 15 tahun keatas yang dalam kenyataannya penduduk yang sudah tua dan untuk Kabupaten Magelang umumnya mempunyai lama sekolah yang kecil sehingga mempengaruhi lambannya kenaikan angka ini. Faktor lain yang memperngaruhi nilai rata-rata lama sekolah adalah banyaknya penduduk asli Kabupaten Magelang yang berpendidikan tinggi, bekerja di luar daerah dan menjadi penduduk daerah tersebut.

Terlepas dari jalannya yang lamban faktor lain dari meningkatnya angka rata rata lama sekolah dimungkinkan adanya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Magelang yang telah putus sekolah untuk kembali ke bangku sekolah melalui sekolah-sekolah terbuka yang ada,

disamping mereka tetap bekerja untuk mencari penghasilan. Hal ini dikarenakan terbukanya kesempatan yang lebih banyak dan masyarakat semakin sadar akan arti pentingnya pendidikan.

Kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut.

Dasar penghitungan kemampun daya beli tidak secara langsung dikaitkan dengan salah satu indikator pendapatan yang sudah dikenal luas yaitu PDRB. Alasannya karena tolok ukur pendapatan daerah, produksinya tidak langsung dirasakan oleh penduduk. Alasan lainnya karena pendapatan orang yang sama belum tentu mempunyai kemampuan daya beli yang sama bila kedua orang tersebut mempunyai tempat tinggal yang berbeda. Dengan demikian perlu dilakukan penghitungan daya beli yang representatif.

Selain PDRB ada beberapa indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat, seperti: Indeks PPP yang merupakan rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). Hasil evaluasi yang dilakukan dengan cara cermat didapat bahwa metode terakhir yang paling baik untuk dijadikan tolok ukur daya beli masyarakat.

Alasan mengapa rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK tidak dijadikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat adalah karena angka yang didapat hanya mencerminkan perbedaan daya beli masyarakat kota. Tetapi dalam penggunaannya angka IHK tetap digunakan sebagai *deflator* dalam penghitungan perkiraan *Puschasing Power Parity* (PPP) antar kabupaten/kota dalam harga konstan, sehingga angka yang disajikan dapat diperbandingkan antar daerah.

Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Magelang pada tahun 2015 sebesar Rp8.182.000,00 per bulan, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp8.501.000,00 pertahun atau Rp708.416,00 per bulan. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Magelang hanya lebih tinggi dari Kabupaten Kebumen. Data Nilai Komponen IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016, disajikan dalam tabel 2.32.

Tabel 2.32.
 Nilai Komponen-Komponen IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016

No	Komponen	2012	2013	2014*	2015	2016
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,23	70,63	73,25	73,27	73,33
2.	Angka Melek Huruf (persen)	93,31	93,64	93,60	95,75	95,75
	Harapan Lama Sekolah			12,00	12,14	12,15
3.	Rata-rata Lama Sekolah (thn)	7,55	7,55	7,02	7,19	7,40
4.	Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan (Rp 000)	641,45	644,48	7,877	8,182	8.501

*Perhitungan menggunakan metode baru
 Sumber : BPS Kab. Magelang 2017

2.1.3.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2015 sebesar 99,87%, tahun 2016 menjadi 103,69, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 105,87, artinya bahwa untuk jenjang SD/MI jumlah siswa yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD/MI dimana hal ini disebabkan pada sekolah SD/MI ada siswa yang berusia kurang dari 7 tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun.

Demikian pula bagi SMP/M.Ts, dapat dilihat bahwa APK pada tahun 2015 sebesar 84,49 pada tahun 2016 turun menjadi 82,40 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 88,38. Peningkatan ini disebabkan antara lain berkurangnya penduduk Kabupaten Magelang usia 13-15 yang bersekolah di luar wilayah Kabupaten Magelang, serta meningkatnya keterjangkauan penduduk Kabupaten Magelang terhadap akses pendidikan SMP/MTs.

APK SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebesar 54,17, tahun 2016 naik menjadi 60,48 atau meningkat sebesar 6,31 dari tahun 2016 dan pada tahun 2017, meningkat lagi menjadi 64,23. Hal ini bisa terjadi karena kesadaran penduduk untuk melanjutkan sekolah ke SMA sederajat mengalami peningkatan.

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Magelang untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2013 s.d. tahun 2017, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.33.
Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI/Paket A					
1.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	126.254	125.072	122.290	122.873	123.243
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12Tahun	121.329	123.427	122.457	118.682	116.407
1.3	APK SD/MI/Paket A	104.44	101.33	99.87	103.69	105,87
2	SMP/MTs/Paket B					
2.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	50.497	52.003	52.152	53.059	53.626
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	63.302	62.265	61.726	64.461	60.675
2.3	APK SMP/MTs/Paket B	79.77	83.52	84.49	82.40	88,38
3	SMA/SMK/MA/Paket C					
3.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	29.254	30.953	33.165	34279	37.242
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok	61.789	61.024	61.221	56.750	57.978

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Usia 16-18 Tahun					
3.3	APK SMA/SMK/MA/Paket C	47.34	50.72	54.17	60.48	64,23

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2018

2.1.3.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap, penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap penduduk di usia sekolah yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

Dengan kata lain Angka Partisipasi Murni merupakan angka yang menggambarkan partisipasi anak usia sekolah dalam mengikuti jenjang pendidikan yang sesuai. Kondisi APM Kabupaten Magelang untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.34.
Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI/Paket A					
1.2	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	109.177	107.403	106.200	106.333	107.862
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	121.329	123.427	122.457	118.682	116.407
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,98	87,02	86,74	89,70	92,66
2	SMP/MTs/Paket B				61.5922	
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	36.108	38.856	39.225	40.439	41.113
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	63.302	62.265	61.726	64.461	60.675
2.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	57,04	62,40	64,86	62,78	67,76
3	SMA/SMK/MA/Paket C				42.13??	
3.1	Jumlah Siswa Kelompok Usia 16-18 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	20.393	21.985	23.011	24.219	27.181
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	61.789	61.024	61.221	56.750	57.978
3.3	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	33,00	36,03	37,58	42,70	46,88

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2018

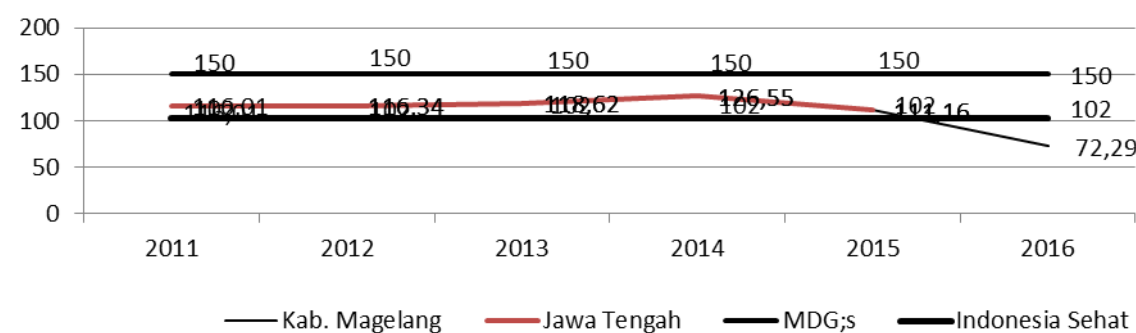
2.1.3.2.4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena

kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan saat persalinan dan pasca persalinan sehingga membuat kehamilan yang aman dan bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*). Program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Dalam konteks Kabupaten Magelang AKI disajikan dalam wujud angka jumlah kematian ibu per kelahiran hidup dikalikan 100.000 dalam setahun.

Dalam kurun waktu 2011-2016. kasus kematian ibu di Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif, secara detail dapat dilihat pada gambar 2.11 berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang, 2017

Gambar 2.11.
 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Magelang tahun 2011-2016

Dilihat dari jumlah kematian ibu sebagai berikut :

Tahun 2013	: 11 kasus dari 18.993 kelahiran hidup
Tahun 2014	: 14 kasus dari 18.663 kelahiran hidup
Tahun 2015	: 10 kasus dari 17.956 kelahiran hidup
Tahun 2016	: 13 kasus dari 17.984 kelahiran hidup
Tahun 2017	: 8 kasus dari 17.192 kelahiran hidup

Upaya untuk menurunkan kasus kematian ibu selama kurun waktu 2011-2016 dilakukan melalui pemberian jaminan persalinan, pelaksanaan forum group discussion (FGD), pemberian makanan tambahan ibu hamil dan kegiatan kelas ibu hamil, sehingga kesehatan ibu hamil dapat selalu terpantau, dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK Kabupaten.

2.1.3.2.5. AKB dan AKABA

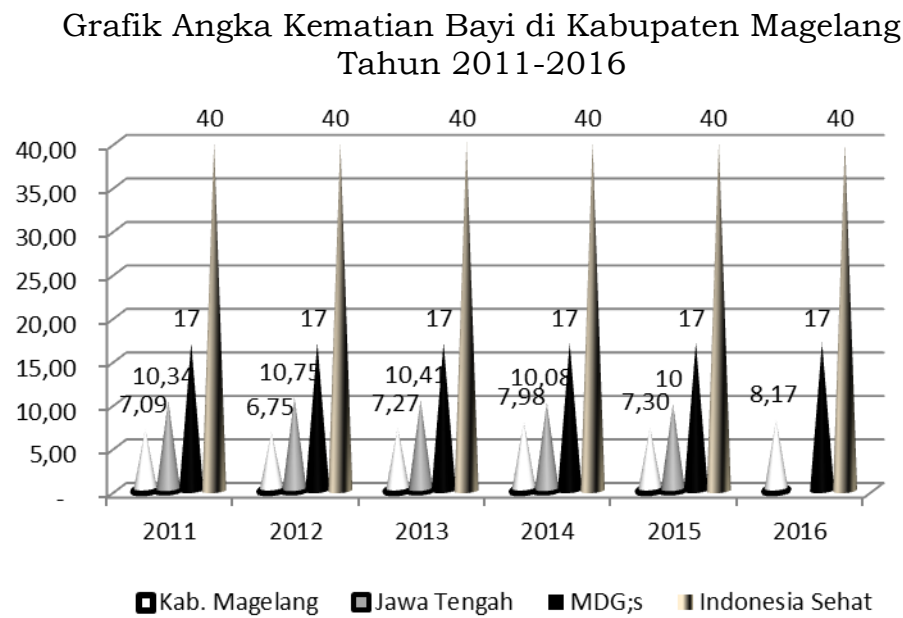
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH).

Dilihat dari jumlah kematian bayi sebagai berikut :

Tahun 2013	: 138 kasus dari 18.993 kelahiran hidup
Tahun 2014	: 149 kasus dari 18.663 kelahiran hidup
Tahun 2015	: 131 kasus dari 17.956 kelahiran hidup
Tahun 2016	: 147 kasus dari 17.984 kelahiran hidup

Dalam kurun waktu tahun 2011-2016 AKB di Kabupaten Magelang relatif stabil, walaupun terjadi peningkatan dan penurunan tetapi tidak terlalu drastis. Namun demikian AKB Kabupaten Magelang tahun 2015 sebesar 7,30/1000 KH lebih baik dibandingkan angka provinsi sebesar 10/1.000 KH.

Gambaran Angka Kematian Bayi selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai gambar 2.12 berikut :

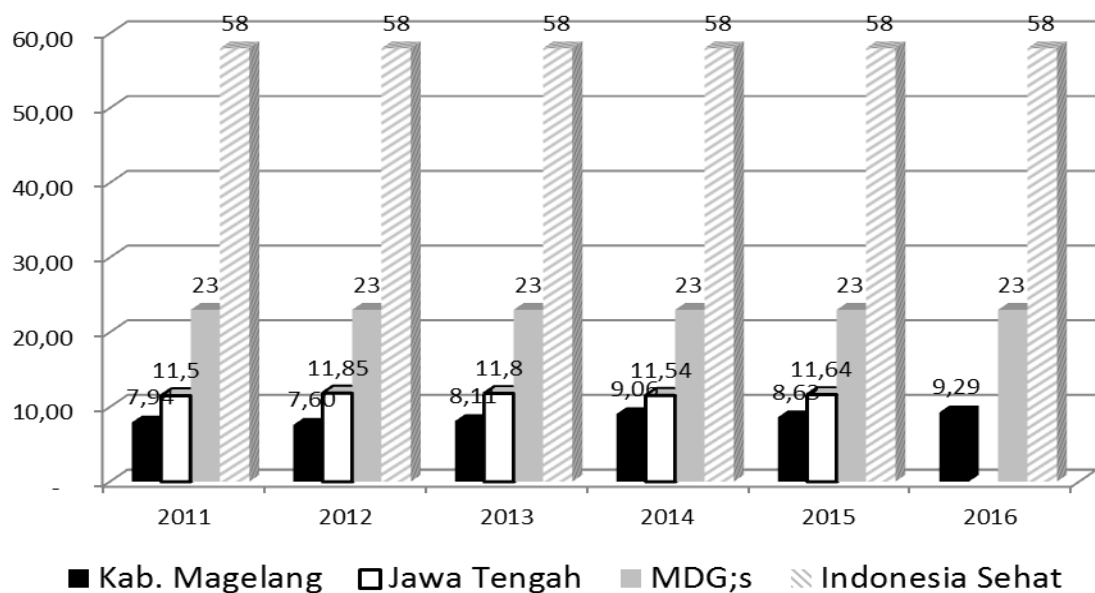


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang, 2017

Gambar 2.12.
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Magelang Tahun 2011-2016

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Sedangkan balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir, yang berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun 11 bulan 29 hari). Pada umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun.

Dalam kurun tahun 2011-2016. AKABA cenderung stabil, tetapi mulai tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 11,54 /1.000 KH, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 11,64/1.000 KH dan pada tahun 2016 meningkat menjadi menjadi 11,85/1.000 KH. Peningkatan AKABA bisa disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yang paling banyak ditemui adalah gangguan pada asupan gizi akibat adanya penyakit penyerta. Pada tahun 2016 terjadi 167 kasus kematian balita. Jika dibandingkan dengan jumlah balita 17.984 anak tahun 2016 maka diperoleh AKABA : 11,85/1000 balita. Data selengkapnya disajikan dalam gambar 2.13.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang, 2017

Gambar 2.13.
Angka Kematian Balita Kabupaten Magelang Tahun 2010-2016

Data ABA dan AKABA secara lengkap disajikan dalam tabel 2.35 di bawah ini.

Tabel 2.35.
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA)
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	7,27	7,98	7,30	8,17	6,63
Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	8,11	9,06	8,83	9,29	7,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang, 2018

2.1.3.2.6. Presentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk pada anak balita disebut juga kurang energi protein (KEP) yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari. Penyebab timbulnya gizi buruk di Kabupaten Magelang karena kelainan kongenital dan adanya penyakit penyerta sehingga sulit untuk ditanggulangi, kejadian gizi buruk akibat kurangnya asupan makanan sangat sedikit terjadi. Kasus gizi buruk pada balita tidak seiring dengan kasus kematian pada balita. Secara detail kejadian gizi buruk pada balita di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 sebagai berikut :

Tabel 2.36.
Balita Gizi Buruk Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase (%)
1	2013	28	96.413	0,03
2	2014	36	95.689	0,04
3	2015	30	91.861	0,03
4	2016	36	92.246	0,04
5	2017	18	86.699	0,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Kondisi kesehatan gizi masyarakat mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir, angka prevalensi gizi buruk balita pada awal tahun 2012 cukup kecil sebesar 0,01%, sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuatif pada tiap tahunnya dan pada tahun 2016 mencapai 0,04%.

Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Magelang menurut Kecamatan Tahun 2016-2017 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37.
Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase Gizi Buruk (%)	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase Gizi Buruk (%)
1.	Salaman	1	5.093	0,02	1	4.445	0.02
2.	Borobudur	3	4.322	0,07	-	3.905	-
3.	Ngluwar	2	1.870	0,11	1	1.659	0.06
4.	S a l a m	9	2.982	0,30	-	2.756	-
5.	Srumbung	0	3.900	0,00	-	3.287	-
6.	D u k u n	0	3.150	0,00	-	2.733	-
7.	Muntilan	3	5.428	0,06	2	7.988	0.03
8.	Mungkid	2	5.746	0,03	1	4.560	0.02
9.	Sawangan	0	3.675	0,00	0	3.394	-
10.	Candimulyo	0	3.350	0,00	0	2.972	-
11.	Mertoyudan	3	8.766	0,03	3	9.053	0.03
12.	Tempuran	0	3.521	0,00	0	3.305	-
13.	Kajoran	1	4.339	0,02	2	4.228	0.05
14.	Kaliangkrik	0	4.628	0,00	0	3766	-
15.	Bandongan	1	4.468	0,02	1	4.286	0.02
16.	Windusari	1	3.894	0,03	0	3.516	-
17.	Secang	6	6.109	0,10	2	5.357	0.04
18.	Tegalrejo	2	3.877	0,05	1	3.500	0.03
19.	Pakis	0	3.402	0,00	0	3.373	-
20.	Grabag	2	6.835	0,03	4	6.074	0.07
21.	Ngablak	0	2.891	0,00	0	2.541	-
	Total	36	92.246	0,04	18	86.699	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.2.7. Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang

yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Antara tahun 2015 hingga 2017 di Kabupaten Magelang terjadi peningkatan rasio penduduk yang bekerja. Hal ini sejalan dengan data pengangguran terbuka (tabel 2.80) yang terus menurun. Data perkembangan rasio penduduk yang bekerja selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.38.
Rasio penduduk yang bekerja Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angkatan Kerja	660.609	666.331	672.063	677.909	683.144
Kesempatan Kerja	632.450	639.264	646.021	654.072	661.203
Rasio penduduk yang bekerja	95,74	95,94	96,13	96,48	96,79

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Jika dipilah menurut umur tampak bahwa rasio penduduk yang bekerja pada permintaan tenaga kerja usia muda paling rendah. Sisi lain dari fakta ini adalah tersedianya peluang bagi peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan/atau pelatihan untuk meningkatkan daya saing, misalnya menghadapi MEA. karena biaya peluang (*opportunity cost*) pendidikan dan/atau pelatihan generasi muda terbukti rendah. Data perkembangan rasio penduduk yang bekerja menurut umur selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.39.
Rasio penduduk yang bekerja Menurut Umur Tahun 2016-2017

Golongan Umur	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Angkatan Kerja	Kesempatan Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	Angkatan Kerja	Kesempatan Kerja	Rasio penduduk yang bekerja
15 – 19	39.416	33.254	84,37	39.157	33.309	85,07
20 – 24	50.468	46.075	91,30	50.960	46.803	91,84
25 – 29	65.763	64.078	97,44	66.793	65.264	97,71
30 – 34	83.922	82.043	97,76	84.604	83.120	98,25
35 – 39	76.873	75.859	98,68	77.704	76.715	98,73
40 – 44	88.578	83.683	94,47	89.203	84.803	95,07
45 – 49	78.673	76.852	97,69	79.149	77.411	97,80
50 – 54	66.248	65.381	98,69	66.859	66.052	98,78
55 – 59	40.550	39.657	97,80	40.730	39.909	97,98
60 +	87.420	87.187	99,73	87.985	87.817	99,81
Jumlah	677.909	654.072	96,48	683.144	661.202	96,79

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Magelang ditunjukkan dengan meningkatnya keberadaan jumlah kelompok kesenian dan gedung kesenian Untuk bidang olahraga,

perkembangannya ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah klub olahraga. Perkembangan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40.
Pembangunan Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah grup kesenian	1.380	1.480	1.464	2.454	2,756
Jumlah gedung kesenian	3	3	4	4	6
Jumlah Museum	7	7	7	7	7
Jumlah klub olah raga	28	28	34	34	na
Jumlah gedung olah raga	1	1	1	1	na
Jumlah Stadion	0	1	1	1	na
Jumlah Lapangan Olahraga	253	253	255	265	na

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang 2018

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Kondisi umum pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu yang mencakup layanan urusan wajib dan pilihan.

2.1.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

2.1.4.1.1. PENDIDIKAN

2.1.4.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Magelang pada Tahun 2015 pada jenjang SD/MI 99,37; pada jenjang SMP/MTs 94,08 dan pada SMA/SMK/MA 62,40. Tahun 2016 Angka partisipasi sekolah pada jenjang SD/MI 98,18; pada jenjang SMP/MTs 95,65 dan pada jenjang SMA/SMK/MA 67,24. Tahun 2017 APS pada jenjang SD/MI 98,94; pada jenjang SMP/MTs 96,45 dan pada jenjang SMA/SMK/MA 70,36. Perkembangan APS selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.41.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
SD/ MI (7 – 12 th)	99,54	99,56	99,74	98,18	98,94
SMP/ MTs (13 – 15 th)	89,06	93,24	94,08	95,65	96,45
SMA/SMK/MA (16-18 th)	54,13	59,96	63,39	67,24	70,36

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini menunjukkan kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan pada setiap jenjang. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.42.

Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/ MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	918	915	916	916	914
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	121.329	123.427	122.457	118.682	116.407
1.3	Rasio (per 10.000)	75,66	74,13	74,8	77,18	78,52
1.4	Rata-rata jumlah murid per sekolah	132,17	134,89	133,69	129,6	127,96
2	SMP/ MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	195	196	195	198	198
2.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	63.302	62.265	61.726	64.461	60.675
2.3	Rasio (per 10.000)	30,80	31,48	31,59	30,72	32,63
2.4	Rata-rata jumlah murid per sekolah	324,63	317,68	316,54	325,56	306,44
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah gedung sekolah	95	98	100	97	98
3.2	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	61.789	61.024	61.221	56.750	57.978
3.3	Rasio (per 10.000)	15,37	16,06	16,33	17,09	16,90
3.4	Rata-rata jumlah murid per sekolah	650,41	622,69	612,21	585,05	591,61

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah di Kabupaten Magelang dalam periode tahun 2013-2017 bersifat fluktuatif namun menunjukkan trend yang meningkat. Fluktuasi ini disebabkan jumlah penduduk kelompok usia sekolah per jenjangnya bersifat dinamis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SD/MI sebesar 74,8 per 10.000 penduduk menjadi 77,18 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 78,52. Berarti bahwa untuk jenjang SD sederajat pada tahun 2015, rata-rata jumlah siswa persekolahnya sebanyak $10.000/74,8 = 133,69$ siswa, pada tahun 2016 rata-rata siswa menjadi 129,6 dan pada tahun 2017 rata-rata siswanya menjadi 127,56. Untuk jenjang SMP/MTs, pada tahun 2015 rata-rata persekolah sebesar 316,54 menjadi 325,56 pada tahun 2016, pada tahun 2017 menjadi 32,63 dan untuk jenjang SMA/SMK/MA, pada tahun 2015 rata-rata siswa persekolah sebesar 612,21 siswa menjadi 585,05 siswa pada tahun 2016, menjadi 16,90 pada tahun 2017. Hal ini mencerminkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan melalui penyediaan sarana belajar bagi anak usia sekolah.

Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.43.
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2017

No.	Kecamatan	2016						2017					
		SD/MI			SMP/MTs			SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio
1.	Salaman	52	7,389	142.10	3,921	230.65	3,921	52	6.926	133,19	17	3.621	213,00
2.	Borobudur	46	5,699	123.89	2,896	321.78	2,896	46	5.541	120.46	9	2.831	314,56
3.	Ngluwar	27	2,950	109.26	1,443	288.60	1,443	27	2.861	105,96	5	1.410	282,00
4.	S a l a m	34	4,518	132.88	2,320	257.78	2,320	35	4.402	125,77	9	2.262	251,33
5.	Srumbung	45	4,440	98.67	2,403	300.38	2,403	45	4.440	98,67	8	2.256	282,00
6.	D u k u n	36	4,118	114.39	2,221	246.78	2,221	36	4.042	112,28	9	2.088	232,00
7.	Muntilan	47	7,018	149.32	3,833	212.94	3,833	47	7.019	149,34	18	3.674	204,11
8.	Mungkid	45	6,604	146.76	3,572	297.67	3,572	45	6.586	146,36	11	3.341	303,73
9.	Sawangan	39	4,963	127.26	2,834	283.40	2,834	40	4.776	119,40	10	2.439	243,90
10.	Candimulyo	41	4,632	112.98	2,509	501.80	2,509	40	4.484	112,10	5	2.387	477,40
11.	Mertoyudan	54	9,971	184.65	5,295	588.33	5,295	53	9.859	186,02	10	5.070	507,00
12.	Tempuran	37	4,750	128.38	2,554	232.18	2,554	37	4.728	127,78	11	2.406	218,73
13.	Kajoran	54	5,653	104.69	2,897	289.70	2,897	53	5.563	104,96	10	2.751	275,10
14.	Kaliangkrik	45	5,664	125.87	3,373	481.86	3,373	45	5.497	122,16	7	3.125	446,43
15.	Bandongan	46	5,751	125.02	3,081	308.10	3,081	46	5.631	122,41	10	2.955	295,50
16.	Windusari	39	5,130	131.54	2,908	363.50	2,908	38	5.077	133,61	8	2.751	343,88
17.	Secang	51	7,665	150.29	4,249	326.85	4,249	51	7.771	152,37	13	4.051	311,62
18.	Tegalrejo	44	5,345	121.48	2,827	471.17	2,827	44	5.215	118,52	6	2.571	428,50
19.	Pakis	40	4,376	109.40	2,600	371.43	2,600	40	4.247	106,18	7	2.338	334,00
20.	Grabag	63	8,792	139.56	4,812	481.20	4,812	63	8.583	136,24	10	4.578	457,80
21.	Ngablak	31	3,254	104.97	1,913	382.60	1,913	31	3.159	101,90	5	1.770	354,00
	Total	916	118,682	129.57	64,461	325.56	64,461	914	116.407	125,51	198	60.675	322,70

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.1.3. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru di suatu tingkat pendidikan per 1000 jumlah murid tingkat pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di sebuah daerah yang dapat dibaca sebagai cerminan dari kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Disamping itu, rasio guru terhadap murid juga dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang bermutu dengan hasil yang diharapkan. Perkembangan rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.44.
Perkembangan Rasio Guru dan Murid Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	9.323	9.177	9.076	8.971	8.869
1.2.	Jumlah Murid	126.712	125.072	122.290	122.873	123.243
1.3.	Rasio (per 1000)	73,58	73,37	74,22	73,01	71,96
1.4.	Rasio guru terhadap murid	13,59	13,63	13,47	13,70	13,89
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	5.623	3.985	4.206	4.031	4.043
2.2.	Jumlah Murid	50.497	52.003	52.152	53.059	53.626
2.3.	Rasio (per 1000)	111,35	76,63	80,65	75,97	75,39
2.4.	Rasio guru terhadap murid	8,98	13,05	12,40	13,16	13,26
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah Guru	2.674	2.650	2.960	2.956	2.981
3.2	Jumlah Murid	29.254	30.953	33.165	34.279	37.242
3.3	Rasio (per 1000)	91,41	85,61	89,25	86,23	80,04
3.4.	Rasio guru terhadap murid	10,94	11,68	11,20	11,60	12,49

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.1.4. Pendidikan Keagamaan Islam

Pendidikan Keagamaan Islam di Kabupaten Magelang diantaranya adalah Bustanul Atfal atau Raudhotul Arfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiah dan Madrasah Aliyah. Ada jenis pendidikan islam yang lain yang bersifat informal, yaitu pendidikan di pesantren-pesantren yang banyak terdapat di Wilayah Kabupaten Magelang. Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Magelang disajikan secara lengkap pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45.
Banyaknya Sarana Pendidikan Keagamaan Islam Murid dan Guru
Tahun 2013-2017

No	Jenjang	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bustanul Atfal/Raudhotul Atfal					
	Sekolah	428	425	430	428	427
	Murid	15.032	15.509	16.457	16.556	17.185

No	Jenjang	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Guru	1.155	1.184	1.190	1.171	1.183
2	Madrasah Ibtidaiyah					
	Sekolah	310	310	310	310	310
	Murid	32.164	32.490	32.792	33.040	33.733
	Guru	2.651	2.648	2.618	2.576	2.547
3	Madrasah Tsanawiyah					
	Sekolah	71	71	71	71	71
	Murid	13.084	14.050	14.548	14.755	14.607
	Guru	1.303	1295	1273	1.278	1.252
4	Madrasah Aliyah					
	Sekolah	18	18	18	18	18
	Murid	3.444	888	3.987	4.549	4.760
	Guru	412	405	391	425	428

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.2. KESEHATAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan. Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan prioritas dan perlu mendapatkan pelayanan secara menyeluruh baik pada pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, mengingat aspek kesehatan pada ibu dan bayi merupakan salah satu indikator pembangunan daerah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan bayi antara lain dengan revitalisasi dan pengembangan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan preventif dan promotif bagi ibu hamil dan bayi.

Dalam kurun waktu sepanjang tahun 2017, terdapat 2.461 posyandu. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu dan bayi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.46.
Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Jumlah posyandu	2.232	2.234	2.345	2.345	2.461
2. Jumlah balita	96.413	95.689	91.861	92.246	86.699
3. Rasio (100 kali)	2,32	2,33	2,55	2,54	2,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Magelang, 2018

Jumlah Posyandu dan Balita menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel 2.47. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah Posyandu terbanyak berada di Kecamatan Secang (166) dan jumlah Posyandu terkecil berada di Kecamatan Tempuran. Kecamatan yang memiliki jumlah balita terbanyak adalah Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan yang memiliki jumlah balita terkecil adalah Kecamatan Ngluwar. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.47.
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	2016			2017		
		Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1.	Salaman	133	4.010	37,67	133	4445	33,42
2.	Borobudur	134	4.572	49,04	134	3905	29,14
3.	Ngluwar	74	4.257	71,04	74	1659	22,42
4.	S a l a m	104	4.543	62,91	104	2756	26,5
5.	Srumbung	141	3.518	46,23	140	3287	23,47
6.	D u k u n	83	5.597	67,43	84	2733	32,53
7.	Muntilan	117	4.360	52,39	119	7988	67,13
8.	Mungkid	56	5.145	163,30	147	4561	31,02
9.	Sawangan	84	4.169	49,63	85	3394	39,93
10.	Candimulyo	88	4.847	77,81	90	2972	33,02
11.	Mertoyudan	152	3.097	59,85	149	9054	60,76
12.	Tempuran	73	5.899	94,51	80	3305	41,31
13.	Kajoran	123	3.804	39,06	123	4228	34,37
14.	Kaliangkrik	87	4.723	111,76	93	3766	40,49
15.	Bandongan	120	3.752	72,93	120	4286	35,72
16.	Windusari	103	3.876	37,63	103	3516	34,13
17.	Secang	165	5.482	39,28	166	5357	32,27
18.	Tegalrejo	110	3.158	74,16	125	3500	28
19.	Pakis	84	4.258	74,50	89	3373	37,90
20.	Grabag	140	4.090	50,64	209	6074	29,06
21.	Ngablak	95	5.089	85,15	94	2541	27,03
	Total	2.345	92.246	40,81	2461	86.699	35,23

Sumber : Dinas Sosial, PPKB dan PPPA Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.48.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Magelang
Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Puskesmas	29	29	29	29	29
2.	Jumlah Poliklinik	266	266	266	266	11
3.	Jumlah Pustu	63	63	63	63	63
4.	Jumlah Penduduk	1.221.681	1.233.695	1.245.496	1.257.123	1.268.396
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	41,703	42,127	42,948	44,133	43,737

6	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	4,547	4,593	4,682	4,811	115,308
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk	19.196	19.392	19.770	20.315	20,133

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Magelang, 2018

2.1.4.1.2.1. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Tabel 2.49.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan
Kabupaten Magelang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik*		Pustu	
			Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
1.	Salaman	70,497	2		1		4	
2.	Borobudur	59,039	2		0		3	
3.	Ngluwar	31,371	1		0		3	
4.	S a l a m	47,513	1		0		3	
5.	Srumbung	49,080	1		2		3	
6.	D u k u n	46,018	1		0		3	
7.	Muntilan	80,161	2		0		2	
8.	Mungkid	75,076	1		0		2	
9.	Sawangan	57,602	2		0		3	
10.	Candimulyo	48,840	1		0		3	
11.	Mertoyudan	115,670	2		0		2	
12.	Tempuran	49,834	1		0		3	
13.	Kajoran	53,285	2		0		4	
14.	Kaliangkrik	55,658	1		0		3	
15.	Bandongan	58,002	1		1		3	
16.	Windusari	50,351	1		0		4	
17.	Secang	82,565	2		2		4	
18.	Tegalrejo	57,907	1		3		2	
19.	Pakis	54,443	1		0		3	
20.	Grabag	86,526	2		2		3	
21.	Ngablak	38,958	1		0		3	
	Total		29		11		63	

*Poliklinik adalah Polindesa, bukan poliklinik milik swasta

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.2.2. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Tabel 2.50.
Jumlah dan Rasio, Tempat Tidur Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Swasta)	2	2	2	3	3
3.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0

4.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0
5.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	0	0	0	0	0
6.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	1	4	4
7.	Jumlah Penduduk	1.209.375	1.221. 681	1.245.496	1.257.123	1.268.396
8	Rasio RS per 1.000.000 Penduduk	0,82	0,81	0,80	3,18	3,15
9.	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit	272	331	331	331	
10.	Rasio Tempat Tidur RS per Penduduk	0,00023	0,00027	0,00027	0,00027	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2018

2.1.4.1.2.3. Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Dalam Lampiran I :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengolahan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, diatur bahwa rumus untuk menghitung rasio dokter per satuan penduduk, adalah $\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$

Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Kabupaten Magelang belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Kabupaten Magelang.

Untuk mencapai kondisi ideal, sesuai standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, Kabupaten Magelang yang penduduknya mencapai 1.279.849, harusnya tersedia jumlah dokter 512 dokter. Sementara dokter yang ada saat ini hanya 177, sehingga Kabupaten Magelang hanya mampu memenuhi layanan dokter sebesar 34,57 persen.

Sebagai perbandingan, Provinsi Jawa Tengah yang jumlah penduduknya 33.774.140 pada tahun 2015, membutuhkan ketersediaan layanan idealnya 13.510 dokter, namun yang tersedia hanya 8.059 dokter, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hanya mampu memenuhi layanan dokter sebesar 59,65 persen. Data rasio dokter per satuan penduduk, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.51.
Jumlah dan Rasio Dokter Per jumlah Penduduk
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dokter Umum	56	93	88	87	123
2	Dokter Spesialis	36	45	51	51	52
3	Dokter Gigi	34	38	38	39	40
4	Jumlah Dokter (1+2+3)	92	176	177	177	215
5.	Jumlah Penduduk	1.209.375	1.221.681	1.245.496	1.257.123	1.268.396
6.	Rasio per 1000 penduduk (4/5)	0,076	0,144	0,142	0,141	0,169

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang 2018

Distribusi dokter dan dokter tidak merata. Ketersediaanya dokter paling sedikit di Kecamatan Windusari hanya tersedia 2 dokter, untuk melayani 39.486 penduduk, sehingga Rasio Dokter Per seribu Penduduk

adalah 0,051. Artinya, setiap 20.000 penduduk hanya tersedia pelayanan 1 dokter, dengan demikian tingkat ketercukupan pelayanannya adalah 12,66 persen.

Kemudian, ketersediaanya dokter paling sedikit selanjutnya di Ngluwar, Srumbung, Candimulyo, Kaliangkrik, Ngablak hanya tersedia 3 dokter. Sehingga kebutuhan dokter yang tercukupi paling rendah di Kecamatan Kaliangkrik yang tercukupi hanya 12,46 persen, di Kecamatan Windusari hanya 12,6 persen. Ketercukupan pelayanan dokter paling tinggi di Kecamatan Salaman, sebesar 36,32 persen. Data Jumlah, Rasio Dokter dan Ketercukupan Per jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.52.
Jumlah, Rasio Dokter dan Ketercukupan Per jumlah Penduduk
Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	2016				2017			
		Jumlah Penduduk	Jumlah	Rasio permil	Ketercukupan	Jumlah Penduduk	Jumlah	Rasio permil	Ketercukupan
1.	Salaman	68.842	10	0,145	36,32	70,497	6	0,085	
2.	Borobudur	57.193	6	0,105	26,23	59,039	1	0,017	
3.	Ngluwar	32.037	3	0,094	23,41	31,371	1	0,032	
4.	Salaman	46.472	5	0,108	26,90	47,513	3	0,063	
5.	Srumbung	47.171	3	0,064	15,90	49,080	1	0,020	
6.	Dukun	47.035	4	0,085	21,26	46,018	2	0,043	
7.	Muntilan	78.724	8	0,102	25,41	80,161	79	0,986	
8.	Mungkid	64.355	5	0,078	19,42	75,076	3	0,040	
9.	Sawangan	55.507	6	0,108	27,02	57,602	2	0,035	
10.	Candimulyo	47.910	3	0,063	15,65	48,840	1	0,020	
11.	Mertoyudan	115.448	8	0,069	17,32	115,670	2	0,017	
12.	Tempuran	46.203	5	0,108	27,05	49,834	3	0,060	
13.	Kajoran	59.048	6	0,102	25,40	53,285	2	0,038	
14.	Kaliangkrik	60.191	3	0,050	12,46	55,658	2	0,036	
15.	Bandongan	56.127	4	0,071	17,82	58,002	2	0,034	
16.	Windusari	39.486	2	0,051	12,66	50,351	1	0,020	
17.	Secang	74.027	7	0,095	23,64	82,565	2	0,024	
18.	Tegalrejo	48.760	3	0,062	15,38	57,907	1	0,017	
19.	Pakis	53.360	4	0,075	18,74	54,443	2	0,037	
20.	Grabag	143.431	9	0,063	15,69	86,526	4	0,046	
21.	Ngablak	38.522	3	0,078	19,47	38,958	2	0,051	

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.2.4. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk

Rasio Tenaga kesehatan per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Tabel 2.53.
Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Per Jumlah Penduduk
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Tenaga Kesehatan	641	501	508	780	780
2.	Jumlah Penduduk	1.209.375	1.221.681	1.245.482	1.257.123	1.268.396
3.	Rasio	0,05	0,04	0,04	0,062	0,061

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.54.
Jumlah dan Rasio Tenaga kesehatan Per Jumlah Penduduk
Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	2016			2017		
		Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga kesehatan	Rasio %	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga kesehatan	Rasio %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)			
1.	Salaman	68.842	79	0,11	70,497	79	0,11
2.	Borobudur	57.193	46	0,08	59,039	46	0,08
3.	Ngluwar	32.037	22	0,07	31,371	22	0,07
4.	S a l a m	46.472	30	0,06	47,513	30	0,06
5.	Srumbung	47.171	29	0,06	49,080	29	0,06
6.	D u k u n	47.035	17	0,04	46,018	17	0,04
7.	Muntilan	78.724	43	0,05	80,161	43	0,05
8.	Mungkid	64.355	29	0,05	75,076	29	0,04
9.	Sawangan	55.507	38	0,07	57,602	38	0,06
10.	Candimulyo	47.910	30	0,06	48,840	30	0,06
11.	Mertoyudan	115.448	60	0,05	115,670	60	0,05
12.	Tempuran	46.203	29	0,06	49,834	29	0,06
13.	Kajoran	59.048	41	0,07	53,285	41	0,08
14.	Kaliangkrik	60.191	28	0,05	55,658	28	0,05
15.	Bandongan	56.127	28	0,05	58,002	28	0,05
16.	Windusari	39.486	25	0,06	50,351	25	0,05
17.	Secang	74.027	47	0,06	82,565	47	0,06
18.	Tegalrejo	48.760	35	0,07	57,907	35	0,06
19.	Pakis	53.360	29	0,05	54,443	29	0,05
20.	Grabag	143.431	75	0,05	86,526	75	0,09
21.	Ngablak	38.522	20	0,05	38,958	20	0,05
	Total	1.257.123	780	0,06	1.268.396	780	0,06

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Kinerja makro urusan kesehatan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yang mengacu pada SPM bidang kesehatan yaitu:

1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan kunjungan bayi, cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan peserta KB aktif. cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.
2. Pelayanan kesehatan rujukan terdiri dari cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.
3. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB terdiri dari cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dan
4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat cakupan desa siaga aktif.

Tabel 2.55.
Kinerja Makro Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar					
a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	127,68%	134,71%	100%	107,54%
b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,81%	99,87%	99,93%	98,40%	94,6%

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
c. Cakupan kunjungan bayi	96,50%	104,26%	106%	91,90%	94,56%
d. Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%
e. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%
f. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
g. Cakupan peserta KB aktif	79,9%	79,70%	81,24%	82,64%	83,47%
h. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 1. <i>Acute Flacid Paralysisrate</i> (AFP) lebih besar atau sama dengan 2/ 100.000 penduduk dibawah umur 15 tahun 2. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 3. Penemuan pasien baru TB BTA positif 4. Penderita DBD ditangani 5. Penemuan penderita diare	0 12,80% 89,01% 100% 91,54%	1,31 12,80% 28,30% 100% 91,54%	1,67 12,80% 29,00% 100% 91,54%	3,28% 60,38% 49,51% 100% 83%	2,65 100% 40% 100% 100%
i. Cakupan pelayanan kesehat-an dasar masyarakat miskin	62,77%	58,87%	58,87	44,77%	100%
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan					
a. Rasio Rumah Sakit Pemerintah per satuan penduduk	1/ 1.221.6 81 jiwa	1/ 1.221.6 81 jiwa	1/ 1.245.4 82 jiwa	1/1.257 .123 jiwa	1/1.268. 396 jiwa
b. Rasio Puskesmas per satuan penduduk	42,05	42,05	42,05	44,13	43,74
3. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB					
4. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%
5. Cakupan Desa Siaga Aktif	100%	100%	100%	100%	99,73%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.3. PEKERJAAN UMUM

Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana dasar bagi warga masyarakat meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, jaringan irigasi, bendung, penyediaan air bersih, perumahan layak huni dan sebagainya.

Kinerja makro urusan pekerjaan umum antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio permukiman layak huni, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase, sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, drainase dalam kondisi baik, pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan lingkungan permukiman. Data historis pencapaian kinerja pekerjaan umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.56.
Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang jalan Kabupaten (km)	836.84	887.83	887,83	1000,83	1.000,83
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	565.50	579.94	608.34	670.33	736,88
Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (%)	67.58	65.32	68.52	66,98	73,63
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0.96	0.98	0.97	0.075	0,99
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	43.48	43.83	44.08	47,03	50.591
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	708.96	710.010	107.735	111,41	113.083
Luas Jaringan Irigasi	35.693,4 5	35.693,4 5	35.693,4 5	35.693,4 5	35.693,4 5
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	18.549.16	20.025.00	21.268.05	21.344.68	22.499,36
Prosentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	51,96	56,10	59,59	61,22	64,55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2018

Panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Proporsi Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2016 menurun dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan karena panjang jalan Kabupaten sebagai faktor pembagi dalam mencari angka proporsi panjang jalan, mengalami kenaikan dari 887,83 km pada tahun 2015 menjadi 1000,83 km pada tahun 2016 (ditetapkan berdasarkan SK Bupati Nomor 182.182/180/KEP/25/2015 tentang Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten).

2.1.4.1.4. PERUMAHAN

Kinerja makro urusan perumahan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, lingkungan permukiman kumuh dan pembangunan rumah layak huni.

Tabel 2.57.
Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rumah Tangga	336.432	347.126	358.929	381.898	358.573
Rumah tangga pengguna air bersih (%)	66.12	84.79	77.87	80.13	83,69
Rumah tangga pengguna listrik	307.588	322.121	338.013	337.587	369.197
Rumah tangga bersanitasi (%)	70.58	81.31	80.38	80.38	81,42
Lingkungan pemukiman kumuh (%)	2.59	2.59	2.52	2,52	2,24
Rumah layak huni (%)	55.94	53.04	53.13	55.45	56,7

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2018

Pembangunan/peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni dilakukan dengan memberikan bantuan pada keluarga miskin dan/atau masyarakat yang berpenghasilan rendah yang telah memiliki rumah,

namun kondisi rumah tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk dihuni. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di kabupaten Magelang dilaksanakan melalui 3 sumber pendanaan, yaitu melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.

Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang bersumber pada pendanaan APBD Kabupaten dimulai tahun 2011 sebanyak 24 unit, tahun 2012 sebanyak 363 unit dan pada 2013 sebanyak 554 unit, tahun 2014 sebanyak 527 unit, tahun 2015 sebanyak 1.059 unit, tahun 2016 sebanyak 3.412 unit dan tahun 2017 sebanyak 3.693 unit. Melalui APBD Provinsi bantuan dana rehab rumah tidak layak huni telah dilaksanakan sebanyak 10 unit di tahun 2011, 10 unit di tahun 2012, 35 unit di tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebanyak 50 unit. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 Kabupaten Magelang tidak mendapatkan bantuan rehab rumah dari APBD Provinsi. Namun pada tahun 2017, Kabupaten Magelang kembali mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi untuk rehab rumah tidak layak huni sebanyak 388 unit.

Sedangkan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui sumber pendanaan APBN dilaksanakan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat. Peningkatan rumah tidak layak huni melalui BSPS telah dilaksanakan sebanyak 125 unit di tahun 2011, 187 unit di tahun 2012, 744 unit di tahun 2013, 788 unit pada tahun 2014, 1.117 unit tahun 2015 dan 700 unit tahun 2016 serta 813 unit pada tahun 2017.

Melalui ketiga unit sumber pendanaan tersebut di atas, maka sampai dengan tahun 2017 telah direhabilitasi sejumlah 4.894 unit. Sedangkan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 adalah sebanyak 191.550 unit dari 337.246 jumlah rumah diseluruh Kabupaten Magelang (56,70%).

Tabel 2.58.
Tabel Kebutuhan Rumah Menurut Kecamatan Tahun 2016-2017

No	Kecamatan	2016				2017)*			
		Jumlah KK	Jumlah Rumah	Kebutuhan Rumah	Persentase Kebutuhan Rumah (%)	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Kebutuhan Rumah	Persentase Kebutuhan Rumah (%)
1	Salaman	19.854	19.032	822	4,14	20.699	19.032	1.667	8,05
2	Borobudur	18.117	16.940	1.177	6,50	18.457	16.940	1.517	8,22
3	Ngluwar	9.596	9.309	287	2,99	9.727	9.309	418	4,30
4	Salam	13.662	12.755	907	6,64	13.879	12.755	1.124	8,10
5	Srumbung	13.290	13.098	192	1,44	14.476	13.098	1.378	9,52
6	Dukun	13.542	13.790	-248	-1,83	14.014	13.790	224	1,60
7	Muntilan	22.036	22.576	-540	-2,45	22.567	22.576	(9)	-0,04
8	Mungkid	20.570	18.374	2.196	10,68	20.925	19.010	1.915	9,15
9	Sawangan	16.708	15.671	1.037	6,21	16.934	15.671	1.263	7,46
10	Candimulyo	13.324	12.954	370	2,78	13.540	12.954	586	4,33
11	Mertoyudan	31.796	27.557	4.239	13,33	32.488	27.557	4.931	15,18
12	Tempuran	12.989	12.901	88	0,68	13.403	12.901	502	3,75
13	Kajoran	15.143	15.432	-289	-1,91	15.633	15.432	201	1,29
14	Kaliangkrik	14.707	14.075	632	4,30	15.123	14.075	1.048	6,93
15	Bandongan	15.681	15.532	149	0,95	15.990	15.532	458	2,86
16	Windusari	12.619	13.219	-600	-4,75	13.082	13.219	(137)	-1,05
17	Secang	21.415	21.488	-73	-0,34	22.302	21.488	814	3,65
18	Tegalrejo	13.142	13.026	116	0,88	13.675	13.026	649	4,75
19	Pakis	14.012	13.910	102	0,73	15.406	13.910	1.496	9,71
20	Grabag	23.357	23.324	33	0,14	24.290	23.324	966	3,98
21	Ngablak	11.566	11.647	-81	-0,70	11.963	11.647	316	2,64
Jumlah		347.126	336.610	10.516	3,03	358.573	337.246	21.327	5,95

)* : Data sementara, 2018

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Menyesuaikan ketersediaan data kriteria rumah layak huni, dapat digunakan kriteria kesehatan, sehingga untuk memberikan gambaran umum kinerja pelayanan perumahan ini akan disajikan perkembangan rumah sehat.

Rumah dapat dikatakan sehat apabila bahan bangunan lantai, dinding, atap, genteng, ventilasi, cahaya, luas bangunan rumah, dan fasilitas-fasilitas lain memenuhi persyaratan kesehatan. Secara umum rumah dikatakan sehat apabila telah memenuhi kriteria tertentu antara lain bebas jentik nyamuk *aedes aegypti* yang merupakan pembawa penyakit demam berdarah. Nyamuk *aedes aegypti* berkembang biak di tempat-tempat penampungan air bersih yang tidak langsung berhubungan dengan tanah seperti bak mandi/wc, tempat minuman burung, air tendon, air tempayan/gentong, kaleng bekas, dan sebagainya (*Profil Kesehatan Kabupaten Magelang, 2016*). Data Perkembangan Jumlah Rumah Sehat sebagai mana tabel berikut:

Tabel 2.59.
Perkembangan Jumlah Rumah Sehat Tahun 2013 - 2017

No	Tahun	Rumah		
		Jumlah yang Ada	Jumlah Yang Sehat	% Rumah Sehat
1	2013	294.013	168.614	66,30
2	2014	300.395	159.688	65,50
3	2015	301.657	171.361	56,81
4	2016	301.702	171.433	56,82
5	2017	323.290	220.931	68.34

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.5. PENATAAN RUANG

Kinerja urusan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu luas ruang terbuka hijau publik, luas kawasan lindung kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, luas kawasan budidaya, ketersediaan Rencana Rinci/Rencana Detail Tata Ruang, jumlah IMB yang dikeluarkan, luas kawasan industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan serta luas wilayah perkotaan. Dalam tabel berikut disajikan ketersediaan Rencana Rinci/Rencana Detail Tata Ruang.

Tabel 2.60.
Tabel Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang

Nama Dokumen	Tahun Disusun	Cakupan Layanan	Keterangan
RDTR Kecamatan Mertoyudan	2011	Wilayah Kec. Mertoyudan	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Muntilan	2012	Wilayah Kec. Muntilan	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Salam	2012	Wilayah Kec. Salam	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Salaman	2012	Wilayah Kec. Salaman	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Tempuran	2013	Wilayah Kec. Tempuran	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Secang	2013	Wilayah Kec. Secang	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Grabag	2013	Wilayah Kec. Grabag	Belum diperdakan

Nama Dokumen	Tahun Disusun	Cakupan Layanan	Keterangan
RDTR Kecamatan Tegalrejo	2013	Wilayah Kec. Tegalrejo	Belum diperdakan
RTBL Koridor Borobudur	2012	Wilayah SP-1 KSN Borobudur	Belum diperbupkan
RTBL Palbapang-Mendut	2006	Koridor jalan Palbapang-Mendut	Belum diperbupkan
RTBL Blondo Mertoyudan	2006	Koridor sepanjang jalan Mertoyudan-Blondo	Belum diperbupkan
*)RTBL Kecamatan Perkotaan Kecamatan Secang	2014	Koridor Payaman – Perempatan Secang	Belum diperbupkan
*)RTBL Kawasan Perkotaan Kecamatan Mertoyudan	2014	Kawasan Pakelan	Belum diperbupkan
*)RTBL Kecamatan Mertoyudan	2016	Koridor Tanjung – Pakelan	Belum diperbupkan
*)RTBL Kecamatan Mertoyudan	2017	Koridor Jl. Bambang Sugeng - Blondo	Belum diperbupkan
*)RTBL Candi Pawon	2017	Kawasan Candi Pawon	Belum diperbupkan
*)RTBL Candi Mendut	2017	Kawasan Candi Mendut	Belum diperbupkan

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Pada saat ini ruang terbuka hijau masih tersedia cukup luas. Lahan pertanian sawah terdapat 36.974 ha, lahan kering perkebunan 41.923 ha, Sedangkan untuk ruang terbuka hijau publik yang sudah dimiliki dan tersebar di kawasan perkotaan luasnya mencapai 20,6 ha. Kinerja makro urusan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.61.

Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Luas Ruang Terbuka Hijau Publik per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (ha)	20.6	20.6	4.11	4.11	31
Jumlah IMB yang dikeluarkan (buah)	461	429	594	384	577

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang. Selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62.

Kinerja Makro Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2014 – 2019 telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD tahun 2014-2019 merupakan indikator kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2017 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 176 program dan seluruhnya sesuai dengan program RPJMD. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.63.
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	177	182	184	176	185
Jumlah Program RKPD	177	182	184	176	161
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang 2018

2.1.4.1.7. PERHUBUNGAN

Transportasi memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas penduduk maupun barang. Sarana transportasi berupa moda angkutan umum maupun kendaraan pribadi dapat menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten. Permasalahan pada pelayanan umum urusan perhubungan yaitu terjadinya fenomena penurunan *load factor* penumpang pada penggunaan angkutan umum dan terjadi kecenderungan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi.

Selaras dengan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2011-2035, dalam penyelenggaraan layanan sektor transportasi, aspek keselamatan lalu lintas angkutan jalan perlu mendapat perhatian utama tanpa mengesampingkan aspek keamanan, ketertiban dan kelancaran.

Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas angkutan jalan dilakukan upaya-upaya melengkapi prasarana jalan dengan fasilitas keselamatan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas serta pagar

pengaman jalan (*guard rail*) disamping meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Selain itu untuk mendukung aspek keselamatan pula. Pada tempat-tempat berkumpulnya angkutan umum pedesaan, diperlukan pembangunan terminal *origin destination* (OD).

Kinerja urusan perhubungan sebagaimana tersebut antara lain dapat dilihat dari data yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan pagar pengaman jalan, jumlah uji kendaraan bermotor dan pembangunan terminal angkutan umum. Dari data historis diketahui bahwa kinerja makro urusan perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64.
Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas (%)	61,53	64,80	32,84	61,24	106,38
Persentase Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (%)	28,75	28,22	20,51	78,39	78,39
Jumlah Terminal Bus (buah)	6	6	6	7	6
Persentase Uji Kendaraan Bermotor (%)	93,69	96,01	97,50	97,32	98,39

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2018

Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas selama tiga tahun (2013-2017) mengalami kenaikan, namun turun pada tahun 2015 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas ini adalah dalam upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana jalan di wilayah Kabupaten Magelang, agar supaya keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan dapat terlayani secara optimal.

Dengan semakin bertambahnya kendaraan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor maka persentase uji kendaraan bermotor cenderung naik selama lima tahun.

2.1.4.1.8. LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja urusan lingkungan hidup antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase penanganan sampah, persentase luas pemukiman yang tertata, dan tempat pembuangan sampah per satuan penduduk, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air, jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara, persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan dan jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Dari data historis diketahui bahwa kinerja makro urusan lingkungan hidup selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65.
Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase penanganan sampah (%)	18	21,1	23,81	25,62	28,14
Persentase penduduk berakses air	66,12	84,79	77,87	80,13	83,69

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
minum (%)					
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	0,94	0,98	0,97	0,98	1,04
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	100	100	100	100	100
Jumlah usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (%)	100	100	100	100	100
Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (%)	0.20	20.57	40	58,03	82,81
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti (%)	100	166.67	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang. 2018

Pelayanan persampahan baru mampu menjangkau wilayah di 10 (sepuluh) ibu kota kecamatan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan. Penetapan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa di Kabupaten Magelang. Target selama kurun waktu sampai dengan 2019 seluas 25.176.477 ha (lahan untuk produksi biomassa yang memiliki potensi kerusakan tanah sangat tinggi (PR V) dan potensi kerusakan tanah tinggi (PR IV). sampai dengan tahun 2016 telah ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa seluas 14.651.919 ha dari target pada PR V dan PV IV seluas 25.246.399 ha atau 58%.

Sementara itu dari sisi jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan telah tercapai 100% pada Tahun 2013 dan tetap menjadi 100% pada tahun 2017. Begitu juga dengan persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan meningkat, yaitu 0,20 pada tahun 2013 menjadi 82,81 pada tahun 2017. Sedangkan jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti pada tahun 2012 mencapai 100% dan stabil 100% pada tahun 2017.

2.1.4.1.9. PERTANAHAN

Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan hak atas tanah maka kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum tentang pemilikan hak atas tanah cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan makin bertambahnya jumlah tanah yang bersertifikat. Adapun jumlah tanah bersertifikat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.66.
Jumlah Tanah Bersertifikat Tanah Tahun 2013-2017

Tanah Bersertifikat	Jumlah Tanah Bersertifikat				2017
	2013	2014	2015	2016	
Hak Milik	352.365	367.807	375.586	380.322	
Hak Guna Bangunan	4.925	5.566	6.438	7.829	

Tanah Bersertifikat	Jumlah Tanah Bersertifikat				2017
	2013	2014	2015	2016	
Hak Guna Usaha	1	31	31	31	
Hak Pakai	1.689	1.758	1.861	1.934	
Hak Pengelola	9	9	9	10	
Jumlah	358.989	375.171	383.925	390.126	

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, 2018

Sementara itu jumlah penerbitan sertifikat di Kabupaten Magelang dilihat pada Tabel 2.67 berikut :

Tabel 2.67.
Jumlah Penerbitan Sertifikat Tanah Tahun 2013-2017

Tanah Bersertifikat	Jumlah Penerbitan Sertifikat			
	2013	2014	2015	2016
Hak Milik	17.401	7.727	7.779	4.736
Hak Guna Bangunan	279	827	872	1.391
Hak Guna Usaha	22	1	-	-
Hak Pakai	12	58	103	73
Hak Pengelola	-	-	-	1
Jumlah	17.714	8.634	8.754	6.201

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, 2017

Kinerja makro urusan pertanahan antara lain bisa dilihat dari indikator penyelesaian izin lokasi. Dari data historis kinerja makro urusan pertanahan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.68.
Kinerja Makro Urusan Pertanahan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Persentase luas lahan bersertifikat (%)	33,55	51,38	51,80	52,10
Penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	100	100	100
Penyelesaian izin lokasi (%)	80	90,57	122,73	N/A

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, 2017

2.1.4.1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk. Data historis indikator urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.69.
Kinerja Makro Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	86,93	93,91	88,62	94,90	96,62
Rasio bayi berakte kelahiran (%)	71,5	91,40	61	87,43	98,26
Rasio pasangan berakte nikah	1,62	204*	221*	265*	

*Angka absolut

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang, 2018

Pasangan yang mencatatkan pernikahannya di catatan sipil adalah pasangan yang beragama non muslim, yang kemudian diterbitkan Akta nikah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Sedangkan pasangan yang beragama islam, memcatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan diterbitkan surat nikah.

2.1.4.1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan untuk menuju kesetaraan gender.

Pada tahun 2017, jumlah pekerja perempuan di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang sebanyak 5.304 jika dibandingkan dengan jumlah PNS di Kabupaten Magelang persentasenya sebesar 57,48%. Namun jika dirinci menurut status jabatan maka persentasi perempuan sangat rendah. Pada eselon II presentase perempuan hanya 17,29 persen; pada eselon III sebesar 20 persen; dan pada eselon IV sebesar 34 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Pada tahun 2016, jumlah pekerja perempuan di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang sebanyak 5.415 orang. Namun jika dirinci menurut status jabatan maka persentase perempuan sangat rendah. Pada eselon II presentase perempuan hanya 17,24 persen; pada eselon III sebesar 37 persen; dan pada eselon IV sebesar 22,29 persen. Jika diperhitungkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan secara keseluruhan maka Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten pada tahun 2016 hanya sebesar 1,88 persen. menurun jika dibandingkan dengan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten pada tahun 2015 yang mencapai 2,14 persen. Penurunan ini disebabkan karena adanya PNS yang pensiun, dan kebijakan moratorium PNS oleh pemerintah Pusat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70.
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Jabatan eselon II				
1.1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	5	5	5
1.2	Jumlah jabatan eselon II	29	29	29	29
1.3	Persentase perempuan yang menempati jabatan eselon II	10,34	17,29	17,29	17,29
2	Jabatan eselon III				
2.1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	28	32	30	37
2.2	Jumlah jabatan eselon III	160	160	160	166
2.3	Persentase perempuan yang menempati jabatan eselon III	17,50	20,00	18,75	22,29
3	Jabatan eselon IV				
3.1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	234	229	218	231
3.2	Jumlah jabatan eselon IV	648	648	648	579
3.3	Persentase perempuan yang menempati jabatan eselon IV	26,11	35,39	33,64	38,89
4	Jumlah Pekerja Perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kab.Magelang	5.877	5.926	5.415	5.304
4.1	Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kab.Magelang	10.605	10.772	9.629	9.228
4.2	Persentase perempuan pegawai di lingkungan	55,42	55,01	56,24	57,48

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
	Pemerintah Kab.Magelang				
5	Jumlah Pekerja Perempuan	275.073	276.997	279.504	281.958
6	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten (%) $(4/5)*100$	2,14	2,14	1,94	1,88

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah dan Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2018

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan mulai tahun 2014. Peningkatan terbesar pada tahun 2015 ke 2016 yaitu dari 62,47% menjadi 62,73%. Walaupun secara umum peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan relatif kecil, namun jumlah angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan yang cukup besar. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Magelang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	273.886	275.073	276.997	279.504	281.958
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan	440.727	441.508	443.442	445.599	448.487
3	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	62.14	62.30	62.47	62,73	62,87

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.72.
KDRT di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Tangga	326.748	331.578	334.590	390.618	404.777
2	Jumlah KDRT	52	33	36	37	70
3	Rasio KDRT (%) $(2/1)*100$	0,016	0,001	0,011	0,009	0,017

Sumber: Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

Jumlah kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 36 kasus pada tahun 2015, 37 kasus pada tahun 2016 dan 70 kasus pada tahun 2017. Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT yang dilaporkan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang kekerasan khususnya kekerasan yang terjadi di ranah rumah tangga pada umumnya. Jenis kasus KDRT meliputi:

- Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d. Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian maka wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010. minimal layanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah: pengaduan, medis, rumah aman, pendampingan psikososial. rehabilitasi sosial (pelatihan ketrampilan dan bimbingan rohani), pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah mampu melakukan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, berupa konsultasi serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *out reach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan ketrampilan) dan pemberdayaan (bimbingan rohani, pemberian ketrampilan serta pendampingan pemulangan, *shelter* (Rumah Aman). Akan tetapi shelter yang ada masih menggunakan shelter milik Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Kabupaten Magelang sampai saat ini belum memiliki shelter sendiri.

Banyaknya kasus yang dalam perjalanannya dicabut oleh pelapor yang sekaligus juga korban, lebih karena banyaknya beban gender perempuan korban yang seringkali harus ditanggung sendiri, kuatnya budaya patriarkhi, doktrin agama dan adat menempatkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam situasi yang sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya dan cenderung ragu untuk mengungkapkan fakta kekerasannya. Bahkan korban sulit mendapat dukungan dari keluarga maupun komunitas.

Kepedulian Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *trafficking* (perdagangan orang).

Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan sebanyak 99 kasus pada tahun 2015, 113 kasus pada tahun 2016 dan 87 kasus pada tahun 2017. Prosentase penyelesaian pengaduan, dari tahun ke tahun mencapai 100% terkecuali di tahun 2017. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73.
 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
 dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Magelang
 Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	120	82	99	113	116
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	120	82	99	113	87
3	Persentase Penyelesaian Pengaduan (%) $(2/1)*100$	100	100	100	100	75

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

Atas komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan pengarusutamaan *gender* dalam pembangunan nasional, Kabupaten Magelang berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Madya pada tahun 2015. Prestasi ini merupakan peningkatan dari pencapaian 2012 yang meraih predikat Pratama.

Data historis kinerja makro urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disajikan dalam table berikut.

Tabel 2.74.
 Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun
 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	2,44	2,44	2,14	1,94	
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	33,6	41,28	33,96	34,79	
Persentase keterlibatan perempuan di legislative (%)	12	14	14	14	8
Indeks Pembangunan Perempuan (IPG)	92,20	92,79	92,91	92,91*	
Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	58,77	65,54	68,53	68,53*	
Jumlah Anak dengan Disabilitas (anak)	2.295	1.166	1.167	1.130	1.130
Jumlah Anak Terlantar (anak)	1.263	2.319	2.309	1.923	2.092
Jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)(anak)	194	99	90	3	9
Jumlah Anak PMKS (anak)	3.776	2.313	2.313	3.243	3.258
Jumlah Kekerasan terhadap Anak (anak)	45	30	54	5	46
Rasio KDRT	0,03	0,01	0,01	0,009	0,017
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	75

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase keterlibatan perempuan di lembaga pemerintahan cenderung menurun. Hal ini disebabkan adanya pegawai yang purna tugas dan mutasi pegawai antar daerah. Peran perempuan di lembaga swasta cenderung turun dari tahun 2013 s/d 2015 namun ada sedikit kenaikan pada tahun 2016. Keterlibatan perempuan di legislatif menunjukkan angka yang tetap dari tahun ke tahun ini disebabkan selama periode waktu tersebut masa bakti anggota Dewan yang perempuan tidak ada pergantian antar waktu (PAW). Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Ini disebabkan adanya sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, dimana sebagian besar perempuan di Kabupaten Magelang adalah bekerja di sektor informal sebagai petani yang tidak terdata secara jelas.

Angka kekerasan terhadap anak menunjukkan angka yang tinggi ini disebabkan masih kuatnya budaya patriarki. Budaya *assertive* pada anak rendah, dan kebijakan perlindungan anak masih bersifat sektoral. Media hiburan yang tidak mendidik juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh disamping kurangnya promosi kebijakan dan kepedulian para pengambil kebijakan terhadap kerentanan anak.

Data penyandang masalah sosial anak di Kabupaten Magelang masih tinggi namun dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang turun. Tingginya jumlah anak PMKS ini antara lain disebabkan belum optimalnya penanganan anak PMKS karena beberapa masalah diantaranya belum adanya petugas/pekerja sosial yang akan mendampingi pola penanganan berbasis keluarga. Adapun penurunan jumlah anak PMKS dikarenakan perhatian yang lebih serius dari pemerintah Kabupaten Magelang terhadap anak PMKS. Salah satu pola penanganan PMKS adalah dengan berbasis panti. Namun ada permasalahan di Kabupaten Magelang dalam penanganan PMKS ini, yaitu pemerintah Kabupaten Magelang belum mempunyai panti/LKSA.

2.1.4.1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan serta kehidupan masyarakat untuk lebih maju dan mandiri. Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Magelang telah mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB baik sebagai akseptor KB maupun Peserta Program KB aktif. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75.
Rasio Akseptor KB di Kabupaten Magelang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	222.953	219.756	222.953	225.057	227.752
2	Jumlah Akseptor KB	173.749	169.848	173.749	179.528	181.542
3	Persentase Akseptor KB (%)	77,99	77,29	77,93	79,77	79,71

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018.

Kinerja makro urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah anak per keluarga, rasio akseptor KB, cakupan peserta KB aktif, rasio *Drop out* KB (DO KB), rasio *Total Fertility Rate* (TFR) dan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.

Tabel 2.76.
Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,6	1,73	1,31	1,27	1,13
Rasio akseptor KB	75,2	77,29	77,93	79,77	79,71
Rasio <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,35	2,35	2,51	2,51	2,31
Rasio <i>Drop Out</i> (DO) KB	17,85	7,18	5,14	5,97	7,91
Keluarga Pra Sejahtera	93.256	92.743	91.815	91.106	90.389
Keluarga Sejahtera I (KK)	60.528	63.778	64.327	66.341	66.341
Keluarga Sejahtera II (KK)	71.100	72.274	75.526	77.877	80.136
Keluarga Sejahtera III (KK)	103.436	104.423	121.328	131.821	141.283
Keluarga Sejahtera III Plus (KK)	19.822	20.902	22.164	23.473	26.628

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.13. SOSIAL

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Data historis kinerja makro urusan social disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.77.
Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sarana sosial seperti panti asuhan*. Panti jompo dan panti rehabilitasi (buah)	33	39	39	39	39
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	50	890	3.080	40.016	38.001
PMKS yang tertangani (orang)	45	890	3.290	40.253	38.001

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018.

2.1.4.1.13.1.Sarana sosial

Penanganan PMKS tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Namun hingga sekarang Pemerintah Kabupaten Magelang belum memiliki sarana sosial. Satu-satunya lembaga sosial milik pemerintah adalah Panti Sosial Mardi Putra ANTASENA yang berada di bawah Kementerian Sosial.

2.1.4.1.13.2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Pendekatan penanganan PMKS dilakukan melalui 4 (empat) pilar yakni perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Melalui pendekatan ini tidak semua penanganan PMKS bermuara pada bantuan. Namun disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan kondisi masing-masing PMKS. Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial. Dalam kurun waktu Tahun 2013-2016 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan mengalami kenaikan secara signifikan yaitu dari 50 orang menjadi 40.016 di tahun 2016 dan 38.001 orang di tahun 2017.

2.1.4.1.13.3. PMKS yang Tertangani

Penanganan PMKS kurun waktu Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2013-2017

Jenis Masalah Kesejahteraan Sosial	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lanjut usia terlanter (orang)	3.731	4.592	4.592	4.500	4.500
Anak terlanter (anak)	1.263	2.313	2.313	1.919	2.092
Penyandang cacat (orang)	4.283	4.287	7.556	7.879	7.879
Tuna susila (orang)	15	40	20	11	11
Gelandangan dan pengemis (orang)	133	101	23	103	103
Bekas narapidana (orang)	294	228	228	216	216

Sumber: Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018.

2.1.4.1.14. KETENAGAKERJAAN

Indikator ketenagakerjaan mencerminkan kesehatan ekonomi atau siklus bisnis secara keseluruhan. Indikator kinerja makro urusan ketenagakerjaan ditunjukkan dari angka partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, pencari kerja yang ditempatkan, jumlah kasus dan status penyelesaian hubungan industrial.

2.1.4.1.14.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Magelang pada Tahun 2013–2017 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini diikuti dengan peningkatan TPAK. Peningkatan TPAK perlu diikuti dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja atau diarahkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah angkatan kerja dan TPAK sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79.
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Jumlah Penduduk usia kerja (orang)	TPAK (%)
1.	2013	660.111	883.697	74,70
2.	2014	666.331	889.123	74,94
3.	2015	672.063	894.416	75,14
4.	2016	677.909	899.809	75,34
5.	2017	683.144	905.346	75,46

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Magelang, 2018

2.1.4.1.14.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah penganggur dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Magelang selama periode Tahun 2013–2017 angkanya fluktuatif. Hal ini disebabkan angkatan kerja yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga angkatan kerja kurang terserap di pasar kerja. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80.
Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun 2013–2017

No	Tahun	Jumlah Penganggur (orang)	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	TPT (%)
1.	2013	30.252	660.111	4,58
2.	2014	27.067	666.331	4,06
3.	2015	25.855	672.063	3,85
4.	2016	23.837	677.909	3,52
5.	2017	21.942	683.144	3,21

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Magelang, 2018

2.1.4.1.14.3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Gambaran pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2014 tercatat sebanyak 634 orang dari 3.179 pencari kerja yang terdaftar atau sebesar 19,94%. Pada Tahun 2016 sebanyak 1.442 orang pencari kerja ditempatkan dari 3.573 pencari kerja yang terdaftar (40,36%) dan pada tahun 2017 prosentase pencari kerja yang ditempatkan naik menjadi 43,31.

Data perkembangan pencari kerja yang terdaftar meningkat. Pencari kerja yang ditempatkan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.81.
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2013–2017

No	Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar (orang)	Pencari Kerja yang Ditempatkan (orang)	Persentase
1.	2013	17.272	1.252	7,25
2.	2014	4.141	672	16,23
3.	2015	3.179	634	19,94
4.	2016	3.573	1.442	40,36
5.	2017	4.038	1.749	43,31

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Magelang, 2018

2.1.4.1.14.4. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Pencapaian rasio Upah Minimum Kabupate n (UMK dibandingkan KHL di Kabupaten Magelang selama periode Tahun 2013–2017 terus mengalami peningkatan. sehingga setara dengan KHL, yang mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah mencapai kebutuhan hidup layak. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82.
Rasio Rata-Rata UMK dibanding KHL
Kabupaten Magelang Tahun 2013–2017

No	Tahun	UMK (Rp/bln/org)	KHL (Rp/bln/org)	Rasio (%)
1.	2013	942.000	942.856	99,91
2.	2014	1.152.000	1.152.000	100,00
3.	2015	1.255.000	1.254.849	100,00
4.	2016	1.570.000	1.254.849-
5.	2017	1.742.000	1.254.849-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Magelang, 2018

Pada tahun 2015, sesuai hasil survey, KHL Kabupaten Magelang Rp.1.254.849,. Menurut Permenaker Nomor 12 tahun 2013 mengamanatkan penentuan UMK berdasarkan hasil survey KHL diganti dengan PP Nomor 78 tahun 2015 yang mengamanatkan UMK ditentukan berdasarkan inflasi, dan berlaku dalam kurun waktu 5 tahun. Survey KHL Kabupaten Magelang akan dilaksanakan lagi pada tahun 2018.

2.1.4.1.14.5. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang Bekerja)

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja (yang bekerja) selama periode Tahun 2013–2014 mula-mula mengalami penurunan dan Tahun 2014–2015 mengalami kenaikan yang mengindikasikan semakin meningkatnya pekerja non formal. Namun pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2015. Perkembangan capaian proporsi tenaga kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83.

Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap
Total Kesempatan Kerja (yang Bekerja) Tahun 2013–2017

No	Tahun	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	Berusaha Sendiri (orang)	Kesempatan Kerja (orang)
1.	2013	14,06	96.900	689.192
2.	2014	12,90	82.492	639.267
3.	2015	12,77	82.536	646.208
4.	2016	12,65	82.753	654.072
5.	2017	12,53	82.831	661.202

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Magelang, 2018

2.1.4.1.14.6. Tingkat Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

Kasus Hubungan Industrial (HI) yaitu sengketa jumlah pekerja dengan pengusaha dibagi jumlah perusahaan selama periode Tahun 2013–2017 menunjukkan jumlah yang fluktuatif, tertinggi pada Tahun 2016 sebesar 11 kasus dan terendah pada Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kasus. Namun semua kasus tersebut dapat terselesaikan 100%. Data selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.84.

Tingkat Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Tahun 2013–2017

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Kasus	Status
1.	2013	390	3	100% (terselesaikan)
2.	2014	407	6	100% (terselesaikan)

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Kasus	Status
3.	2015	341	2	100% (terselesaikan)
4.	2016	372	11	100% (terselesaikan)
5.	2017	372	5	100% (terselesaikan)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Magelang, 2018

2.1.4.1.14.7. Jumlah Kepesertaan Jamsostek dalam Hubungan Industrial

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode Tahun 2014–2016 mengalami penurunan. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85.

Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek Tahun 2013–2017

No	Tahun	Jumlah Perusahaan (buah)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1.	2013	390	24.141
2.	2014	404	24.131
3.	2015	341	11.801
4.	2016	372	13.143
5.	2017	372	13.143

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Magelang, 2018

2.1.5.1.15. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jumlah koperasi sampai dengan tahun 2016 adalah mencapai 587 atau meningkat 1,19 % dengan tahun 2015 sebanyak 580 Unit. Perkembangan jumlah koperasi secara kuantitas diikuti dengan perbaikan kualitas pengelolaan oleh pengurus-pengurus koperasi yang ada. dimana hal tersebut tercermin dari jumlah koperasi aktif di tahun 2016 yang mencapai 80,41%, sedangkan jumlah koperasi aktif pada tahun 2015 hanya mencapai 82,75 %. Secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.86.

Kinerja Makro Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase koperasi aktif (%)	74,78	78,25	82,75	80,41	82,76
Jumlah koperasi (buah)	576	570	580	587	
Jumlah koperasi aktif (buah)	445	446	480	472	
Jumlah koperasi tidak aktif (buah)	131	24	100	115	
Jumlah koperasi sehat/berkualitas (buah)	101	163	208	212	
Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM (buah)	106.136	106.403	106.650	106.200	106.200
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina (%)	0,415	0,396	1,2	1,6	20,56

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Magelang, 2018

Pada Tahun 2015, jumlah UMKM di Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 106.412 UMKM yang terdiri dari 105.896 usaha mikro, 304 usaha kecil dan 212 usaha menengah. Sedangkan pada tahun 2016, jumlah UMKM di Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 106.515

UMKM. Perkembangan jumlah UMKM dari tahun 2013 s/d 2016 bersifat fluktuatif, dikarenakan adanya perubahan situasi perekonomian yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya UMKM.

Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki ijin dan untuk usaha mikro yang tercatat merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki ijin maupun yang masih belum memiliki ijin. Secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.87.
Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Magelang
Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Seluruh UMKM	106.403	106.650	106.412	106.515	106.515
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	106.190	106.437	106.200	106.200	108.275
Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99.8	99.8	99.8	99,71	101.,65

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Magelang, 2018

2.1.4.1.16. PENANAMAN MODAL

Penanaman modal atau investasi didefinisikan sebagai bentuk pengeluaran, baik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan, untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan dalam memproduksi barang maupun jasa yang berlanjut dengan suatu proses produksi. Dengan demikian investasi akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi barang atau jasa untuk di pasarkan kepada konsumen, serta menyebabkan adanya interaksi antara produsen (dalam hal ini investor) dan konsumen sehingga pada giliranya akan menciptakan kemajuan perekonomian.

Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang di timbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portfolio investment*). Jumlah proyek PMDN dan PMA Kabupaten Magelang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88.
Jumlah Proyek PMDN dan PMA Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PMDN	687	820	594	517	730
Jumlah Nilai PMA	-	1	-	1	-
Total	687	821	594	518	730

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Magelang, 2018

Tabel 2.89.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN dan PMA
Tahun 2013–2017

	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persetujuan	687	821	594	518	730
1.1	Jumlah Proyek	687	821	594	518	730
1.2	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	368.528	374.769	476.281	490.940	1.030.689
1.3	(USD Juta)					
2	Realisasi	687	821	594	518	730
2.1	Jumlah Proyek	687	821	594	518	730
2.2	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	368.528	374.769	476.281	490.490	1.030.689
2.3	(USD Juta)					

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Magelang, 2018

Investasi/penanaman modal langsung berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru. Berikut ini rasio daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung pada tabel berikut.

Tabel 2.90.
Jumlah Investasi PMDN dan PMA Tahun 2013–2017

	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Proyek PMA dan PMDN	687	821	594	518	730
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	9.064	9.890	4.455	7.583	8.297
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	13,19	1,20	7,50	14.64	11,37

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Magelang 2018

Berdasarkan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN tahun 2016 terdapat 518 proyek PMA dan PMDN yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7.583 orang, sehingga didapatkan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 14,64. Pada tahun 2017, jumlah proyek PMA dan PMDM lebih besar dari tahun 2016 yaitu sebesar 730, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap naik menjadi 8.297 tetapi rasio daya serap turun menjadi 11,37. Hal ini disebabkan sebagian PMA dan PMDN di tahun 2016 bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kinerja makro urusan penanaman modal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91.
Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	429	821	594	518	730
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta US \$)	368.528	374.769	476.281	490.940	1.030.689
Rasio daya serap tenaga kerja (%)	13,19	14,39	7,50	14.64	11,37
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	9.064	9.890	4.455	7.583	8.297
Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	780	6.241	88.46	14.709	539.750

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Magelang. 2018

2.1.4.1.17. KEBUDAYAAN

Kinerja makro urusan kebudayaan antara lain penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta benda serta situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Data historis kinerja makro urusan kebudayaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92.
Kinerja Makro Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	36	54	44	81	38
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	18	25	25	25	27
Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	600	681	681	681	683

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kinerja makro urusan pemuda dan olahraga antara lain jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olah raga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olah raga, jumlah gelanggang/balai remaja dan jumlah lapangan olah raga. Data historis kinerja makro Makro Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2013-2017. Disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.93.
Kinerja Makro Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah organisasi pemuda (buah)	21	14	24	26	26
Jumlah organisasi olah raga (buah)	28	28	34	22	29
Jumlah kegiatan kepemudaan (buah)	17	17	17	17	17
Jumlah kegiatan olah raga (buah)	23	23	23	24	24
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0	0	0
Lapangan olah raga (buah)	253	253	253	253	253

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang 2018

2.1.4.1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Kinerja makro urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012 disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut orkemas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi

Kepemudaan (OKP) merupakan bagian dari Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas). Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan pendataan dan pendaftaran ulang keberadaannya, sehingga nantinya seluruh Orkemas yang mendaftar dan memenuhi persyaratan akan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Jadi tiap organisasi kemasyarakatan (orkemas) di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Selanjutnya, Orkemas akan mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari lembaga yang berwenang.

Bagi Orkemas yang telah mendapat SKT mendapatkan pembinaan dan pengawasan, dan bagi Orkemas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 akan dibekukan SKT-nya.

Disamping melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Kab. Magelang juga telah melakukan pembinaan terhadap organisasi politik. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan politik bagi masyarakat khususnya anggota organisasi politik. Data historis kinerja makro urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selama rentang waktu 5 tahun terakhir, antara tahun 2013-2017 selengkapnya disajikan tabel berikut ini:

Tabel 2.94.
Kinerja Makro Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	12	12	5	9	12
Kegiatan pembinaan politik daerah	12	3	2	6	7

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, 2018

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa capaian indikator kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di tahun 2017 sebanyak 12 kegiatan pembinaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang sudah biasa dilaksanakan setiap tahun. banyak LSM, Ormas dan OKP yang mendaftar untuk mendapatkan SK Terdaftar sebagai Ormas. Hal yang perlu untuk mendapatkan penekanan terhadap kedua indikator diatas adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap ormas yang telah dilakukan pembinaan.

Dari aspek politik dan demokrasi, kondisi politik di Kabupaten Magelang dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Tingkat persentase pemilih dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 sebesar 64,96%; serta Pileg DPR/DPRD dan Pilpres Tahun 2009 dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 79,93% dan 79,50%. Pada tahun 2013, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sebesar 71,15%. Sedangkan pada Pileg DPR/DPRD dan Pilpres tahun 2014 dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 83% dan 81%. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah pada tahun 2017

meningkat menjadi 7 kegiatan dari tahun 2015 sebanyak 2 kegiatan dan tahun 2016 sebanyak 6 kegiatan.

2.1.4.1.20. OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

2.1.4.1.20.1. Penegakan Perda

Salah satu komponen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Salah satu cara yang dibutuhkan dalam keberhasilan penegakan perda adalah tersedianya jumlah satuan polisi pamong praja yang memadai. Jumlah polisi pamong praja pada tahun 2015 sebanyak 53 orang, tahun 2016 sebanyak 52 orang dan tahun 2016 menjadi 50. Dengan jumlah penduduk 1.268.396 orang pada tahun 2017, maka rasio jumlah polisi pamong praja pada tahun 2017 sebesar 0,39. Secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.95.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Polisi Pamong Praja	55	55	53	52	50
Jumlah Penduduk	1.221.681	1.233.695	1.245.496	1.257.123	1.268.396
Rasio Jumlah Polisi Pamong per 10.000 penduduk	0,45	0,45	0,43	0,41	0,39

Sumber: Satpol PP dan Penamggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang 2018

Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda/K3.

Tabel 2.96.
Cakupan Patroli Petugas Polisi Pamong Praja Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3	9	9	300*	305	449

*Patroli gabungan dengan TNI dan Polri

Sumber: Satpol PP dan Penangggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2018

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Dari Hasil pemantauan dan penertiban dapat diketahui jumlah pelanggaran perda/K3.

Pada tahun 2017 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) adalah 80,45%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97.
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	152	200	3.141	216	251
2	Jumlah Pelanggaran K3	189	200	3.141	216	312
3	% penyelesaian pelanggaran K3	80,42	100	100	100	80,45

Sumber: Satpol PP dan Penamggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2018

Anggota Linmas di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 berjumlah sebanyak 11.579 orang. Dengan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 1.268.396 orang, maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 90 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98.
Rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 orang penduduk
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Linmas	11.475	11.475	11.461	11.464	11.579
2	Jumlah Penduduk	1.221.681	1.233.695	1.245.496	1.257.123	1.268.396
3	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	93,93	93,01	92,02	91,19	91,28

Sumber: Satpol PP dan Penangggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2018

Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun maka perlu peningkatan kemampuan tenaga Linmas. Peningkatan kemampuan linmas dilakukan setiap tahun melalui berbagai upaya salah satunya adalah pelatihan tentang penanggulangan bencana. Sehingga bila sewaktu-waktu terjadi bencana dapat melakukan tindakan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing. Semakin besar persentase jumlah petugas perlindungan masyarakat terhadap jumlah penduduk, maka semakin besar ketersediaan petugas perlindungan masyarakat yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.1.4.1.20.2. Pelayanan Perijinan

Kebutuhan pelayanan perijinan menjadi hal yang penting pada era reformasi ini. Orang menuntut perubahan dalam kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dan memadai. Data pelayanan perijinan di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.99.
Data Pelayanan Perijinan

No.	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8
1.	Pendaftaran Penanaman Modal	-	0	0	0	0

No.	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8
2.	Izin Prinsip Penanaman Modal	31	0	0	0	0
3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	-	0	0	0	0
4.	Izin Prinsip Perub Pen Modal	-	0	0	0	0
5.	Izin Usaha Perdagangan	611	683	717	673	506
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	637	706	769	739	602
7.	Izin Usaha Industri (IUI)	12	13	10	11	21
8.	Izin Perluasan Industri	-		0	0	0
9.	Tanda Daftar Industri (TDI)	32	30	34	31	13
10.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	28	157	0	56	82
11.	Izin Usaha Penggilingan Padi	14	7	0	6	5
12.	Izin Usaha Angkutan Jalan	22	11	0	22	5
13.	Izin Usaha Jasa Pariwisata	68	43	0	63	65
14.	Izin Pembudidayaan dan Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan atau Walet	-		0	0	0
15.	Izin Usaha Peternakan	0		0	0	1
16.	Izin Usaha Perikanan	-		0	0	0
17.	Izin Usaha Pertambangan (rekomendasi)	-		0	14	0
18.	Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Kapasitas Produksi S/d 2000 M3 per tahun	-		0	0	0
19.	Izin Usaha Perluasan	-		0	0	0
20.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)	-		0	0	0
21.	Izin Usaha Perubahan	-		0	0	0
22.	Izin Lokasi	5	93	31	3	3
23.	Izin Pemanfaatan Tanah	-		14	8	8
24.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	-		67	39	65
25.	Izin Gangguan & Izin Tempat Usaha	795	878	914	801	648
26.	Izin Mendirikan/ Mengubah/ Merobohkan Bangunan (IMB)	461	429	594	1.101	573
27.	Izin Pemakaman dan Perabuan			0	-	0
28.	Izin Pemasangan Reklame	275	252	303	255	259
29.	Izin Trayek	0	0	0	-	0
30.	Dokumen AMDAL. UKL/UPL/ dan SPPL	0	0	0	-	0
31.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan	0	0	0	-	0
32.	Izin Riset/ Penelitian	349	394	381	459	476
33.	Izin Rumah Potong Hewan	0	0	0	-	0
34.	Izin Air Tanah	0	0	0	-	0
35.	Izin Jagal	0	0	0	-	0
36.	Izin Ketenagakerjaan	0	0	0	-	0
37.	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	0	0	0	-	0
38.	Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah	0	0	0	0	0
39.	Izin Penggunaan Alat Berat	0	0	0	0	0
40.	Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDPLK)	0	0	0	0	0
	Jumlah	3.340	3.696	4.060	4.295	3.332

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2018.

Prosentase pertambangan berijin sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 16,22%. Luas pertambangan sampai dengan tahun 2016 sebesar 1.165 ha, yang diterbitkan dan difasilitasi pengajuan ijinnya ke tingkat provinsi Jawa tengah seluas 188.95 ha atau sejumlah 14 buah surat keterangan tata ruang.

2.1.4.1.20.3. Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Pelayanan publik lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Magelang. Cakupan tersebut diukur dari persentase jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 1.268.396 orang. maka persentase jumlah mobil pemadam kebakaran adalah 0.006 per seribu penduduk sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.100.
Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	5	5	5	7	8
2.	Jumlah Mobil Tangki Air	0	0	2	2	2
3.	Jumlah Mobil Rescue	0	0	1	1	3
2.	Jumlah Penduduk	1.209.375	1.221.681	1.245.482	1.257.123	1.268.396
3.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	100	100	100	100	100
4	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	1	3	4	4	5

Sumber: Satpol PP dan Penamggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang 2018

Sepanjang tahun 2017 tercatat telah terjadi 55 kejadian kebakaran dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 55 kejadian. Sepanjang tahun tahun 2016, jumlah kejadian kebakaran 72 kejadian tetapi jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 54 kejadian sebagaimana tabel di bawah. Hanya 75% kejadian kebakaran yang dapat ditangani kurang dari 15 menit. Hal ini dikarenakan terdapat lokasi kejadian kebakaran yang jauh dari jangkauan WMK (wilayah Manajemen Kebakaran). Adapun di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 telah memiliki 5 WMK yang berlokasi di Kecamatan Grabag, Bandongan, Muntilan, Salaman dan Tegalrejo. Guna memperluas cakupan pelayanan dan memenuhi waktu tanggap ≤ 15 menit, Pemerintah Kabupaten Magelang merencanakan akan membangun 12 WMK yang tersebar di beberapa kecamatan. Jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.101.
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (Response Time Rate) ≤ 15 menit	5	23	75	54	55
2.	Jumlah Kejadian	29	46	94	72	55

Sumber: Satpol PP dan Penamggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.20.4. Hukum dan HAM

Pembangunan pada bidang hukum berkonsentrasi untuk mewujudkan kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan dalam Program Legislasi Kabupaten. Dalam perkembangan selanjutnya Prolegda disebut Program Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab beragam perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini, serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah, sehingga dibutuhkan perencanaan yang baik dalam perumusannya. Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain Peraturan Daerah, Bupati juga dapat menetapkan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Peraturan Bupati dilakukan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah yang cukup diatur dalam bentuk Peraturan Bupati, sedangkan Keputusan Bupati dilakukan dalam rangka menetapkan keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final.

Tabel 2.102.
Produk Hukum Daerah

NO	PRODUK HUKUM	TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peraturan Daerah	8	10	9	11	8	21	13	21
2	Peraturan Bupati	20	58	25	57	26	84	50	63
3	Keputusan Bupati	450	586	460	725	460	715	640	629

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- yang baik yang salah satunya adalah dapat dilaksanakan. Untuk mewujudkan produk hukum yang dapat dilaksanakan, sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan kegiatan kajian dan evaluasi dengan format pelaksanaan sebagai berikut:
- Melakukan Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, dengan hasil akhir (*output*) sebagai berikut:
 - Pemahaman dari organisasi perangkat daerah terhadap substansi dari peraturan perundang-undangan yang baru; dan
 - Menindaklanjuti produk hukum daerah yang sudah atau belum ditetapkan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan baru yang dilakukan kajian.
 - Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dengan menggunakan parameter sebagai berikut:
 - Usia Perda sudah lebih dari 5 (lima) Tahun;
 - Terbitnya peraturan perundang-undangan baru;
 - Terjadi tumpang tindih dengan peraturan lain, baik secara horizontal maupun vertical; dan
 - Implementasi dari Perda tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi dan situasi saat ini.

Dengan hasil akhir (*output*) berupa rekomendasi dengan alternatif rekomendasi sebagai berikut:

 - Mencabut Perda;
 - Mancabut Perda lama dan membuat perda baru;
 - Merubah perda; dan
 - Tidak berbuat sesuatu (*do nothing*).
 - Melakukan evaluasi terhadap perda yang belum ditindaklanjuti dengan Petunjuk pelaksanaan (Peraturan Bupati), dengan bentuk rekomendasi untuk segera menyusun petunjuk pelaksanaan Perda yang sudah disusun.

Tabel 2.103.
Kajian Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

N O	PERIODE PELAKSANAAN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIKAJI/DIEVALUASI	JUMLAH
1	TAHUN 2014	1. Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya; 2. Peraturan Daerah terkait Desa pasca diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Peraturan Daerah terkait Tata Ruang pasca diterbitkannya Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya	3 (tiga) Peraturan
3	TAHUN 2015	1. Peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian (berkenaan dengan pembatalan untuk seluruhnya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi) 2. Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (berkenaan ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian) 3. Perda Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan (berkenaan dengan pembatalan untuk seluruhnya terhadap UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi) 4. Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (berkenaan ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah)	4 (empat) peraturan
3	TAHUN 2016	1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;	6 (enam) peraturan

N O	PERIODE PELAKSANAAN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIKAJI/DIEVALUASI	JUMLAH
		3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung; 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah; 5. Tindak lanjut Amanat Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 6. Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan PATEN yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil; - Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; - Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; dan - Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. 	
4	TAHUN 2017	1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan; dan 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik.	5 (lima) peraturan

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah mengatur mekanisme penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang salah satunya dilakukan melalui forum tatap muka dan dialog langsung yang dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi hukum secara lengkap dan memberikan pemahaman dari maksud pembentuk peraturan perundang-undangan, telah dilakukan sosialisasi atas produk hukum daerah yang diterbitkan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan forum tatap muka dan melalui media elektronik radio serta internet.

Tabel 2.104.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

NO.	PERIODE PELAKSANAAN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG Disosialisasikan	TARGET	REALISASI
1	TAHUN 2014	1. Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan; 2. Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 4. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi perizinan Tertentu; 5. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan	4 (empat) peraturan	6 (enam) Peraturan

NO.	PERIODE PELAKSANAAN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG Disosialisasikan	TARGET	REALISASI
		Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; 6. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah.		
2	TAHUN 2015	1. Perbup Nomor 34 Tahun 2014 tentang pedoman Klasifikasi arsip di Lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang; 2. Perbup Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Arsip; 3. Perbup Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; 4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah.	4 (empat) Peraturan	5 (lima) Peraturan
3	TAHUN 2016	1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; 2. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi; 7. Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; dan 8. Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.	5 (lima) Peraturan	8 (delapan) Peraturan
4	TAHUN 2017	1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 2. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 3. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019; 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	5 (lima) Peraturan	8 (delapan) Peraturan

NO.	PERIODE PELAKSANAAN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG Disosialisasikan	TARGET	REALISASI
		7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah; dan 8. Produk hukum terkait Penanggulangan Bencana (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang).		

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, 2018

Selain melaksanakan sosialisasi melalui forum tatap muka, dalam rangka memberikan pelayanan atas kebutuhan informasi hukum dilaksanakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan JDIH meliputi Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum dilaksanakan dengan menyusun Himpunan Lembaran Daerah, Himpunan Peraturan Bupati, Lembaran Daerah/Berita Daerah Lepas yang didistribusikan ke Dinas/Badan/Kantor, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Penataan sistem informasi hukum yang sudah dilakukan antara lain melalui sistem katalog yaitu dengan menyusun Buku Katalog Peraturan Daerah, yang sampai dengan Tahun 2016 telah tersusun 7 volume buku katalog dan melalui sistem internet/*website*. Penataan sistem informasi hukum dengan sistem internet/*website* dikelola dengan melakukan *upload* Produk Hukum Daerah dan Informasi Hukum secara berkala melalui *website* JDIH Kabupaten Magelang dengan alamat *jdi.h.magelangkab.go.id*. Penataan sistem informasi hukum melalui *website* JDIH Kabupaten Magelang tersebut merupakan bentuk keterbukaan informasi publik dengan menyajikan Produk Hukum Daerah dan Informasi Hukum yang dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pada ranah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi RANHAM dan Penanganan Perkara. Kegiatan Fasilitasi RANHAM dilaksanakan dengan dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;

Fasilitasi RANHAM bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memenuhi tujuan tersebut telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi RANHAM berupa pengumpulan data HAM dan data Kabupaten Kota Peduli HAM. Berdasarkan data Kabupaten Kota Peduli HAM tersebut Kabupaten

Magelang telah mendapatkan anugerah penghargaan atas upaya membina dan mengembangkan Kabupaten Magelang menjadi Kabupaten yang Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2012, 2014 dan 2015.

Penanganan perkara juga merupakan salah satu upaya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dilaksanakan dengan dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.182/15/KEP/03/2016 Tentang Tim Penanganan Perkara Non Litigasi Kabupaten Magelang Tahun 2016;
8. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.182/13/KEP/03/2016 Tentang Tim Penanganan Perkara Litigasi Kabupaten Magelang Tahun 2016; dan
9. Peraturan perundang-undangan lainnya.

Penanganan Perkara bertujuan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan pendampingan hukum yang menyangkut bidang tugas aparat pemerintah daerah yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Penanganan Perkara Litigasi dan Penanganan Perkara Non Litigasi. Beberapa capaian kinerja dari kegiatan penanganan perkara Pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan pendampingan hukum secara litigasi sebanyak 4 (empat) kasus hukum dari target 1 (satu) kasus hukum per tahun.
2. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum secara non litigasi sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus hukum dari target 5 (lima) kasus hukum per tahun.

Upaya menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat termasuk penyelenggara negara agar mereka tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya tetapi juga mampu berperilaku

sesuai dengan kaidah hukum yang mengaturnya dilakukan pembentukan KADARKUM. Pembentukan KADARKUM juga berfungsi untuk menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Pada tahun 2016 telah dilakukan 3 (tiga) kali kegiatan pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan desa/kelurahan binaan sadar hukum. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan yang telah dibina dan telah memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum.

Pembentukan dan pembinaan Kelompok Kadarkum dan desa/kelurahan binaan sadar hukum pada tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum
 - 1. Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran.
- b. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum
 - 1. Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran;
 - 2. Desa Senden Kecamatan Mungkid;
 - 3. Desa Sumberrejo Kecamatan Ngablak;
 - 4. Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan; dan
 - 5. Desa Madusari Kecamatan Secang.

Tabel 2.105.
Pembinaan Pembentukan Keluarga Sadar Hukum

NO	PERIODE PELAKSANAAN	PEMBINAAN KELOMPOK KADARKUM	PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK KADARKUM	JUMLAH
1	TAHUN 2015	1. Desa Kaponan Kecamatan Pakis; 2. Desa Klopo Kecamatan Tegalrejo; dan 3. Desa Grabag Kecamatan Grabag.	1. Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung; 2. Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan; dan 3. Desa Banjarsari Kecamatan Windusari.	6 (enam) kelompok
2	TAHUN 2016	1. Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan; dan 2. Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung.	1. Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran.	3 (tiga) Kelompok
3	TAHUN 2017	1. Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran.	1. Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran; 2. Desa Senden Kecamatan Mungkid; 3. Desa Sumberrejo Kecamatan Ngablak; 4. Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan; dan 5. Desa Madusari Kecamatan Secang.	6 (enam) Kelompok

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.20.5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. IKM diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat akan diketahui kelemahan dan kelebihan masing-masing unsur-unsur pelayanan.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat antara lain:

1. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang pelayanan publik;
4. Memacu persaingan positif antar unit pelayanan untuk meningkatkan kinerja pelayanannya;
5. Masyarakat dapat mengetahui gambaran kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang;
6. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
8. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

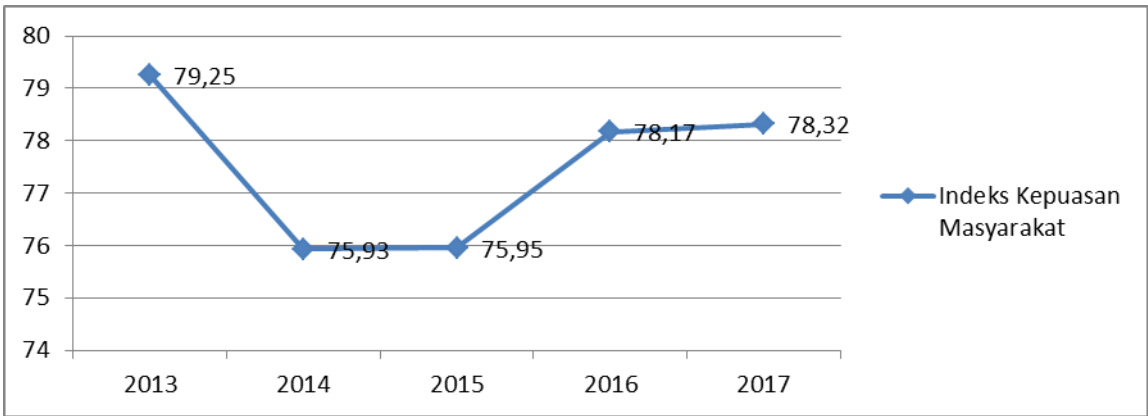
Unsur pelayanan yang menjadi indikator kepuasan pelayanan meliputi 10 (sepuluh) unsur, yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Prosedur Pelayanan;
3. Waktu Pelayanan;
4. Biaya/tarif Pelayanan;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Maklumat Pelayanan;
9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; dan
10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2017 dilaksanakan menggunakan metode kuesioner. Responden tinggal mengisi kuesioner sesuai pilihan jawaban yang telah disediakan dalam kuesioner. Sedangkan olah data hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat menggunakan aplikasi excel.

Perkembangan IKM di Kabupaten Magelang tahun 2013-2017, dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.14.
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2013-2017

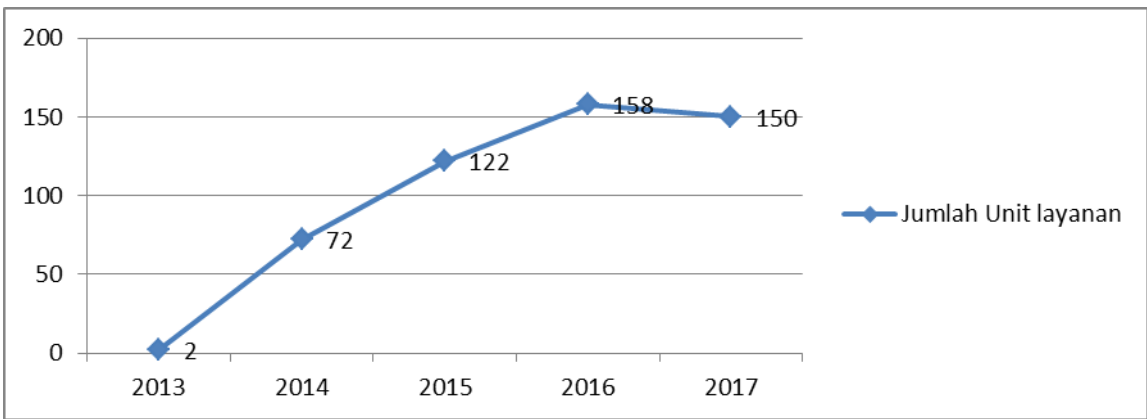


Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan grafik diatas Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Magelang pada tahun 2017 meningkat 0, 15 point dibandingkan tahun 2016, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kulaitas pelayanan puklik kepada masyarakat. Responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2017 adalah pengguna layanan. Khusus responden pada Sekolah Menengah Pertama terbagi dalam komposisi 75% responden siswa, 20% responden wali siswa, dan 5% responden komite sekolah.

Jumlah Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.15
Jumlah Unit Layanan Publik
yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2013-2017

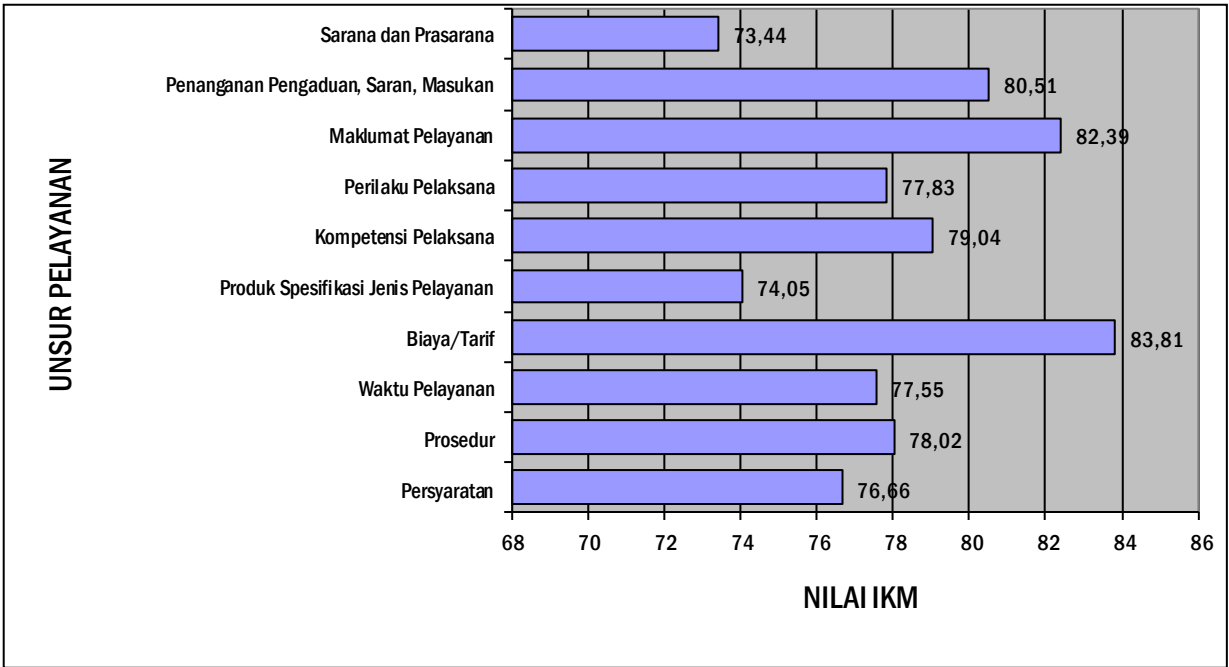


Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan grafik diatas jumlah unit layanan publik yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Magelang pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 8 unit dibandingkan tahun 2016.

Nilai persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perunsur pelayanan pada Unit Pelayanan Publik pada tahun 2017, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 2.16
Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017

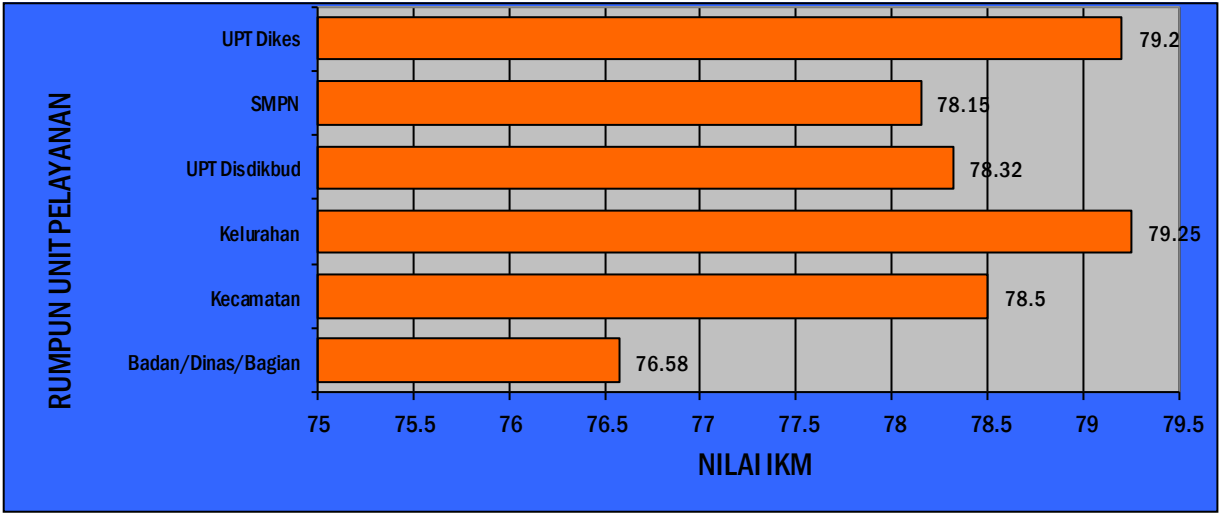


Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang, 2018

Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat yang paling tinggi atas pelayanan pada Unit Pelayanan Publik terletak pada kejelasan “**Biaya/Tarif**” pelayanan, sedangkan tingkat kepuasan masyarakat yang paling rendah terletak pada kurang lengkapnya “**Sarana dan Prasarana**” pelayanan.

Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tertinggi diraih oleh Unit Pelayanan Publik rumpun Kelurahan dengan IKM komulatif sebesar 79,25. Capaian IKM komulatif masing-masing rumpun Unit Pelayanan Publik sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.17
Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat
Per Rumpun Unit Pelayanan Publik Tahun 2017



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang, 2018

Pada grafik tersebut menunjukkan masyarakat paling puas terhadap kinerja pelayanan pada Kelurahan dan kepuasan masyarakat paling rendah terdapat pada kinerja layanan Badan/Dinas/Bagian.

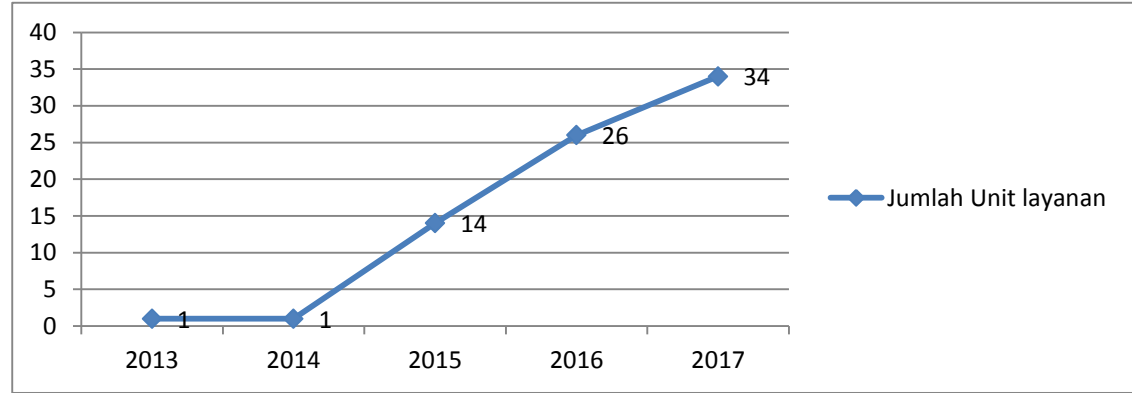
Unit Pelayanan yang mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan

kategori A (Sangat Baik) sebanyak 34 (tiga puluh empat) Unit Pelayanan Publik, dengan rincian:

- a. Badan/Dinas/Kantor/Bagian : 2 Unit Pelayanan Publik.
- b. Kecamatan : 7 Unit Pelayanan Publik.
- c. Kelurahan : 2 Unit Pelayanan Publik.
- d. UPT Disdikpora : 4 Unit Pelayanan Publik.
- e. SMP Negeri : 14 Unit Pelayanan Publik.
- f. UPT Puskesmas : 5 Unit Pelayanan Publik.

Jumlah Unit Pelayanan yang mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat kategori A (Sangat Baik) tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 30,77% (tiga puluh koma sembilan puluh dua persen) dari tahun sebelumnya (2016) yang sebanyak 26 (dua puluh enam) Unit Pelayanan Publik, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.18
Jumlah Unit Layanan Publik
yang Mencapai IKM Kategori A Tahun 2013-2017



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang, 2018

Berdasar grafik diatas terdapat peningkatan mutu lapayanan publik di Kabupaten Magelang.

2.1.4.1.20.6. Kerjasama Daerah

Kerjasama antar daerah antara lain dalam bidang pemerintahan meliputi kerjasama penegasan batas daerah, kerjasama bidang transmigrasi, dan kerjasama bidang pariwisata.

Disamping itu dilaksanakan pula kerjasama daerah dengan pihak ketiga meliputi Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

2.1.4.1.20.7. Administrasi Keuangan Daerah

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui SIM Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada:

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 49);
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 18).

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berbasis akuntansi, nilai historis, realistis, konsisten, periodesitas, pengungkapan secara lengkap dan nilai kewajaran yang transparan dan akuntabel.

Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Magelang telah memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 27A/LHP/BPK/XVIII-SMG/05/2014. tanggal 5 Mei 2014 Opini WDP pengecualian pada Penyajian Aset Tetap.

Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Magelang telah memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 257/XVIII-SMG/05/2015. tanggal 28 Mei 2015. Opini WDP pengecualian pada Penyajian Aset Tetap dan piutang PBB P2 masih proses verifikasi. Untuk tahun 2016, hingga saat ini sedang dilakukan audit oleh BPK.

2.1.5.1.20.8. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Upaya dalam pengelolaan aset daerah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *up dating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan asset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa asset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Perwujudan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Magelang dengan diundangkannya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (mencabut PP Nomor 6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 2008), maka Perda Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2011), dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 1037) akan disesuaikan dengan PP dimaksud.

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Magelang diarahkan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang serta salah satu

faktor dalam pendukung pencapaian Opini BPK menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.1.4.1.20.9. Pengawasan

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang meliputi pemeriksaan internal secara berkala dan pemeriksaan khusus/kasus. Pemeriksaan internal secara berkala dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang setiap tahun diterbitkan dengan Surat Keputusan Bupati Magelang dengan jumlah obyek pemeriksaan sebanyak 216 obyek pemeriksaan/tahun. Selain itu Inspektorat Kabupaten Magelang juga melaksanakan pemeriksaan khusus/kasus.

Rekomendasi LHP dari tahun 2012-2016 yang menimbulkan kerugian negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah serta perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.106.
Rekomendasi LHP dari Tahun 2013 s/d 2017 yang Menimbulkan Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah serta Perkembangan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Tersebut

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pemeriksaan berdasarkan PKPT	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik
	Jumlah LHP terbit	216 LHP	216 LHP	216 LHP	216 LHP	206 LHP
2	Pemeriksaan berdasarkan PKPT					
	a. Nilai Kerugian Negara/Daerah (Rp)	636.501.941,80	895.882.739,39	817.926.739,39	391.186.741,97	63.921.189,65
	b. Nilai Kerugian Negara/Daerah yang telah ditarik (Rp)	636.501.941,80	838.418.639,39	746.951.375,58	262.281.750,58	53.456.020,65
	c. Sisa yang belum ditarik/ disetor (Rp)	0	57.464.100,00	57.464.100,00	128.904.991,39	10.465.169,00
3	a. Nilai Kewajiban setor kepada Negara/Daerah (Rp)	340.885.191,50	478.926.062,35	448.445.311,60	697.278.563,33	626.909.361,47
	b. Nilai kerugian setor kepada negara/daerah yang telah setor	244.949.915,50	408.276.877,35	417.443.623,60	556.025.434,96	313.269.703,26
	c. Sisa yang belum setor	95.935,28	70.649.125,00	31.011.688,00	141.253.088,37	313.639.658,21

Sumber: Inspektorat Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.20.10. Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur

Aspek peningkatan kapasitas SDM Aparatur sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan melalui: Pengadaan CPNS, Pengangkatan CPNS dan PNS, serta Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat Penjenjangan yang terdiri dari :

- Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan;
- Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
- Pengembangan Karir yaitu Promosi dan Uji Kompetensi;
- Kesejahteraan Pegawai yaitu Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala. Penggajian dan Pensiun.

Tabel 2.107.
Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017
(1 Januari 2018) (orang)

No	Golongan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	I	236	211	213	185	170
2	II	1.904	1.544	1.697	1.487	1.380
3	III	4.360	4.534	4.811	4.511	4.469
4	IV	4.505	4.313	4.051	3.446	3.209
Jumlah		11.677	11.005	10.605	9.629	9.229

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah PNS sejak Tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan rata-rata penurunan tiap tahun sejumlah 673. Pada tahun 2016 terjadi penurunan yang signifikan yaitu sejumlah 976 Adapun penyebab penurunan ini adalah PNS memasuki masa purna tugas, PNS meninggal dunia, PNS pensiun Atas Permintaan Sendiri, pengalihan PNS guru SLB dan SMA/SMK menjadi PNS Provinsi, dan adanya mutasi keluar daerah. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.108.
Komposisi Pendidikan PNS Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017 (orang)

No	Pendidikan	Tahun									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	S2	250	128	297	163	313	199	281	181	291	192
3	S1 /D - IV	2.368	3.247	2.307	3.344	2.312	3.514	1.970	3.214	1.885	3.176
4	D – III	323	638	303	688	302	734	270	713	232	773
5	D – II	544	888	424	693	344	583	269	483	203	405
6	D – I	60	193	51	126	42	116	32	104	30	91
7	SMA	1.119	795	1.065	712	1.077	752	977	695	912	644
8	SMP	272	28	265	25	317	24	293	21	263	19
9	SD	150	2	138	2	139	4	122	4	108	4
Jumlah		6.182	5.086	5.919	4850	5753	4.846	4.214	5.415	3.924	5.304
		11.677		11.005		10.603		9.629		9.228	

Sumber : Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Pada Tahun 2016 komposisi pendidikan PNS Kabupaten Magelang didominasi oleh lulusan S1/D-IV, dengan persentase sebesar 53,84%; kemudian lulusan SMA sebesar 17,36%. lulusan D-III sebesar 10,21%; lulusan D-II sebesar 7,81%; lulusan S2 sebesar 4,85%; lulusan SMP sebesar 3,26%; lulusan D-I sebesar 1,41%; serta lulusan SD sebesar 1,31%.

Tabel 2.109.
Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural (orang)
Kabupaten Magelang Tahun 2013– 2017

No	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Adum (Diklat Pim IV)	14	41	33	30	27
2	Spama (Diklat Pim III)	9	43	14	9	7

No	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
3	Spamen (Diklat Pim II)	2	3	3	6	-

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2018.

Tabel 2.110.
Rekapitulasi Peserta Diklat Teknis/Fungsional. Bimtek. Lokakarya.
Seminar Tahun 2013-2017 (orang)

No	URAIAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengiriman peserta diklat teknis/ fungsional ke lembaga diklat	78	145	212	101	270
2	Pelatihan Operator Komputer bagi Aparatur oleh Kantor Diklat Naker Aparatur (BLK)	16	15	16	6	16
3	TF yang difasilitasi instansi di luar Pemerintah Kabupaten Magelang					
	- Diklat Teknis Kompetensi Sekdes	0	0	0	0	0
	- Diklat Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Sekdes	0	0	0	0	0
	- Diklat Teknis Persiapan Penyusunan SPM	0	0	0	0	0
	- Pengelolaan keasipan bagi sekdes	15	0	0	0	0
	- Diklat Pengelolaan Keuangan Desa		0	240	0	0
4	Penyelenggaraan oleh BKD					
	- Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah	0	80	0	0	0
	- Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	0	50	0	0	0
	- Diklat dan Ujian Pengadaan Barang/Jasa	219	45	0	0	
	- Bimtek Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	116	0	0	0	0
	- Bimtek Penanganan Kasus Kepegawaian	200	0	0	0	0
	- Bimtek manajemen kepegawaian	0	45	0	0	30
	- Bimtek Fasilitator Pemerintahan Desa	0	0	42	0	0
	- Diklat Purna Tugas	0	0	30	0	0
	Diklat Penyusunan DUPAK	0	0	0	60	0
	Bintek BLUD					60
	Bintek Legal Drafting					60
	Jumlah	659	380	540	178	436

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Magelang, 2018

Pada tahun 2015 terdapat 6 orang aparatur yang mendapatkan sanksi, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 8 orang aparatur yang mendapatkan sanksi dari tahun 2012 sampai 2016 aparatur yang dikenakan sanksi cenderung mengalami penurunan. Penurunan pada tahun 2014 sangat signifikan dibanding tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran aparatur untuk meningkatkan disiplin PNS. Secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.111.
Jumlah Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Pemerintah
Kabupaten Magelang Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Teguran Lisan	0	1	1	3	0
2	Teguran Tertulis	0	2	0	5	0
3	Pernyataan tidak puas secara tertulis	6	6	0	0	3
4	Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling Lama 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0
5	Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun (PP 30 Tahun 1980)	0	0	0	0	0
6	Penundaan kenaikan pangkat untuk paling Lama 1 (satu) tahun	2	0	1	0	0
7	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih Rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun	3	0	1	0	2
8	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	0	0	0	0	0
9	Pembebasan dari jabatan	8	0	0	0	1
10	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil	3	0	0	0	1
11	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil	2	0	0	0	0
12	Pemberhentian tidak dengan hormat	0	0	0	0	0
13	Pemberhentian senentara (PP No. 04 Tahun 1966)	1	1	0	0	1
14	Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS (karena sanksi) PP 11 Tahun 2001	0	0	0	0	0
15	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih Rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun	5	0	2	0	0
16	Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri / Pensiun dini /Mengundurkan diri	0	1	1	0	1
17	Pemberhentian dengan hormat karena menjadi anggota Parpol	0	0	0	0	0
18	Pencabutan pemberhentian sementara	0	0	0	0	0
19	Rehabilitas	0	1	0	0	0
	JUMLAH	30	12	6	8	9

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pelanggaran disiplin, maka dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang disiplin pegawai, serta pemberian sanksi yang tegas (sampai dengan pemberhentian kerja) kepada pegawai yang melakukan tindakan-tindakan indiscipliner. Sanksi tegas tersebut merupakan langkah yang berimplikasi kepada seluruh pegawai, sedangkan dalam rangka peningkatan kinerja dan disiplin pegawai, penerimaan tambahan penghasilan PNS diperhitungkan atas dasar kehadiran pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang No. 9 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

2.1.4.1.20.11. Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Magelang dioperasionisasikan melalui *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu lima tahun mendatang. yaitu Tahun 2014–2019. Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi. yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN. meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek. jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang bersifat dinamis. karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi, agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

2.1.4.1.20.12. Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban

Tabel 2.112.

Data Jumlah Kasus Gangguan Kamtibmas

No.	Uraian	Jumlah Kejadian (kasus)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Penganiayaan berat	17	11	23	7	
2	Bencana Alam	21	12	12	26	352
3	Curanmor	33	8	26	41	
4	Curat/Curas	77	41	89	34	
5	Judi	15	10	25	67	
6	Kebakaran Hutan	N/A	0	8	0	
7	Kebakaran Rumah	64	31	10	2	55
8	Keracunan	N/A	0	0	0	
9	MD. Bunuh Diri	4	11	11	0	
10	MD. Di Kolam / Sumur	N/A	0	10	0	
11	MD. Di Sungai	N/A	0	0	0	
12	MD. Keracunan	N/A	0	0	1	
13	MD. Tanah Longsor	N/A	0	0	0	
14	MD. Terkena Sengatan Listrik	N/A	0	0	0	

No.	Uraian	Jumlah Kejadian (kasus)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
15	MD. Tertimpa Pohon	N/A	0	0	0	
16	Narkotika	32	16	23	27	
17	Pembunuhan	8	3	6	0	
18	Pencurian Hewan	N/A	0	0	0	
19	Pencurian Kawat Listrik	N/A	0	0	0	
20	Pencurian Lain-Lain	N/A	15	0	0	
21	Penemuan Mayat	7	11	5	0	
22	Pengrusakan Rumah	N/A	1	0	0	
23	Perkosaan	13	3	3	0	
24	Rumah Roboh	N/A	0	0	0	
25	Unjuk Rasa	N/A	0	0	0	
26	Uang palsu	64	2	0	1	
	Jumlah	355	175	254	212	

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, 2018

Jumlah gangguan Kamtibmas di Kabupaten Magelang secara umum bersifat fluktuatif pada periode tahun 2012-2016, dan dari tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan (254 gangguan turun menjadi 212 gangguan). Fluktuasi ini disebabkan karena kamtibmas dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu sosial budaya, ekonomi dan politik.

Kinerja Makro urusan otonomi daerah, pemeritahan umum, administrasi, keuangan daerah, kepegawaian dan persendian tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.113.
Kinerja Makro Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2013-2017

Indikator (satuan)	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0.45	0.45	0.43	0,41	0,39
Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	93.93	93.01	90.67	91,37	91,32
Pertumbuhan ekonomi (%)	NA	5.46	5.5	5,49*	
Kemiskinan (%)	13.96	12.98	13.07	13.07*	12,42
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah*	2 (Spipise dan SIM PAP PM)	2 (Spipise dan SIM PAP PM)	2 (Spipise dan SIM PAP PM)	2 (Spipise dan SIM PAP PM)	2 (Spipise dan SIM PAP PM)
Penegakan PERDA	NA	769	486	N/A	80,45
Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	NA	0.05	0.05	0,05	0,05
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) di Kabupaten (pelanggaran)	80.42	100	100	100	100
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (orang)	11.475	11.492	11.461	11.486	11.579
Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten (%)	100	100	100	100	100

Indikator (satuan)	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sistim Informasi Manajemen Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	79.25	75.93	75.95	77,63	78,32
OPINI BPK “WTP”	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	40.03	39.74	8.23	10,30	7,42

• Angka Sementara
 Sumber: Berbagai SKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018. *) DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.21. KETAHANAN PANGAN

Aspek pelayanan umum pada urusan ketahanan pangan dapat dilihat pada beberapa indikator yang berkaitan dengan ketersediaan pangan di masyarakat antara lain: jumlah produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, telur dan susu. Produksi pangan di Kabupaten Magelang bukan hanya mendukung ketersediaan pangan di dalam kabupaten tetapi juga mendukung ketersediaan pangan provinsi dan nasional.

Perwujudan swasembada pangan beras, gula dan daging dilakukan melalui berbagai strategi utama. Penerapan Sapta Usaha Tani secara konsisten dengan didukung modernisasi pertanian diharapkan menghasilkan capaian produksi tanaman pangan, Peningkatan produksi komoditas tebu dilakukan melalui ekstensifikasi, pengembangan Varietas Unggul Baru (VUB), dan peningkatan akses alsinbun bagi pembudidaya tebu. Dalam rangka mendukung program swasembada daging dilakukan peningkatan jumlah populasi ternak sapi potong dengan memacu produksi dan produktivitas ternak lokal untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan bibit ternak yang berkualitas. Ketersediaan pangan hasil pertanian di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.114.
 Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian Tahun 2013– 2017 (Ton)

Jenis Pangan Strategis	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Padi	354.966	345.883	354.296	422.153	287.170
Jagung	74.187	62.889	63.531	71.896	49.024
Kedelai	- 3.465	0	0	0	0
Bawang merah	103,1	180,9	217,9	433,8	459
Cabe merah	23.909	25.237	23.132	26.061	21.147
Daging sapi	1.653,55	11.076	14.264	3.391	13.679
Daging ayam	10.848.05	25.657.16	12.093	11.083	14.505
Telur	13.225.84	16.455.83	11.692	15.486	15.930
Gula pasir	-7.0.04.2	11.000.	11.500	11.975	3.532

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Magelang, 2018

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan meliputi :

- 1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- 2) Distribusi dan Akses Pangan;
- 3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
- 4) Penanganan Kerawanan Pangan.

Penyusunan target pemenuhan SPM Bidang Ketahanan Pangan yang ditetapkan sampai dengan Tahun 2015 dilakukan untuk dapat menjadi tolak ukur kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu Tahun 2015 dengan kurun waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. Realisasi pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.115.
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2013-2017

SPM	Realisasi Pencapaian				
	2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan energi dan protein per kapita**					
- Energi (Kkal)	1.841.7	1.936.4	2.876	2.683	2.832,9 2
- Protein (Gram)	49.5	56.0	73.7	76,61	72,17
Penguatan cadangan pangan** (%)	58	60	67	75,10	76,21
Ketersediaan informasi pasokan. harga dan akses pangan di daerah** (%)	53.33	55.29	50.14	91,67	92,58
Stabilitas harga dan pasokan pangan** (%)	70	76.6	99	93,33	93,45
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan(PPH)**	83.70	92.3	85.7	87,2	87,10
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan** (%)	NA	100	100	91,66	92,47
Penanganan daerah rawan pangan** (%)	40.24	81.13	87.5	69,64	70,04

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Magelang, 2018

2.1.4.1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan antara lain melalui kegiatan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa, fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa melalui pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Posyandu dan PKK, serta Bulan Bhakti Gotong-Royong (BBGR).

Saat ini urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mendapatkan porsi yang lebih besar di Kabupaten Magelang. Dengan lahirnya Organisasi Perangkat Daerah yang baru sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) pada tahun 2017, diharapkan akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam pengembangan bidang ekonomi yang berbasis potensi lokal yang ada di desa, sehingga kedepannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengembangan Ekonomi Desa dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya mewujudkan dua misi Bupati Magelang, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM terkait dengan pemberdayaan masyarakat; dan
2. Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing.

Kedua misi tersebut merupakan bentuk upaya perwujudan visi “Sejahtera”. Untuk melihat capaian perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang selama rentang 5 tahun terakhir dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.116.
Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP	5	7	20	20	20
2	Pasar Desa	58	60	60	60	60
3	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	9	11	25	54	87
4	Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)	6	6	6	6	6
5	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2KPKK	16	18	20	20	20
6	Desa Berpartisipasi dalam PNPM-MP	345	345	345	345	345
7	Unit Pengaduan Masyarakat TKPKD	1	1	1	1	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Arah pengembangan ekonomi desa terkait dengan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal di tahun 2018 agar bisa mencapai target RPJMD Kabupaten Magelang adalah :

1. Arah kebijakan yang didukung oleh berbagai sektor antara lain pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, UMKM, dan pariwisata;
2. Pendekatan *One Village One Product*; dan
3. Pengembangan Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Pembudidaya Ikan, Usaha Ekonomi Desa serta pengembangan potensi wisata.

Untuk melihat capaian perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang selama rentang 5 tahun terakhir dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.117.
Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP	5	7	20	20	20
2	Pasar Desa	58	60	60	60	87
3	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	9	11	25	54	54
4	Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)	6	6	6	6	6
5	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2KPKK	16	18	20	20	20
6	Desa Berpartisipasi dalam PNPM-MP	345	345	345	345	345
7	Unit Pengaduan Masyarakat TKPKD	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

2.1.4.1.23. STATISTIK

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik digambarkan dengan keberadaan/terbitnya dokumen-dokumen Buku Kabupaten Magelang Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Magelang setiap tahunnya. Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan.

Tabel 2.118.
Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.23. KEARSIPAN

Pengelolaan kearsipan dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan. hal tersebut antara lain dengan telah terbangunnya sistem jaringan kearsipan diseluruh SKPD, peningkatan kapasitas SDM kearsipan melalui bintek pengelola kearsipan tingkat SKPD, Kecamatan dan Desa, peningkatan sarana kearsipan, pelestarian dan penyelamatan dokumen Arsip daerah, serta peningkatan kesadaran arsip masyarakat melalui pameran. Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.119.
Pengelolaan Kearsipan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengelolaan arsip secara baku	81.16	23.03	38.47	56.27	73,03
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	176	(232) 56	(439) 207	(170) 609	(182) 793
3	Pembenahan kearsipan desa (desa)	47	0	1	0	0
4	Bintek SDM Kearsipan (Sekdes)	13	15	15	0	0
5	Penyelamatan dan pelestarian arsip (Berkas)	6.000	6.000	11.813	28.033	28.033

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.24. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Magelang semakin ditingkatkan untuk mendukung semakin terbukanya jaringan komunikasi dan informasi masyarakat, melalui kegiatan antara lain fasilitasi pembentukan media tradisional (FK Metra), pemantauan isi siaran, pengembangan sumber daya informasi, fasilitasi peningkatan pelayanan informasi, penyampaian informasi hasil-hasil pembangunan melalui media massa serta penyelenggaraan dialog interaktif.

Selama tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan pembangunan beberapa sistem informasi manajemen guna mendukung kinerja pemerintah Kabupaten Magelang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem informasi manajemen tersebut antara lain:

- a. Sistem informasi pos dan telekomunikasi
- b. Portal informasi desa

c. Portal SKPD.

Pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.120.
Pelayanan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah jaringan komunikasi	32	47	47	48	123
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.25	0.25	0.25	0.15	0,07
3	Jumlah surat kabar nasional/local	9/3	9/3	9/3	10/3	10/3
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6	7	7/1	8/1	8/0
5	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Pameran/ <i>expo</i>	8	8	1	1	3
7	Pengawasan isi siaran (Lembaga Penyiaran	4	4	4	4	1
8	Pelayanan Perijinan (Lembaga Penyiaran	1	1	1	1	0
9	Fasilitasi FK-METRA	1	4	12	12	5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.25. PERPUSTAKAAN

Jumlah perpustakaan dan koleksi perpustakaan dalam kurun waktu Tahun 2013-2017 senantiasa mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung. Selain itu juga disebabkan semakin meningkatnya kesadaran dan minat baca masyarakat. Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Magelang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.121.
Perkembangan Perpustakaan Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					Keterangan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Jumlah Pengunjung	40.259	36.595	33.726	55.854	39.967	
2.	Jumlah Eksemplar Koleksi	44.925	47.345	49.990	52.683	56.724	
3.	Jumlah Judul Koleksi	22.972	23.984	24.512	24.955	26.179	
4.	Jumlah Anggota	11.481	12.133	1.491	1.779	9.082	Sejak tahun 2015 keanggotaan non akumulatif dari tahun sebelumnya.
5.	Jumlah Peminjam	15.288	13.987	8713	9048	9.194	
6.	Jumlah Buku yang Dipinjam	18.762	18.186	11358	14483	10.888	
7.	Jumlah Perpustakaan	698	714	716	791	793	akumulatif
7.1	Perpustakaan Desa	149	164	164	166	166	
7.2	Perpustakaan Masjid	8	8	8	8	8	

No	Uraian	Tahun					Keterangan
		2013	2014	2015	2016	2017	
7.3	Perpustakaan Kelompok Tani	1	1	1	1	1	
7.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2	2	2	2	2	Wesleyan, STTP Tegalrejo
7.5	Perpustakaan Khusus	4	4	5	5	7	Pengadilan Agama Setwan Puskesmas Salam Puskesmas Grabag, Kejaksaan (Ds Daleman Kidul, Losari penambahan th 2017)
7.6	Perpustakaan Sekolah	529	529	529	603	603	
7.7	Perpustakaan Keliling	2	2	2	3	3	
7.8	Perpustakaan Umum	1	1	1	1	1	
7.9	Perpustakaan Cabang	2	2	2	2	2	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.1.4.2.1. PERTANIAN

2.1.4.2.1.1. Produksi Pertanian

Produksi pertanian selain tanaman pangan juga menjadi andalan Kabupaten Magelang untuk pemenuhan kebutuhan regional maupun provinsi lain. Pada tahun 2015 produksi sayuran utama dan buah seperti bawang merah, cabe merah, pisang, durian, dan salak mengalami peningkatan dibanding tahun 2014. Adapun komoditas mangga, kentang mengalami penurunan, penurunan terbesar pada produksi mangga sebesar 50,7% dikarenakan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Pada tahun 2016 produksi sayuran utama dan buah seperti bawang merah, cabe merah, kentang, pisang, dan salak mengalami peningkatan dibanding tahun 2015. Adapun komoditas mangga dan durian mengalami penurunan. Penurunan produksi mangga dan durian dikarenakan curah hujan yang tinggi menyebabkan banyaknya bunga dan buah muda yang rontok, selain itu Organisme Pengganngu Tanaman (OPT) juga menyebabkan penurunan produksi

Pada tahun 2015 produksi sayuran utama dan buah seperti bawang merah, pisang, durian, mangga, dan salak mengalami peningkatan dibanding tahun 2014. Adapun komoditas cabe merah kentang mengalami penurunan.

Tabel 2.122.
Produksi Hortikultura Tahun 2013-2017 (Ton)

No	Komoditas (ton)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Mangga	1.098,5	541,3	1.504,6	345,0	342,1
2	Durian	1.520,1	2.335,2	5.139,6	2.251,4	1.891,4
3	Salak	33.897,7	41.756,7	60.021,6	67.643,2	73.092,6
4	Pisang	9.423,6	12.931,3	13.069,5	18.347,1	19.743,5
5	Cabai Merah	23.908,8	25.237,1	24.195,3	26.061,1	25.584,9

No	Komoditas (ton)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
6	Bawang Merah	103,1	160,9	217,9	433,8	473,7
7	Kentang	5.204,6	4.355,2	2.889,1	4.885,3	4.121,1

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

Tahun 2014 produksi hasil perkebunan seperti kelapa dan kopi mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2013. Komoditas yang mengalami penurunan yaitu Kakao sebesar 13%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya minat petani untuk menanam dan memelihara kakao.

Tahun 2015 produksi hasil perkebunan seperti kelapa dan kopi mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2013.

Tahun 2016 produksi hasil perkebunan seperti kelapa dan kopi mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2015. Komoditas yang mengalami penurunan yaitu kakao. Penurunan produksi kakao sebesar 37,5% hal ini disebabkan oleh menurunnya minat petani untuk menanam dan memelihara kakao.

Tabel 2.123.
Produksi Tanaman Perkebunan Utama Tahun 2013-2017

No	Komoditas (ton)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kelapa	7.483	7.958	8.192	10.354	9.973
2	Kakao	80	74	80	30	142
3	Kopi	889	1.096	965	1.381	898
4	Nilam	2.309	3.284	4.298	1.277	3.417

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

Pada tahun 2017 jumlah populasi ternak sapi potong: 78.286; sapi perah: 2.440 dan kambing: 87.750. Pada tahun 2014 Populasi sapi potong meningkat dari 78.153 ekor menjadi 78.325 ekor pada Tahun 2015 atau naik 0,22 %. Populasi sapi potong pada Tahun 2016 menjadi 78.246 ekor atau turun 0,10% dibanding tahun 2015.

Sedangkan populasi sapi perah meningkat dari 2.440 ekor pada Tahun 2013 menjadi 2.451 ekor pada Tahun 2014 atau naik 0,45%. Populasi sapi perah menjadi 2.528 ekor pada Tahun 2015 atau naik 3,05 %. Pada tahun 2016 populasi sapi perah naik menjadi 2.561 (1,31%) dibanding tahun 2015

Populasi kambing meningkat dari 86.963 ekor padaTahun 2013 menjadi 87.397 ekor pada Tahun 2014 atau naik 0,5 %. Tahun 2015 Populasi kambing menjadi 87.671 ekor atau naik 0,31% dan pada tahun 2016 menjadi 87.701 atau naik 0,03% .

Tabel 2.124.
Populasi Ternak Tahun 2013-2017

No	Komoditas (ekor)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sapi potong	77.764	78.153	78.325	78.246	78.286
2	Sapi Perah	2.440	2.451	2.528	2.561	2.440
3	Kambing	86.963	87.397	87.671	87.701	87.750
4	Unggas	4.556.040	4.633.165	4.608.910	4.638.777	4.606.238

Sumber: Dinas Peterikan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.1.2. Kontribusi Terhadap PDRB

Kontribusi sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan peternakan terhadap PDRB di Kabupaten Magelang pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 relatif stabil. Kontribusi sub sektor tanaman pangan menurun, hal ini dikarenakan kontribusi sektor lain khususnya industri pengolahan mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi. Namun demikian nilai produksi sub sektor tanaman pangan tetap meningkat. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB bukan berarti kurang berhasilnya pembangunan sektor pertanian karena perlu dilihat juga nilai produksinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.125.
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2015

Uraian		2012		2013		2014		2015	
		Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		4,277,173.90		4,663,034.20		4,905,199.81		5,102,388.84	
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3,983,610.70	93.14%	4,343,228.38	93.14%	4,548,877.77	92.74%	4,731,955.41	92.74%
	a. Tanaman Pangan	1,439,822.64	36.14%	1,491,797.91	34.35%	1,286,051.86	28.27%	1,337,811.29	28.27%
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	517,467.81	12.99%	544,163.78	12.53%	615,179.56	13.52%	639,938.55	13.52%
	c. Perkebunan Semusim	53,566.48	1.34%	56,968.01	1.31%	65,134.40	1.43%	67,755.84	1.43%
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	984,393.73	24.71%	1,121,029.30	25.81%	1,379,505.85	30.33%	1,435,026.50	30.33%
	e. Perkebunan Tahunan	169,199.52	4.25%	177,403.72	4.08%	211,420.28	4.65%	219,929.27	4.65%
	f. Peternakan	731,149.45	18.35%	849,857.40	19.57%	888,278.47	19.53%	924,028.81	19.53%
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	88,011.06	2.21%	102,008.25	2.35%	103,307.35	2.27%	107,465.14	2.27%
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	182,274.13	4.26%	194,007.49	4.16%	217,976.37	4.44%	226,546.06	4.44%
3	Perikanan	111,289.07	2.60%	125,798.33	2.70%	138,345.66	2.82%	143,887.37	2.82%

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018. Diolah.

Tabel 2.126.
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2015

Uraian		2012		2013		2014		2015	
		Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		3,827,627.05		3852303.183		3,757,550.06		3,937,767.02	
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3,557,567.65	92.94%	3578718.584	92.90%	3,486,251.74	92.78%	3,648,734.93	92.66%
	a. Tanaman Pangan	1,200,901.98	34.45%	1,175,055.37	33.71%	999,863.89	28.68%	862,925.81	23.65%
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	475,089.66	13.63%	478,115.50	13.71%	475,880.00	13.65%	495,863.08	13.59%
	c. Perkebunan Semusim	51,624.78	1.48%	53,459.61	1.53%	55,659.92	1.60%	60,569.00	1.66%
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	934,488.74	26.80%	920,576.18	26.41%	958,311.56	27.49%	1,042,443.57	28.57%
	e. Perkebunan Tahunan	151,246.94	4.34%	156,475.29	4.49%	163,899.95	4.70%	179,152.88	4.91%

	Uraian	2012		2013		2014		2015	
		Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)
	f. Peternakan	671,091.81	19.25%	713,226.44	20.46%	749,848.25	21.51%	823,154.60	22.56%
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	73,123.74	2.10%	81,810.20	2.35%	82,788.16	2.37%	87,569.64	2.40%
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	169,452.36	4.43%	166,000.65	4.31%	165,146.72	4.40%	176,411.96	4.48%
3	Perikanan	100,607.04	2.83%	107,583.95	3.01%	106,151.61	3.04%	121,283.22	3.08%

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018. Diolah

2.1.4.2.2. KEHUTANAN

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan kondisi fisik lahan maka kawasan yang termasuk dalam kategori kawasan hutan lindung di Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.693/Kpts/Um/8/1981 dan 837/Kpts/Um/11/1980 seluas kurang lebih 1.474 hektar.

Beberapa lokasi sering mengalami bencana alam erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi. Adapun kawasan rawan erupsi dan lahar dingin Gunung Merapi tersebut meliputi Kecamatan Srumbung, Dukun, Muntilan, Salam, Sawangan, Ngluwar dan Mungkid. Disamping itu ada beberapa wilayah disekitar lereng Gunung Sumbing dan Merbabu yang rawan bencana longsor, antara lain di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik, Windusari, Pakis dan Ngablak. Pada kawasan-kawasan tersebut perlu diantisipasi agar masyarakat terhindar dari ancaman bencana tersebut.

Kinerja makro urusan kehutanan bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rehabilitasi hutan dan lahan kritis, kerusakan kawasan hutan/lahan kritis, penebangan hutan serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.

Tabel 2.127.
Kinerja Makro Urusan Kehutanan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)	250	5.843	1.590	1.834	
Kerusakan Kawasan Hutan	N/A	N/A	450,05	738,54	
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	4,57	4,69	4,64	4,44	3,92

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.128.
Produksi Hasil Hutan (Kayu) Tahun 2013-2017 (m³)

Jenis Produksi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Mahoni (AI)	0,25	0	0	86,16	
Mahoni (AII)	1,71	0	0	259,96	
Mahoni (AIII)	5,55	0	0	542,44	
Pinus (AI)	23,82	266,54	560,78	409,38	
Pinus (AII)	74,21	84,85	278,99	710,66	
Pinus (AIII)	30,35	31,68	41,65	788,27	

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2018

2.1.4.2.3. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kontribusi sektor pertambangan dan galian di Kabupaten Magelang pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 fluktuatif. Hal tersebut disebabkan masih terbatasnya pengembangan potensi pertambangan di Kabupaten Magelang. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.129.
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB
Tahun 2013-2017

Tahun	ADHB		ADHK	
	Nilai (Juta Rp)	Kontribusi (%)	Nilai (Juta Rp)	Kontribusi (%)
2013	283.701.53	2,93	140.505.54	2,62
2014	306.553.95	2,84	143.675.38	2,54
2015	332.855.76	2,90	153.233.11	2,58
2016	1,340,430.43	5,02	812.287,87	4,09
2017				

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018, diolah

2.1.4.2.4. PARIWISATA

2.1.4.2.4.1. Jumlah Obyek Wisata dan Pengunjung

Kabupaten Magelang memiliki destinasi wisata sebanyak 131 obyek wisata yang berupa wisata alam 19 obyek, wisata budaya 25 obyek, wisata buatan 32 obyek, desa wisata 50 desa, lokasi kerajinan 6 lokasi, museum 6 unit dan 3 obyek wisata minat khusus. Kabupaten Magelang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah merintis kerjasama pengelolaan destinasi wisata milik desa seperti Candi Selogriyo, Candi Ngawen dan lain-lain. Data kunjungan wisata untuk setiap destinasi wisata secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.130.
Kinerja Makro Urusan Pariwisata Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kunjungan wisata (orang)	3.909.593	3.921.463	4.401.733	5.166.561	5.402.084
Wisatawan Manca Negara (orang)	303.036	301.909	253.358	413.306	337.515
Wisatawan Nusantara (orang)	3.606.557	3.619.554	4.148.375	4.753.255	5.064.569

Sumber: Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.131.
Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Destinasi Wisata
di Kabupaten Magelang Tahun 2013–2017

Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan				
	2013	2014	2015	2016	2017
Candi Borobudur	3.581.726	3.376.304	3.578.387	3.759.300	3.775.799
Candi Mendut dan Candi Pawon	84.022	78.141	60.051	75.168	76.918
PAH Candi Umbul	19.971	27.528	31.706	37.258	40.014
TR Mendut	61.876	68.858	75.216	91.385	94.682
Telaga Bledar	3.074	3.294	4.057	8.836	13.506
Ketep Pass	342.944	329.480	354.084	337.994	320.929
Sekar Langit	11.683	13.573	15.169	16.116	9.312
Seloprojo	2.549	2.874	3.891	5.475	2.848
Kedung Kayang	13.132	13.534	12.075	4.662	6.541

Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan				
	2013	2014	2015	2016	2017
Curug Silawe	6.579	7.877	6.239	5.471	3.596
Candi Selogriyo					14.700
Punthuk Setumbu					122.879
Candi Ngawen					28.639
JUMLAH TOTAL					4.510.363

Sumber: Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.4.2. Hotel / Penginapan

Sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Magelang terdapat 5 hotel bintang, 31 hotel melati dan 245 *homestay*. Hotel dan *homestay* merupakan salah satu akomodasi pariwisata yang menjadi kebutuhan dasar bagi wisatawan selama berada di destinasi wisata. Tingkat hunian hotel tercatat berkisar lebih dari 28,10% pada tahun 2015.

Tahun 2016 jumlah hotel berbintang sama dengan tahun 2015 (5 hotel), jumlah hotel melati naik, dari 31 hotel pada tahun 2015 menjadi 32 dan jumlah *homestay* turun dari 245 pada tahun 2015 menjadi 243.

Tahun 2017 jumlah hotel berbintang naik dari 5 hotel tahun 2016 menjadi 6 hotel, jumlah hotel melati naik, dari 32 hotel pada tahun 2016 menjadi 50 dan jumlah *homestay* sama pada tahun 2016 sejumlah 243.

Tabel 2.132.
Jumlah Hotel dan *Homestay*

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Hotel Bintang 5	1	2	1	1	1
2	Hotel Bintang 4	-	1	1	1	2
3	Hotel Bintang 3	3	2	3	3	3
4	Hotel Melati	29	31	31	32	50
5	<i>Homestay</i>	245	245	245	243	243

Sumber: Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.4.3. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan

Selama kurun waktu tahun 2013-2017 rata-rata lama menginap wisnus maupun wisman stagnan. Perkembanganya tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.133.
Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Tahun 2013–2017 (hari)

No	Tahun	Wisman	Wisnu
1	2013	1,38	1,28
2	2014	1,26	1,35
3	2015	1,67	1,32
4	2016	1,15	1,02
5	2017	1,14	1,02

Sumber: Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Magelang berdampak pada peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Dalam perhitungan PDRB kontribusi pariwisata dihitung melalui 4 subsektor, yaitu: (1). Sub-sektor Jasa Hiburan dan Rekreasi pada sektor jasa-jasa, (2). Subsektor Hotel dan (3). subsektor Restoran/Rumah Makan pada sektor Perdagangan. Hotel dan Restoran serta (4). Sub-sub sektor agen perjalanan pada sub-sektor Jasa penunjang angkutan pada sector perhubungan dan komunikasi.

- a. Kegiatan yang dicakup dalam sub-sektor Jasa Hiburan dan Rekreasi ini adalah jasa bioskop, panggung hiburan, studio radio swasta, taman hiburan, obyek wisata dan jasa hiburan lainnya;
- b. Sub sektor hotel ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi disini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang serta berbagai jenis penginapan lainnya;
- c. Kegiatan sub sektor restoran Restoran/Rumah Makan mencakup usaha penyediaan makanan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan;
- d. Jasa penunjang angkutan, meliputi kegiatan pemberian jasa penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan, seperti terminal, parkir, ekspedisi serta jasa penunjang lainnya. Data perkembangan Pembentukan PDRB dari Kegiatan Ekonomi Pariwisata disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.134.
Kegiatan Ekonomi Pariwisata Dalam Pembentukan PDRB (ADHB)
Tahun 2013–2017

Uraian		2013		2014		2015		2016		2017	
		Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		774,872.17	3.939%	880,266.29	4.030%	999,331.85	4.122%				
1	Penyediaan Akomodasi	275,427.93	1.400%	316,912.52	1.451%	363,657.88	1.502%				
2	Penyediaan Makan Minum	499,444.24	2.539%	563,353.77	2.579%	635,189.09	2.620%				

Sumber: Statistik Umum Kabupaten Magelang, 2018, diolah.

Tabel 2.135.
Kegiatan Ekonomi Pariwisata Dalam Pembentukan PDRB (ADHK)
Tahun 2013–2017

Uraian		2013		2014		2015		2016		2017	
		Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		663,721.12	3.89%	712,338.27	3.98%	768,184.23	4.07%				
1	Penyediaan Akomodasi	199,553.79	1.17%	215,324.02	1.20%	234,041.39	1.24%				
2	Penyediaan Makan Minum	464,167.33	2.72%	497,014.25	2.77%	534,142.84	2.83%				

Sumber: Statistik Umum Kabupaten Magelang, 2018, diolah.

2.1.4.2.5. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sumber daya alam berupa air cukup melimpah di wilayah Kabupaten Magelang sehingga sangat berpotensi untuk pengembangan perikanan darat.

Pada tahun 2015 jumlah produksi perikanan darat 8.307,80 ton. Luas kolam yang ada adalah 257,70 ha. Untuk perikanan perairan umum, produksi (rawa, danau, sungai, dan lain-lain) mencapai 229,79 ha. Kabupaten Magelang mempunyai potensi besar sebagai sentra benih ikan.

Jumlah rumah pembenihan ada 5 (lima) Balai Benih Ikan (BBI), yang terdiri dari 3 (tiga) BBI Lokal dan 2 (dua) BBI milik Pemerintah Provinsi dengan didukung 2 (dua) Pasar Ikan Pemerintah Kabupaten dan 10 (sepuluh) pasar desa/kelompok.

Ikan yang diproduksi masyarakat meliputi ikan mas, nila, tawes, lele, gurami, bawal, patin dan lainnya. Selain produksi benih ikan dan ikan konsumsi, juga terdapat pengembangan potensi ikan hias. Budidaya ikan hias yang ada antara lain ikan koi, koko, komet, silkid serta pembesaran arwana *silver* maupun arwana *red*. Produksi benih terbesar adalah benih ikan nila. Selain untuk mencukupi kebutuhan benih ikan tingkat lokal juga untuk mencukupi kebutuhan benih ikan di tingkat Jawa Tengah dan juga dikirim ke Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Sumatra dan Kalimantan. Adapun pusat perbenihan terletak di Kecamatan Mungkid, Muntilan, dan Sawangan.

Kinerja makro urusan kelautan dan perikanan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu produksi perikanan (konsumsi, benih dan tangkap) dan konsumsi ikan.

Tabel 2.136.
Kinerja Makro Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi perikanan konsumsi (ton)	13.246	15.488,90	16.686,10	17.483,12	21.058,46
Produksi perikanan benih (x 1000 ekor)	1.014.518	1.202.663	1.269.407,80	1.419.973,14	1.717.550
Konsumsi ikan (kg/kap/th)	14,30	14,59	14,59	15,50	18,61
Produksi perikanan tangkap (ton)	208,25	272,70	285,34	282,98	275,90

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.137.
Produksi Benih Ikan Air Tawar (x 1000 ekor) Tahun 2013-2017

Produksi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lele	305.737	387.179	407.411	496.096,50	560.922,20
Karper	104.009	116.554	149.680	151.383,67	156.237,50
Tawes	64.789	68.509	81.484	81.797,77	100.406,80
Bawal	88.765	146.410	162.914	166.443,83	205.753,70
Nila	439.529	467.786	442.835	498.755,82	676.018,10
Gurame	7.489	12.117	19.881	19.812,95	11.413,70
Lainnya	4.193	4.105	5.202	5.683,61	3.325,40

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.138.
Produksi Ikan Konsumsi Air Tawar (ton) Tahun 2013-2017

Produksi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lele	4.093	4.321	4.870	5.250,93	6.954,33
Karper	1.642	2.043	1.966	2.025,08	2.119,11
Tawes	588	774	897	938,09	937,96
Bawal	2.368	2.967	3.323	3.478,87	3.944,03
Nila	3.962	4.293	4.464	4.811,36	5.777,76
Gurame	402	450	481	507,05	615,91
Lainnya	191	637	684	471,75	79,04

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.6. PERDAGANGAN

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dan diharapkan dapat berfungsi dan mempunyai peranan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Magelang. Pada Tahun 2015, kontribusinya mencapai 10,88%. Salah satu indikator perdagangan adalah nilai ekspor. Kegiatan ekspor di Kabupaten Magelang melibatkan relatif banyak komoditas antara lain kayu olahan, kulit samak, dan mebel. Kinerja makro urusan perdagangan antara lain bisa dilihat dari indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan. Pada tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB naik sebanyak 2,56% menjadi 13,44. Kenaikan tersebut disebabkan semakin kondusifnya iklim perdagangan di Kabupaten Magelang dan makin berkembangnya perekonomian di Kabupaten Magelang. Kinerja makro urusan perdagangan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.139.
Kinerja Makro Urusan Perdagangan Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	10,87	11,29	10,88	13,44	13,41
Ekspor Bersih Perdagangan (000 US \$)	76.505,81	102.000	93.076,81	101,83	88.500
Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	0	2,26	2,50	4,84	20,56

Sumber: Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang, 2018

Kabupaten Magelang memiliki 81 pasar tradisional yang terdiri dari 21 pasar Pemerintah Kabupaten dan 60 pasar desa pada Tahun 2016. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Jumlah pasar desa ini mengalami peningkatan pada tahun 2013 terdapat 58 pasar, pada tahun 2015 menjadi 60 pasar desa dan pada tahun 2016 menjadi 61 pasar Desa. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.140.
Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Magelang
Tahun 2013–2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PASAR TRADISIONAL	80	82	81	81	81
a.	Pasar Pemerintah Kabupaten	22	22	21	21	21
	- Pasar Umum	17	17	17	17	17
	- Pasar Hewan	2	2	2	2	2
	- Pasar Ikan	2	2	2	2	2
	- Pasar Kayu	1	1	0	0	0
b.	Pasar Desa	58	60	60	61	61

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
2	PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN	42	52	1467	1467	1.467
a.	Minimarket	35	45	1460	1460	1.460
b.	<i>Supermarket/ Hypermarket/ Dept. Store/Perkulakan</i> (Grosir)	5	5	5	5	5
c.	Pusat Perbelanjaan/Mal	2	2	2	2	2

Sumber: Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang, 2018

Hampir setiap pasar tradisional memiliki kelemahan yang sama, diantaranya adalah tampilan pasar yang terlihat kumuh, kotor, becek (jika musim hujan), pembuangan sampah yang kurang terpelihara sehingga menimbulkan bau yang tak sedap. Selain itu pasar tradisional juga kurang lahan parkir, tata ruang tidak beraturan, sirkulasi udara yang buruk, jam operasional yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang yang masih rendah. Belum lagi ditambah semakin menjamurnya pedagang kaki lima (PKL). Masalah infrastruktur yang hingga kini masih menjadi masalah serius di pasar tradisional adalah bangunan dua lantai yang kurang populer di kalangan pembeli. Dengan demikian, kebanyakan pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar ataupun naik ke lantai dua untuk berbelanja karena mereka bisa membeli dari PKL di luar pasar.

Kelemahan pasar tradisional tersebut masih ditambah dengan maraknya pembangunan pasar modern seperti *hypermarket*, *supermarket* dan *minimarket* telah menyudutkan pasar tradisional. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat. Salah satu perubahan perkembangan daerah *rural* (pedesaan) mejadi daerah *urban* (perkotaan) yaitu munculnya pasar modern sebagai tuntutan masyarakat perkotaan yang konsumtif. Munculnya pasar modern memberikan efek ganda bagi masyarakat maupun pemerintah. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menarik.

Untuk melindungi pasar tradisional, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan penataan dan pembinaan pasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Peraturan daerah ini diterbitkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

2.1.4.2.7. PERINDUSTRIAN

Kinerja makro urusan industri antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB, kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri, pertumbuhan industri serta jumlah kelompok pengrajin.

Tabel 2.141.
Kinerja Makro Urusan Industri Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (industri pengolahan) (%)	18,71	18,77	18,80	18,94	19,38
Pertumbuhan Industri	6,9	6,03	7,8	3,7	2,88
Cakupan Bina Kelompok pengrajin	N/A	2,76	3,70	0,71	0,72

Sumber: Disperinaker Kabupaten Magelang, 2018

Sektor industri memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Magelang. Kontribusinya terhadap pendapatan regional mengalami peningkatan pada periode tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 sebesar 18,59 dan terus meningkat mencapai 18,94% pada tahun 2016. Mesti kenaikan sektor industri terhadap PDRB tidak terlalu besar, namun hal ini menunjukkan indikasi bahwa sektor industri semakin berkembang di Kabupaten Magelang.

Data cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2012 dan 2013 belum tersedia karena indikator kinerja ini baru muncul pada Renstra SKPD tahun 2014-2019, sehingga pada tahun 2012 dan tahun 2013 belum dilakukan perhitungan data.

Kegiatan industri di Kabupaten Magelang terdiri dari beraneka macam dan tersebar di banyak kecamatan. Industri kecil dan menengah terbanyak adalah jenis industri kimia, agro dan hasil hutan. Sementara itu, untuk industri besar dan sedang yang terbanyak adalah industri makanan, minuman jadi dan tembakau serta industri macam-macam perhiasan, mainan anak-anak, cinderamata.

Secara spasial, potensi industri berbahan baku batu ada di Kecamatan Muntilan. potensi industri berbahan baku bambu ada di Kecamatan Borobudur, potensi industri sapu rayung ada di Kecamatan Mungkid, dan potensi industri kaleng bekas ada di Kecamatan Salaman. Sementara itu industri berbahan baku ketela berpotensi dikembangkan di Kecamatan Grabag, Mungkid dan Candimulyo dan industri gula kelapa potensial dikembangkan di Kecamatan Candimulyo.

Di Kabupaten Magelang juga terdapat beberapa sentra industri. Sentra industri yang menonjol di antaranya sentra industri kecil, kerajinan pahat batu di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, sentra industri makanan dari ketela (slondok) di Desa Sumurarum Kecamatan Grabag, sentra industri makanan jenang dodol krasikan di Desa Gulon Kecamatan Salam, sentra industri makanan dari beras ketan (tape ketan dan wajik) di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan dan Desa Salaman Kecamatan Salaman, industri kerajinan tanduk di Desa Pucang Kecamatan Secang, genting Desa Sidomulyo Kecamatan Salaman, kaleng bekas di Desa Tirtosari Kecamatan Sawangan dan Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman, industri mainan anak-anak di Desa Kalijoso Kecamatan Secang, industri kerajinan perak di Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik dan industri kerajinan sangkar burung di Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran.

Peningkatan persaingan dunia industri menuntut peningkatan mutu produk serta fasilitasi pengenalan produk-produk Kabupaten Magelang ke pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu pemerintah daerah harus senantiasa memberikan pembinaan kepada para pelaku

industri dan memberikan fasilitas promosi keluar daerah, Selain itu, kendala lainnya adalah masih terbatasnya teknologi, desain, akses permodalan serta pemasaran IKM. Guna meningkatkan pengembangan usaha kecil pemerintah daerah harus meningkatkan komitmen untuk memfasilitasi industri dan IKM secara optimal. Untuk lebih mengembangkan industri perlu strategi pengembangan lokalitas, sektor, sub sektor dan komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif, antara lain melalui percepatan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

2.1.4.2.8. KETRANSMIGRASIAN

Transmigrasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk dalam rangka menciptakan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan jumlah penduduk. Migrasi penduduk dari Kabupaten Magelang ke pulau-pulau di luar Jawa yang kurang padat penduduknya tersebut bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja demi peningkatan taraf hidup.

Tabel 2.142.
Data Transmigrasi Tahun 2012–2017

Tahun	Tujuan	Lokasi	Keterangan
2012	1. Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur	UPT Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas	Transmigrasi Umum: 25 KK (92 Jiwa)
	2. Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat	UPT Permata Kecamatan Terentang	Transmigrasi Umum: 10 KK (37 Jiwa)
	3. Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat	UPT Lengkong Yadom Kecamatan Ela Hilir	Transmigrasi Umum: 5 KK (18 Jiwa)
2013	1. Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah	UPT Telangsiong Kecamatan Paju Apat	Transmigrasi Umum: 10 KK (40 Jiwa)
	2. Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat	UPT Keliling Semulung Kecamatan Embaloh Hilir	Transmigrasi Umum: 5 KK (20 Jiwa)
	3. Kecamatan Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat	UPT Sei Mata Sp.4 Kecamatan Simpang Hilir	Transmigrasi Umum: 5 KK (17 Jiwa)
2014	4. Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Desa Umpanga Kec. Bungku Barat	2 KK (6 jiwa)
2015	1. Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan	SP. Watu Ds. Watu Kec. Marioriwawo	3 KK (10 jiwa)
	2. Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	SP. Umpaga Ds. Umpaga Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali	2 KK (6 jiwa)
2016	1. Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	UPT Sepunggur Kelurahan Tanjung Selor Kec. Tanjung Selor	10 KK (40 jiwa)
	2. Kabuapten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu	UPT Bukit Merbau SP2 Desa Bukid Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding	5 KK (19 jiwa)

Tahun	Tujuan	Lokasi	Keterangan
	3. Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Kalbera Kecamatan Bungku	5 KK (19 jiwa)
2017	Kab. Morowali Prov. Sulteng	UPT Kabera Desa Bauhe Riki-riko Kec. Bungku Barat	3 KK (8 jiwa)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Jenis transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan transmigrasi umum. Pada tahun 2016 jumlah transmigran sebanyak 20 KK yang terdiri dari 58 jiwa, yang tersebar di 3 (tiga) lokasi yaitu Kabupaten Bulengan Provinsi kalimantan Utara sebanyak 10 KK (40 jiwa), Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebanyak 5 KK (19 Jiwa) dan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 5 KK (19 jiwa)

Kinerja makro urusan ketransmigrasian tahun 2013-2017 disajikan pada tabel dibawah ini. Dilihat dari tabel tersebut ada peningkatan yang cukup banyak pada tahun 2015 (5 KK) menjadi 20 KK pada tahun 2016. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 3 KK.

Tabel 2.143.
Kinerja Makro Urusan Ketransmigrasian Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Transmigrasi umum	20	2	5	20	3

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.5.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

2.1.5.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besar tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin berpengaruh bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi

RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.144.
Asumsi Konsumsi RT Per Kapita Tahun 2013-2016

	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Total Pengeluaran RT (Rp)	15.043.207,89	16.562.970,15	18.373.763,09	20.157.675,80
2	Jumlah RT	336.432	341.780	347.127	365.671
3	Rasio (½)	44,71	48,46	52,93	55,13

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel 2.145.
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011-2013

Indikator	Tahun		
	2011	2012	2013
Indeks yang diterima petani (It)	137.21	145.98	157.99
Indeks yang dibayar petani (Ib)	131.65	137.72	150.38
NTP	104.58	105.99	105.11

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.1.3. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Tabel 2.146.
Persentase Konsumsi RT Non Pangan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Total Pengeluaran RT non pangan	45,56	46,54	40,00	46,44	
2	Total Pengeluaran	76,43	76,52	66,05	70,99	
3	Ratio (1/2)	59,61	60,80	60,00	65,41	

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.1.4. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan

seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Data produktivitas per sektor disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.147.
Angkatan Kerja Per Sektor Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Pertanian	4,92	5,02	5,14	5,26
Pertambangan & Penggalian	20,42	21,20	22,42	23,75
Industri Pengolahan	9,59	9,91	10,29	10,69
Listrik. Gas & Air bersih	156,72	148,95	149,05	142,70
Bangunan dan Konstruksi	9,44	9,87	10,31	10,94
Perdagangan. Hotel & Restoran	5,20	5,40	5,56	5,74
Pengangkutan & Komunikasi	13,67	14,33	15,06	15,86
Keuangan. Persewaan. & Jasa Perusahaan	16,47	16,81	16,99	17,22
Jasa-jasa	10,68	11,27	11,93	12,67
Jumlah	7,53	7,84	8,17	8,53

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

2.1.5.2.1. Aksesibilitas Daerah

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya yang terletak di antara 2 (dua) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu letak strategis kabupaten tersebut juga dapat dilihat dari letaknya yang di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang. Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.148.
Aksesibilitas Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah orang melalui terminal per tahun (000 orang)	3.705	3.448	3.656	3.286	2.794

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah bus AKAP (unit)	139	139	139	139	139
Jumlah angkutan pedesaan (unit)	841	862	862	862	860
Jumlah ijin trayek	1.023	1.088	1.129	1.143	1.089
Jumlah kendaraan angkutan barang (unit)	7.607	8.052	8.438	8.751	8.794

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.2.2. Ketersediaan Air Bersih

Wilayah Kabupaten Magelang memiliki cukup banyak sumber air dari mata air yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Pemanfaatannya selama ini dilakukan oleh institusi maupun masyarakat sebagai sumber air bersih yang digunakan masyarakat sehari-hari maupun untuk keperluan pertanian dan peternakan.

Akses air minum tercatat untuk daerah perkotaan mencapai 80,88% dan di wilayah perdesaan mencapai 78,55%. Target cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan pada tahun 2016 tercatat 76,20%. Sedangkan target sampai tahun 2017 sebesar 76,40%.

Peningkatan cakupan air minum diwilayah perkotaan disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan air minum/bersih. PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang memberikan pelayanan air bersih di Kabupaten Magelang adalah sebesar 20,83% dengan jumlah pelanggan sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebanyak 55.941 Sambungan Rumah (SR). Perkembangan atau penambahan pelanggan/Sambungan Rumah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.149.
Perkembangan Pelanggan Air Minum PDAM Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Pelanggan
2013	48.208
2014	49.662
2015	50.566
2016	53.693
2017	55.941

Sumber : PDAM Kabupaten Magelang, 2018

Kualitas air selalu dibawah pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang sehingga aman untuk konsumen karena memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari Kementerian Kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 492/Menkes/Per/IV/2010.

Untuk melayani seluruh pelanggan yang ada saat ini PDAM Kabupaten Magelang memanfaatkan 16 (enam belas) mata air dan 1 (satu) unit sumur dalam sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 2.150.
Sumber/ Air Minum PDAM Kabupaten Magelang

No	Nama Sumber/ Mata Air	Lokasi Sumber/Mata Air
1	Sijajurang & Silincat	Desa Bumirejo Kecamatan Kaliangkrik

No	Nama Sumber/ Mata Air	Lokasi Sumber/Mata Air
2	Semaren	Desa Sawangan Kecamatan Sawangan
3	Citroso	Desa Citroso Kecamatan Grabag
4	Tlogorejo	Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag
5	Blambangan	Desa Mungkid Kecamatan Mungkid
6	Karangampel	Desa Tampir Wetan Kecamatan Candimulyo
7	Banyutempung	Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan
8	Combrang	Desa Paremono Kecamatan Mungkid
9	Sidandang	Desa Tejosari Kecamatan Ngablak
10	Sidosari	Desa Sidosari Kecamatan Salaman
11	Sipragak	Desa Mangunrejo Kecamatan Salaman
12	Sigandulan	Desa Sukorejo Kecamatan Kajoran
13	Kanoman	Desa Sidomulyo Kecamatan Candimulyo
14	Nglimut/Rucah- Rucah	Desa Pagergunung Kecamatan Ngablak
15	Lebak	Desa Lebak Kecamatan Grabag
16	Gending	Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
17	Sumur Bor Gento	Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo

Sumber : PDAM Kabupaten Magelang, 2018

Peningkatan cakupan layanan air minum di wilayah perdesaan banyak dikelola oleh masyarakat baik melalui perpipaan maupun bukan perpipaan, pelayanan air minum perpipaan diwilayah perdesaan dibangun melalui program PAMSIMAS dan SPAM DAK. Terdapat 112 desa Pamsimas sampai dengan tahun 2016.

2.1.5.2.3. Fasilitas Listrik

Kemajuan pembangunan segala bidang di Kabupaten Magelang menuntut penyediaan kebutuhan listrik yang sangat besar. Lima tahun terakhir menunjukkan kebutuhan jaringan listrik bagi masyarakat meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya pertambahan pemasangan, baik bagi perumahan, perkantoran maupun industri.

Tabel 2.151.
Banyaknya Pelanggan Listrik. Kwh dan Nilai disalurkan
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Pelanggan	Pemakaian Listrik (kWh)	Nilai Yang Disalurkan (Rp)
2013	307.588	537.922.287	384.154.574.154
2014	322.121	560.728.978	441.718.987.596
2015	338.013	572.203.342	488.818.744.647
2016	337.587	602.144.192	499.001.173.690
2017	369.197	587.787.815	556.811.705.865

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Sebagian besar pemanfaatan listrik di Kabupaten Magelang adalah untuk keperluan rumah tangga, kemudian untuk keperluan sosial, untuk keperluan usaha, keperluan pemerintah dan keperluan industri.

2.1.5.2.4. Ketersediaan restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau *catering*. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

Tabel 2.152.
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Jml Usaha	Jml kursi	Jml Usaha	Jml Kursi	Jml Usaha	Jml Kursi	Jml Usaha	Jml Kursi
1.	Usaha restoran golongan tertinggi	2	765	2	1.050	3	1.050	3	1.050
2.	Usaha restoran golongan menengah	2	550	1	200	3	200	3	200
3.	Usaha restoran golongan terendah	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Usaha rumah makan kelas A	6	1.200	6	1.200	6	1.200	6	1.200
5.	Usaha rumah makan kelas B	33	2.130	33	2.130	3	2.130	3	2.130
6.	Usaha rumah makan kelas C	3	77	3	77	3	77	3	77
7.	Usaha rumah makan kelas D	35	2.200	35	2.200	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.2.5. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi:

- Hotel Berbintang

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Untuk Hotel Berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar: Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis: Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan, Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai

persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI.

- Hotel Melati

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

Tabel 2.153.
Jenis. Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1.	Hotel Bintang 5	1	22	32	1	22	32	1	22	32	1	22	32
2.	Hotel Bintang 4	2	191	191	2	191	191	2	191	191	2	191	191
3.	Hotel Bintang 3	3	67	74	3	67	74	3	67	74	4	77	85
4.	Hotel Bintang 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hotel Bintang 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	32	662	823	32	662	823	32	662	823	50	845	823
7.	Total Jumlah penginapan/Hotel	37	942	1120	37	942	1120	37	942	1120	57	1.135	1.178

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

Beberapa faktor yang mendorong iklim berinvestasi di suatu daerah meliputi faktor keamanan dan ketertiban, kemudahan perijinan dan pengenaan pajak daerah.

2.1.5.3.1. Keamanan dan Ketertiban

Bahwa salah satu syarat bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna adalah adanya iklim dan situasi wilayah yang aman dan kondusif. Untuk menindaklanjuti hal ini, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati senantiasa membangun hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak Polres, Dandim, Kejari, PN serta Pimpinan DPRD dalam melaksanakan program pemantauan situasi keamanan serta penegakan kebijakan-kebijakan nasional, baik melalui pertemuan-pertemuan berkala (rapat koordinasi) maupun yang bersifat insidentil. Hubungan tersebut dalam bentuk Rapat Koordinasi Muspida untuk merumuskan

kebijakan bersama dalam menyikapi berbagai dimensi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan/kemasyarakatan serta isu-isu strategis di Kabupaten Magelang.

2.1.5.3.2. Angka kriminalitas

Jumlah kasus pelanggaran hukum yang dilaporkan pada tahun 2014 terdiri dari 73 perkara, yang terdiri dari perkara pidana sebanyak 27, perkara perdata 50, serta 525 perkara lalu-lintas. Jumlah kasus pelanggaran hukum yang dilaporkan pada tahun 2015 terdiri dari 243 perkara. Data kriminalitas selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.154.
Angka Kriminalitas Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus Narkoba	32	16	23	26	25
2	Jumlah kasus Pembunuhan	8	3	6	-	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	13	3	3	1	22
4	Jumlah kasus Penganiayaan	17	11	23	26	15
5	Jumlah kasus Pencurian	110	49	16	107	173
6	Jumlah kasus Penipuan	-	-	31	18	27
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	64	2	3	1	2
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	355	175	243	286	339
9	Jumlah Penduduk	1.209.375	1.221.681	1.245.482	1.257.123	
10	Angka Kriminalitas per seribu penduduk (8)/(9)	0.29	0.14	0.19	0.22	0,26

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3.3. Jumlah Demonstrasi

Untuk meningkatkan iklim investasi Pemerintah Kabupaten Magelang perlu pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Dari tabel 2.160 dapat dijelaskan bahwa jumlah unjuk rasa yang terjadi secara keseluruhan mengalami kenaikan, jika pada tahun 2016 terdapat 2 kasus, unjuk rasa di tahun 2014 dan 2015 terdapat sebanyak 3 kasus, pada tahun 2017 terjadi 13 demonstrasi. Jumlah unjuk rasa di tahun 2017 terkait bidang ekonom 8 kali, sementara 5 kali unjuk rasa terkait bidang agama, antara lain aksi damai Rohingya.

Tabel 2.155.
Jumlah Demo Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bidang Politik	5			1	5
2	Bidang Ekonomi	5	3	3	1	8
3	Kasus Pemogokan Kerja				0	0
4	Jumlah Unjuk Rasa	10	3	3	2	13

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3.4. Kemudahan Perijinan

Investasi adalah penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi dengan membeli gedung-gedung, mesin-mesin, bahan-bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya.

Bank Dunia menetapkan 10 indikator tingkat kemudahan berusaha/investasi. Masing-masing adalah Memulai Usaha (*Starting Business*), Perizinan terkait Pendirian Bangunan (*Dealing with Construction Permit*), Pembayaran Pajak (*Paying Taxes*), Akses Perkreditan (*Getting Credit*), Penegakan Kontrak (*Enforcing Contract*), Penyambungan Listrik (*Getting Electricity*), Perdagangan Lintas Negara (*Trading Across Borders*), Penyelesaian Perkara Kepailitan (*Resolving Insolvency*), dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (*Protecting Minority Investors*).

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi yang relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudahan itu antara lain prosedur dan persyaratan, lamanya waktu dan biaya. Terkait kepastian biaya adalah tidak adanya pungutan diluar tarif yang resmi atau tidak ada pungli.

Kemudahan perijinan ini diwadahi dengan pembentukan PTSP (pelayanan perijinan satu pintu), yang diampu oleh DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu. DPM-PTSP diberi tugas untuk melakukan pembenahan seperti kemudahan perizinan, administrasi birokrasi pusat dan daerah, serta sinkronisasi kebijakan. Sinkronisasi perlu dilakukan karena saat ini masih terdapat berbagai regulasi daerah yang masih belum sejalan dengan kebijakan atau regulasi pemerintah pusat. Data pelayanan perizinan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.156.

Lama dan Jenis serta SKPD Penyedia Layanan Perizinan Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP

No	Jenis pelayanan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			SKPD Penyedia Layanan
		Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	
1.	Pendaftaran penanaman Modal	1	5	0	1	5	0				DPMPTSP
2.	Izin Prinsip Penanaman Modal	3	5		3	5	0				DPMPTSP
3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3	5	0	3	5	0				DPMPTSP
4.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	5	5	0	5	5	0				DPMPTSP
5.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3	7	0	3	7	0				DPMPTSP
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3	3	0	3	3	0				DPMPTSP
7.	Izin Usaha Industri (IUI)	14	10	0	14	10	0				DPMPTSP
8.	Izin Perluasan Industri	7	7	0	7	7	0				DPMPTSP
9.	Tanda Daftar Industri	14	5	0	14	5	0				DPMPTSP
10.	Izin Usaha Pariwisata	3	5	0	3	5	0				DPMPTSP
11.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	15	28	0	15	28	0				DPMPTSP
12.	Izin Usaha Penggilingan Padi	4	8	0	4	8	0				DPMPTSP
13.	Izin Usaha Angkutan Jalan	14	10	0	14	10	0				DPMPTSP
14.	Izin Usaha budidaya sarang burung sriti/walet										Distan dan Pangan
15.	Tanda Daftar Usaha Peternakan	14 hari	3 dokumen	Tidak dipungut biaya	14 hari	3 dokumen	Tidak dipungut biaya	14 hari	3 dokumen	Tidak dipungut biaya	Dinas Peterikan
16.	TDUP Perikanan: 1. Usaha Pembudidaya Ikan, 2. Usaha Penangkapan Ikan	14 hari	5 dokumen	Tidak dipungut biaya	14 hari	5 dokumen	Tidak dipungut biaya	14 hari	5 dokumen	Tidak dipungut biaya	Dinas Peterikan
17.	Izin Usaha Pertambangan										-
18.	Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu										Distan dan Pangan
19.	Izin Perluasan	7	5	0	7	5	0				DPMPTSP

No	Jenis pelayanan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			SKPD Penyedia Layanan
		Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	
20.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	7	5	0	7	5	0				DPMPTSP
21.	Izin Usaha Perubahan	5	5	0	5	5	0				DPMPTSP
22.	Izin Lokasi	18	11	0	18	11	0				DPMPTSP
23.	Izin Pemanfaatan Tanah	18	10	0	18	10	0				DPMPTSP
24.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	18	10	0	18	10	0				DPMPTSP
25.	Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (HO)	14	8	250.000.-	14	8	250.000				DPMPTSP
26.	Izin Mendirikan / mengubah / Merobohkan Bangunan (IMB)	14	10	4.542.962.-	14	10	4.542.962				DPMPTSP
27.	Izin Pemakaman dan Perabuan	1	2	0							DPMPTSP
28.	Izin Pemasangan Reklame	2	3	0							DPMPTSP
29.	Izin Trayek										Dishub
30.	Dokumen Amdal. UKL/UPPL dan SPPL										DLH
	UKL-UPL	14	± 5	0							DLH
	SPL	1	± 3	0							DLH
31.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang kesehatan										Dinkes
32.	Izin Riset/ Penelitian	1	3	0	1	3	0				DPMPTSP
33.	Izin Rumah Potong Hewan		Izin RPH: ‘- Sapi. kerbau. kuda : Rp.200.000 ‘- Babi : Rp. 400.000 ‘- Kambing. domba : Rp. 100.000								Dinas Peterikan
34.	Izin Air Tanah										DPUPR
35.	Izin Jagal	1	Izin Jagal Sapi. kerbau.kuda : Rp.50 000	Tidak dipungut biaya	1	7	Tidak dipungut biaya	1	7	Tidak dipungut biaya	Dis Peterikan

No	Jenis pelayanan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			SKPD Penyedia Layanan
		Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	
			Izin Jagal babi : Rp.100.000 Izin Jagal kambing. domba : Rp.25.000								
36.	Izin Ketenagakerjaan										Dinas Perin- dustrian dan Tenaga Kerja
37.	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	15 hari	5 dokumen *	**	15 hari	5 dokumen *	**	15 hari	5 dokumen *	**	DPU & ESDM
38.	Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah										DPU & ESDM
39.	Izin penggunaan Alat Berat										DPU & ESDM
40.	Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen										Disdakop UKM

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Magelang, 2018

Biaya resmi rata-rata (Rp.) :

- a.Cocok tanam 160,-/m
- b.Jembatan 1000,-/m
- c.Rumah, Toko dan Warung 500,-,m
- d.Rumah dinas 300.000,-/thn.

** Persyaratan ada 4 dokumen :

1. FC KTP
2. Gambar situasi lahan – gambar yang dimohon
3. Surat ijin pemakaian tanah pengairan yang lama
4. Surat keterangan bersedia membongkar
5. Surat keterangan dari lingkungan tidak ada permasalahan diketahui RT/RW, Kepala Dusun

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Magelang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dipungut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parker, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) mulai diberikan diwilayah Kabupaten Magelang mulai 1 Januari 2013. Pajak PBB-P2 diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tabel 2.157.
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	11	11	11	11	11
2	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	1	1	1	1	1
3	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	3	3	3	3	3
4	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	0	0	0	0	0

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3.5. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal. Melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel 2.158.
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Perda terkait perijinan	9	9	10	12	12
Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	-	-	-	-	-
Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	-	-	-	-	-

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3.6. Status Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk. dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Tabel 2.159.
Status Desa Tahun 2016

No.	Uraian	2015	2016	2017
1.	Jumlah Desa Pemula	144	0	
2.	Jumlah Desa Prakarsa	223	279	
3.	Jumlah Desa Berdikari	0	88	
4.	Jumlah Desa (1) + (2) + (3)	367	367	
5.	Presentase Desa Berstatus Prakarsa	60.76	76,02	

Sumber: Dispermades Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3.7. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

2.1.5.3.8. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah diselesaikan.

Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari pertumbuhan angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Periode tahun 2012-2016 angkatan kerja berpendidikan SMP ke atas cenderung meningkat.

Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari pertumbuhan persentase angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Tahun 2015 ke 2016 presentase angkatan kerja berpendidikan SD menurun dari 54,47 menjadi 53,67. Prosentase angkatan kerja tingkat pendidikan SMP naik dari 19,53 menjadi 19,67; prosentase angkatan kerja tingkat pendidikan SMA naik dari 12,60 menjadi 12,94; prosentase angkatan kerja tingkat pendidikan SMK naik dari 7,75 menjadi 7,85; prosentase angkatan kerja tingkat pendidikan Diploma naik dari 1,65 menjadi 1,67 dan prosentase angkatan kerja tingkat pendidikan Universitas naik dari 4 menjadi 4,18. Kenaikan ini mempunyai makna bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Magelang semakin meningkat.

Data peningkatan kualitas angkatan kerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.160.
Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2013-2017

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
≤ SD	365.032	365.673	366.067	363.860	363.242
SMTp	128.499	130.325	131.261	133.371	134.686
SMTA Umum	81.404	82.428	84.672	87.747	90.142
SMTA Kejuruan	50.468	51.324	52.097	53.241	53.927
Diploma I/II/III/Akademi	10.808	10.940	11.117	11.328	11.432
Universitas	24.398	25.642	26.849	28.362	29.715
	660.609	666.331	672.063	677.909	683.144

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2018

2.1.5.3.9. Tingkat ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung

pada penduduk usia kerja, Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.161.
Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	220.129	272.003	303.495	279.395	275.853
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	111.824	103.998	106.208	112.479	110.599
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	331.953	376.001	409.703	391.874	386.452
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	928.551	886.499	835.779	886.750	894.227
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,36	0,42	0,49	0,44	0,43

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Magelang, 2018

Rasio ketergantungan di Kabupaten Magelang tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada komposisi penduduk produktif dan penduduk belum produktif/tidak produktif di Kabupaten Magelang.